

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025

LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PANGKALPINANG



Ringkasan **Eksekutif**

Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio memiliki tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang Spektrum Frekuensi Radio. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang menjalankan berbagai fungsi, antara lain penyusunan rencana dan program, pengamatan serta pendeteksian sumber frekuensi radio, pelayanan penanganan gangguan Spektrum Frekuensi Radio, penertiban terhadap pelanggaran penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan alat/perangkat telekomunikasi, penyampaian Izin Stasiun Radio serta Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, serta pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keuangan, kepegawaian, dan hubungan masyarakat, guna mendukung tersedianya layanan telekomunikasi bagi masyarakat.



Evaluasi capaian kinerja Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang dilakukan berdasarkan beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan sejak awal Tahun 2025. Rincian capaian indikator kinerja tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel Capaian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
			2023		2024		2025	
1.	Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi	Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	80%	100%	100%	100%	80%	100%
		Pemeriksaan Stasiun Radio	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	98%	100%	99%	100%	95%	100%
		Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi	-	-	-	-	75%	100%
		Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	-	-	-	-	85%	100%
		Penanganan Sanksi Denda Administratif	-	-	-	-	80%	100%
		Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	-	-	-	-	100%	100%
		Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)	100%	168.3%	100%	160%	100%	100%
		Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Sosialisasi Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%



		Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien	Nilai Kinerja Anggaran Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang Tahun 2025	87	94,04	87	94,05	86,95	81,75
		Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	80	100	100	100	97	100

Ringkasan capaian kinerja Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang disajikan pada bagian berikut.

CAPAIAN KINERJA LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PANGKALPINANG

Pada sasaran kegiatan 1 “Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi”

IK-1 Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota

Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang menetapkan target pemantauan sebesar 80% terhadap kabupaten/kota di wilayah kerja. Berdasarkan pelaksanaan kegiatan monitoring penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, pemantauan telah mencakup 7 kabupaten/kota, sehingga capaian kinerja mencapai 100% dari target yang ditetapkan.

IK-2 Pemeriksaan Stasiun Radio

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang ditetapkan untuk melaksanakan pemeriksaan stasiun radio dengan target capaian 100%, yang meliputi kegiatan Pemeriksaan *Microwave Link-Open Shelter* dan *Remote Site*, Pengukuran Stasiun Radio FM, serta Pengukuran Stasiun TV Digital. Seluruh target yang telah ditetapkan tersebut berhasil direalisasikan dengan tingkat pencapaian sebesar 100%.

IK-3 Persentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

Penanganan gangguan Spektrum Frekuensi Radio ditetapkan dengan target penyelesaian sebesar 95% dari seluruh aduan gangguan yang diterima.

Pada tahun 2025, terdapat 1 (satu) objek aduan gangguan Spektrum Frekuensi Radio dan seluruh aduan tersebut telah ditindaklanjuti hingga tuntas. Dengan demikian, indikator kinerja IK-3 Persentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio mencapai 100%, sehingga target yang ditetapkan telah terpenuhi sepenuhnya.

IK-4 Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomdigi

Kegiatan Penertiban Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi berfungsi sebagai instrumen pengawasan dan penegakan kepatuhan terhadap regulasi. Melalui kegiatan penertiban, negara memastikan bahwa Spektrum Frekuensi Radio sebagai sumber daya alam terbatas dimanfaatkan secara tertib, efisien, dan aman.

Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang ditargetkan 75% temuan tertangani dari seluruh pelanggaran yang ditemukan saat kegiatan Penertiban pengguna frekuensi ilegal dari Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang tidak bersertifikat .

Terdapat 9 temuan pada tahun 2025 dan semua temuan sudah ditangani dan ditindaklanjuti.

Dengan demikian, realisasi IK-4 Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi Tahun 2025 adalah 100%.

IK-5 Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT

Indikator kinerja berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur yang digunakan untuk mendukung kegiatan monitoring, pengukuran dan identifikasi Spektrum Frekuensi Radio dengan target 12 laporan dan menargetkan 85% berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur dengan baik, pada tahun 2025 realisasi kinerja 100 %, sehingga target yang ditetapkan telah terpenuhi sepenuhnya.

IK-6 Penanganan Sanksi Denda Administratif

Indikator kinerja pengenaan sanksi denda administratif merupakan tindak lanjut dari penertiban. Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang di targetkan 80% invoice sanksi denda terselesaikan. Terdapat 9 invoice pengenaan sanksi denda administratif dan 9 invoice tersebut sudah terbayarkan. Sehingga capaian Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang tahun 2025 adalah 100%.

IK-7 Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan

Kegiatan pengukuran kualitas layanan dilaksanakan untuk menyediakan data pengukuran kualitas layanan jaringan seluler yang akurat di seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Seluruh target pengukuran pada kabupaten/kota berhasil dicapai 100% .

Dari hasil pengukuran kualitas layanan, kecepatan internet antar penyelenggara jaringan bergerak seluler berkisar antara 40 Mbps sampai dengan 115 Mbps. Data kecepatan tersebut dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi, pembinaan, serta peningkatan mutu layanan telekomunikasi bagi masyarakat.

IK-8 Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)

Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang berhasil melaksanakan tugas dan fungsi sesuai target Perjanjian Kinerja. Capaian tersebut ditunjukkan melalui pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) sebanyak 6 kali dengan 76 peserta, pelaksanaan Bimtek Izin Komunikasi Radio Perikanan (IKRAN) sebanyak 1 kali dengan jumlah 50 peserta, serta penerbitan 41 Izin Stasiun Radio (ISR) Maritim. Pelaksanaan kegiatan telah mencapai realisasi 100%, sehingga target yang ditetapkan telah terpenuhi.

IK-9 Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio

Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik dengan realisasi seluruh indikator kinerja utama sesuai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pelaksanaan penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio berhasil mencapai capaian 100%, meliputi penyampaian dan penghubungan piutang sebanyak 193 berkas serta koordinasi pelimpahan piutang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebanyak 4 (empat) kali kegiatan.

IK-10 Sosialisasi Pelayanan Publik

Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang telah melaksanakan 1 kali Sosialisasi Pelayanan Publik dengan jumlah 68 peserta. Pelaksanaan kegiatan berhasil mencapai tingkat realisasi 100% dengan jumlah peserta yang melampaui ketentuan minimal yang telah ditentukan yakni sejumlah 30 peserta.

IK-11 Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)

Survei Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan sebanyak 4 kali dengan jumlah 85 responden dan memperoleh nilai 3,82 dari skala 4. Survei ini telah melampaui target yang ditetapkan yakni minimal 1 kali pelaksanaan, jumlah minimal 30 responden dan target 3.2 dari skala 4.

IK-12 Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)

Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK) telah dilaksanakan sebanyak empat kali dengan melibatkan total 85 responden dan menghasilkan nilai sebesar 3,81 dari skala 4. Survei ini telah melampaui target yang ditetapkan yakni minimal 1 kali pelaksanaan, jumlah minimal 30 responden dan target 3.6 dari skala 4.

IK-13 Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)

Indikator Kinerja Tindak lanjut verifikasi site *microwavelink* yang tidak sesuai dilaksanakan untuk memastikan keakuratan dan kesesuaian data koordinat site Izin Stasiun Radio (ISR) dengan kondisi riil di lapangan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Seluruh target tindak lanjut verifikasi terhadap 95 site berhasil diselesaikan 100% melalui kegiatan verifikasi secara *deskwork* ataupun *open shelter*.

Pada sasaran kegiatan 2: "Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien"

Nilai Kinerja Anggaran Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang Tahun 2025

Pada Indikator Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang merupakan penilaian yang dilakukan oleh Direktorat Anggaran Kementerian Keuangan atas Pengelolaan Anggaran selama Tahun 2025 yang dilakukan oleh Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang. Nilai capaian Indikator Pelaksanaan Anggaran adalah 81,75 dari target yang ditetapkan sebesar 86,95. Nilai ini menunjukkan bahwa realisasi kurang dari target yang telah ditetapkan karena adanya perubahan nomenklatur dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian Komdigi serta adanya perubahan kode satker yang terjadi pada tahun 2025.

Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang adalah 100 dari target yang ditetapkan sebesar 97.

Realisasi Anggaran Tahun 2025

Pelaksanaan anggaran Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang sampai dengan akhir Desember 2025 dapat direalisasikan sebesar **Rp.9,223,992,531,-** dari pagu anggaran **Rp.10,421,437,000,-** dengan rincian sebagai berikut:

- Realisasi anggaran satker lama (Januari-Juni) **Rp.3,286,589,657,- (99.99%)** dari pagu anggaran sebesar **Rp.3,287,010,000,-**.
- Realisasi anggaran satker baru (Juli-Desember) **Rp.5,937,402,874,- (83.22%)** dari pagu anggaran sebesar **Rp.7,134,427,000,-**.

Kata Pengantar

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahrabbi'alam, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan ridho-Nya juaah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang Tahun 2025, merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah kepada instansi yang lebih tinggi dan kepada masyarakat.

Dokumen ini juga merupakan dokumen penting dalam siklus perencanaan sebagai umpan balik untuk masukan tahun berikutnya, sehingga dapat membantu penyusunan rencana strategik dan rencana kinerja serta pelaksanaan pengukuran kinerja. Dokumen ini merupakan data terpadu antara kinerja anggaran yang mendukungnya, antara sasaran dan keluaran yang dicapai, sehingga dapat menjadi instrumen untuk menilai efektifitas dan efisiensi, dan produktifitas instansi.

LKIP ini telah disusun dengan cermat, tepat dan terukur dengan melibatkan Tim Kerja Umum & RT, Tim Kerja Monitoring dan Penertiban Spektrum Frekuensi Radio & APT, Tim Kerja Sarana Prasarana Monitoring dan Layanan, serta Tim Kerja Kualitas Layanan Infrastruktur Digital dilingkungan Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang.

Melalui LKIP Tahun 2025, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja misi, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada Tahun 2025, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategi Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital dan Rencana Kinerja Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang Tahun 2025.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai seberapa jauh keberhasilan dan capaian kinerja Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada Tahun 2025. Semoga laporan ini dapat bermanfaat.



Pangkalpinang, 28 Februari 2026

KEPALA LOKA MONITOR Spektrum Frekuensi Radio PANGKALPINANG

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Henry Priyadi', written over a light blue background.

HENRY PRIBADI

Daftar isi

Ringkasan Eksekutif	i
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	viii

BAB I

Pendahuluan

Latar Belakang	2
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
Potensi dan Permasalahan Strategis	6
Sistematika Pelaporan	7

BAB II

Perjanjian Kinerja

Rencana Strategis Tahun 2025-2029	9
Sasaran Program	9
Perjanjian Kinerja Tahun 2025	9

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kerja Organisasi

IK 1 Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota	15
IK 2 Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio	21
IK 3 Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	28
IK 4 Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital	33
IK 5 Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	39
IK 6 Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif	
IK 7 Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	48

IK 8 Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKLAN)	52
IK 9 Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	58
IK 10 Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan Publik	64
IK 11 Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	69
IK 12 Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	75
IK 13 Persentase (%) Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)	80
IK 21 Nilai Kinerja Anggaran Loka Monitor SFR Pangkalpinang Tahun 2025	86
IK 22 Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran ...	94

B. Capaian Kerja Organisasi

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	100
Kepegawaian	112
Kegiatan Pemeliharaan Sertifikasi ISO 9001:20015	115
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	116
Penerapan Manajemen Resiko di Loka Monitor SFR Pangkalpinang	121
Benchmark Kinerja	123

BAB IV

PENUTUP	125
---------------	-----

The background features a low-angle shot of a telecommunications tower against a clear blue sky. A worker is visible on the tower's structure. The image is overlaid with semi-transparent geometric shapes, including triangles and chevrons, in various shades of blue. The title text is centered and rendered in a bold, white, sans-serif font.

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Spektrum Frekuensi Radio merupakan sumber daya alam yang bersifat terbatas dan tidak dapat diperbarui, sehingga pengelolaan serta pemanfaatannya harus dilakukan secara optimal dan bertanggung jawab. Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio sepenuhnya berada di bawah penguasaan negara untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3). Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, penggunaan Spektrum Frekuensi Radio semakin meningkat dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang tertib, teratur, dan efisien guna mencegah terjadinya gangguan (interferensi), mengingat perambatan gelombang radio tidak mengenal batas wilayah maupun negara.

Pengaturan serta pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dalam rangka pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio, pemerintah mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital pada Kementerian Komdigi sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital di daerah memiliki tugas dan fungsi sebagai pelaksana pengawasan dan pengendalian frekuensi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang bertujuan untuk menilai capaian kinerja Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana pengawasan dan pengendalian Spektrum Frekuensi Radio di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan selaras dengan visi serta misi organisasi. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana evaluasi untuk mengetahui dampak positif maupun negatif dari kebijakan yang telah ditetapkan.

Melalui laporan kinerja ini, dapat dilakukan evaluasi dan penetapan langkah-langkah perbaikan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, serta penyelarasan pelaksanaan kegiatan utama dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan organisasi. Selain itu, laporan ini dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pada periode selanjutnya.

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025. Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian bidang penggunaan frekuensi radio di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang melaksanakan fungsi:

- Penyusunan rencana dan program;
- Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, dan pemantauan Spektrum Frekuensi Radio;
- Penertiban terhadap pelanggar penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan standard perangkat pos dan informatika;
- Pelaksanaan pengukuran dan validasi data penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
- Penyampaian izin stasiun radio dan surat pemberitahuan pembayaran biaya hak pengguna frekuensi serta pendampingan penyelesaian piutang biaya hak pengguna frekuensi radio;
- Pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan Spektrum Frekuensi Radio;
- Pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio;
- Pelaksanaan ujian amatir radio; dan
- Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatatusahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat Unit Pelaksana Teknis bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Struktur Organisasi Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang terdiri dari:

Tim Kerja Umum dan Rumah Tangga

Tim Kerja Umum & RT mempunyai tugas:

- Perencanaan dan program, urusan keuangan, sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, serta penyusunan evaluasi dan laporan
- Manajemen Risiko dan Kepatuhan Internal

Tim Kerja Monitoring dan Penertiban Spektrum Frekuensi Radio & APT

Tim Kerja Monitoring dan Penertiban Spektrum Frekuensi Radio & APT mempunyai tugas:

- Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pengukuran, pemeriksaan stasiun radio, dan pemantauan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta

pemenuhan standardisasi alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi dan infrastruktur digital lainnya

- Pemantauan dan evaluasi penggunaan alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi dan infrastruktur digital lainnya
- Pelaksanaan pemantauan penyelenggaraan telekomunikasi khusus
- Pelaksanaan penertiban dan penegakan hukum di bidang pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, pemenuhan standardisasi alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi serta telekomunikasi khusus
- Pelaksanakan kegiatan penanganan gangguan Spektrum Frekuensi Radio
- Pelaksanaan kegiatan pemusnahan barang hasil penertiban Spektrum Frekuensi Radio/APT
- Pemantauan dan evaluasi kegiatan penertiban Spektrum Frekuensi Radio/APT dan penanganan gangguan Spektrum Frekuensi Radio
- Pengenaan sanksi denda administratif atas pelanggaran kewajiban penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, kewajiban sertifikat alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi, serta penyelesaian piutang denda administratif

Tim Kerja Sarana Prasarana Monitoring dan Layanan

Tim Kerja Sarana Prasarana Monitoring dan Layanan mempunyai tugas:

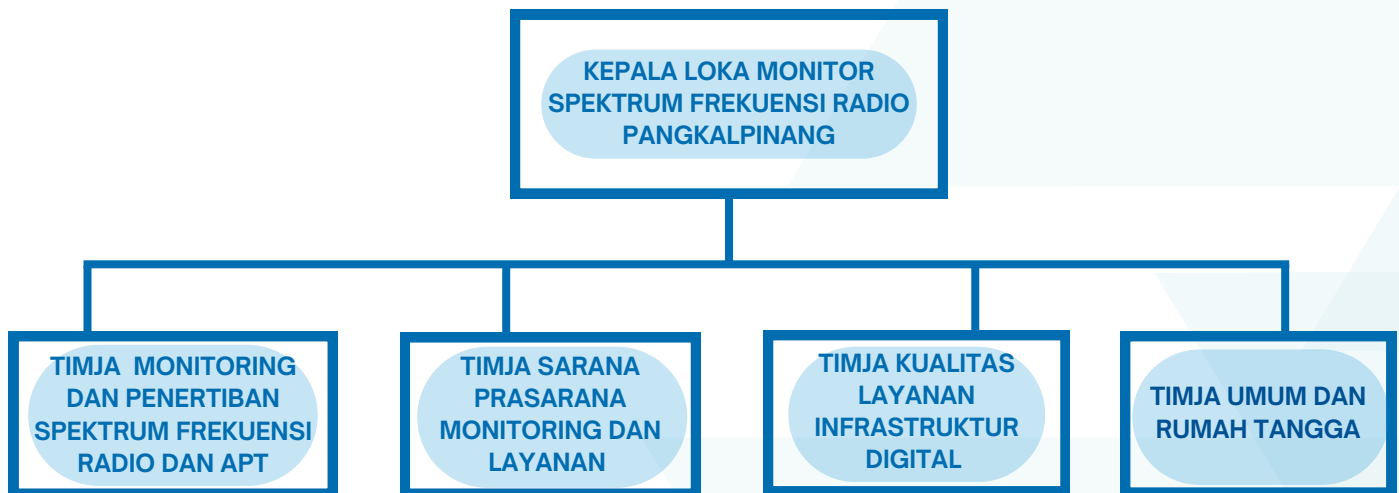
- Pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio dan perangkat ukur kualitas layanan.
- Pelaksanaan penyiapan perangkat monitor frekuensi radio dan perangkat ukur kualitas layanan.
- Pendampingan penyelesaian piutang Biaya Hak Pengguna Frekuensi Radio.
- Pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan Spektrum Frekuensi Radio
- Pelaksanaan ujian amatir radio dan sertifikasi izin komunikasi radio perikanan.
- Pelaksanaan konsultasi perizinan bidang Spektrum Frekuensi Radio, sertifikasi operator radio, dan sertifikasi alat telekomunikasi dan/atau perangkat telekomunikasi, serta penyelenggaraan telekomunikasi khusus.

Tim Kerja Kualitas Layanan Infrastruktur Digital

Tim Kerja Kualitas Layanan Infrastruktur Digital mempunyai tugas:

- Pelaksanaan pengukuran kualitas layanan infrastruktur digital.
- Pengelolaan data hasil pengukuran kualitas layanan infrastruktur digital.
- Pembaharuan data kualitas layanan infrastruktur digital ke dalam aplikasi PMT.
- Sosialisasi hasil ukur kualitas layanan pada masyarakat.

Bagan Struktur Organisasi



POTENSI DAN PERMASALAHAN STRATEGIS

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada koordinat 0°50' hingga 4°10' Lintang Selatan dan 104°50' sampai dengan 109°30' Bujur Timur. Provinsi ini memiliki luas wilayah daratan dan perairan sebesar 81.725,06 kilometer persegi dengan Kota Pangkalpinang sebagai ibu kota. Secara geografis, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berbatasan dengan Selat Bangka di sebelah barat, Selat Karimata di sebelah timur, Laut Natuna di sebelah utara, dan Laut Jawa di sebelah selatan. Provinsi ini dikenal dengan berbagai oleh-oleh khas seperti getas, kericu, dan terasi, serta memiliki kekayaan budaya yang beragam, mencakup adat istiadat, kepercayaan, seni, dan kuliner yang menjadi daya tarik tersendiri. Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat sebanyak 1.459.873 jiwa.

Spektrum Frekuensi Radio merupakan sumber daya alam yang bersifat terbatas (*limited natural resources*) dan pengelolaannya memiliki dampak strategis serta nilai ekonomis yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio yang optimal dalam mendukung pertumbuhan sektor telekomunikasi mampu memberikan efek berganda (*multiplier effect*) bagi perekonomian, antara lain melalui pengembangan infrastruktur transportable, peningkatan layanan internet, serta perluasan akses jaringan telekomunikasi. Sejalan dengan hal tersebut, jumlah pengguna Spektrum Frekuensi Radio juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, mencakup penyelenggara penyiaran, radio konsesi, dan operator seluler.

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio juga melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perangkat telekomunikasi.

SISTEMATIKA PELAPORAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun ruang lingkup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Pendahuluan yang memuat gambaran umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis serta isu-isu utama (*strategic issues*) yang dihadapi organisasi;
- Perencanaan kinerja yang menyajikan ringkasan atau ikhtisar perjanjian kinerja pada tahun berjalan;
- Akuntabilitas kinerja yang menguraikan capaian kinerja organisasi beserta realisasi anggaran;
- Penutup yang memuat simpulan umum atas pencapaian kinerja organisasi serta rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan guna peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.



BAB II

PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029

Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang sebagai Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitoring Frekuensi Radio Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital mendukung sepenuhnya rencana strategis 2025 - 2029 yang disusun oleh Kementerian Komdigi c.q. Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, agar mampu memenuhi kebutuhan pencapaian-pencapaian pembangunan nasional yang telah dicanangkan dan untuk mencapai 3 (tiga) tujuan utama yaitu **Terhubung** (Konektivitas digital yang inklusif untuk semua, dari kota hingga desa terpencil), **Tumbuh** (Ekosistem digital yang memberdayakan), dan **Terjaga** (Ruang digital aman, terpercaya, dan berdaulat).

B. SASARAN PROGRAM

Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang sebagai Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitoring Frekuensi Radio mendukung sepenuhnya Program Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital pada periode 2025 yang telah disusun yaitu mempercepat penyediaan konektivitas broadband inklusif, berkualitas, dan terjangkau dan mempercepat penyediaan sistem dan jaringan komunikasi untuk layanan khusus secara nasional seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Komdigi RI Nomor 16 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Komdigi Tahun 2025-2029.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, maka Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang memiliki peran dalam mencapai beberapa target indikator kinerja. Sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan (1)	Indikator Kegiatan (2)	Target (3)	Capaian (4)
1.	Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi	Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	80% Kab/Kota	100%
		Pemeriksaan Stasiun Radio	100%	100%

		Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	95%	100%
		Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat TeleKomdigi	75%	100%
		Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	85%	100%
		Penanganan Sanksi Denda Administratif	80%	100%
		Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	100%	100%
		Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)	100%	100%
		Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100%	100%
		Sosialisasi Pelayanan Publik	100%	100%
		Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	100%	100%
		Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	100%	100%
		Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)	100%	100%

2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien	Nilai Kinerja Anggaran Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang Tahun 2025	86,95	81,75
		Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	97	100

Jumlah anggaran yang tersedia untuk mendukung kinerja Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang pada Tahun 2025 adalah sebesar **Rp.10,421,437,000,-** dengan rincian sebagai berikut:

- Anggaran satker lama (Januari-Juni) **Rp.3,287,010,000,-** dengan Realisasi 99.99%
- Anggaran satker baru (Juli-Desember) **Rp.7,134,427,000,-** dengan Realisasi 83.22%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, Laporan Kinerja Instansi Tahun 2025 memiliki fokus utama mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran program yang ingin dicapai oleh Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara lengkap capaian kinerja dari rencana kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel Capaian Kinerja Organisasi

No	Sasaran Kegiatan (1)	Indikator Kegiatan (2)	Target (3)	Capaian (4)
1.	Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi	Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio	80% Kab/Kota	100%
		Pemeriksaan Stasiun Radio	100%	100%
		Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	95%	100%
		Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat TeleKomdigi	75%	100%
		Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	85%	100%
		Penanganan Sanksi Denda Administratif	80%	100%

		Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	100%	100%
		Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKLAN)	100%	100%
		Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100%	100%
		Sosialisasi Pelayanan Publik	100%	100%
		Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	100%	100%
		Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	100%	100%
		Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)	100%	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien	Nilai Kinerja Anggaran Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang Tahun 2025	86,95	81,75
		Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	97	100

Pada Sasaran Kegiatan I berupa **"Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Telekomunikasi dan Layanan Telekomunikasi"** terdapat 13 Indikator Kinerja, berikut ringkasan pencapaian masing-masing indikator.

IK 1 Persentase (%) Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota.

I. Latar Belakang

Spektrum Frekuensi Radio merupakan sumber daya terbatas yang sangat penting dalam mendukung infrastruktur komunikasi dan penyiaran nasional. Sifat rambat gelombang radio yang tidak mengenal batas wilayah menjadikan kegiatan monitoring sebagai aspek krusial dalam menjaga keteraturan penggunaan frekuensi, menghindari gangguan (interferensi), dan menjamin kepatuhan terhadap izin yang telah diberikan.

Seiring meningkatnya kebutuhan layanan komunikasi, baik untuk kepentingan publik seperti seluler dan BWA (*Broadband Wireless Access*) maupun kepentingan internal institusi, potensi terjadinya penggunaan spektrum yang tidak tertib dan tidak sesuai perizinan juga semakin besar. Oleh karena itu, indikator Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota diperlukan sebagai instrumen pengawasan untuk memastikan pemanfaatan spektrum berlangsung secara tertib, efisien, dan sesuai regulasi.

Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital memiliki peran strategis dalam melaksanakan kegiatan monitoring penggunaan spektrum di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang terdiri dari 7 kabupaten/kota.

Pada tahun 2025, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang menargetkan pelaksanaan kegiatan monitoring penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di seluruh wilayah kerja, yaitu sebanyak 7 (tujuh) kabupaten/kota di ProvKepulauan Bangka Belitung. Adapun sasaran teknis dari kegiatan monitoring ini adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan monitoring di seluruh kabupaten/kota yang terdiri dari:
 - Kota Pangkalpinang
 - Kabupaten Bangka
 - Kabupaten Bangka Tengah
 - Kabupaten Bangka Selatan
 - Kabupaten Bangka Barat
 - Kabupaten Belitung
 - Kabupaten Belitung Timur
- b. Melakukan observasi terhadap 15 (lima belas) *subservice*/pita frekuensi utama di setiap kabupaten/kota.
- c. Menemukan potensi penggunaan ilegal, interferensi, atau penggunaan tidak sesuai izin.

II. Capaian

Tabel Realisasi Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Kabupaten/Kota

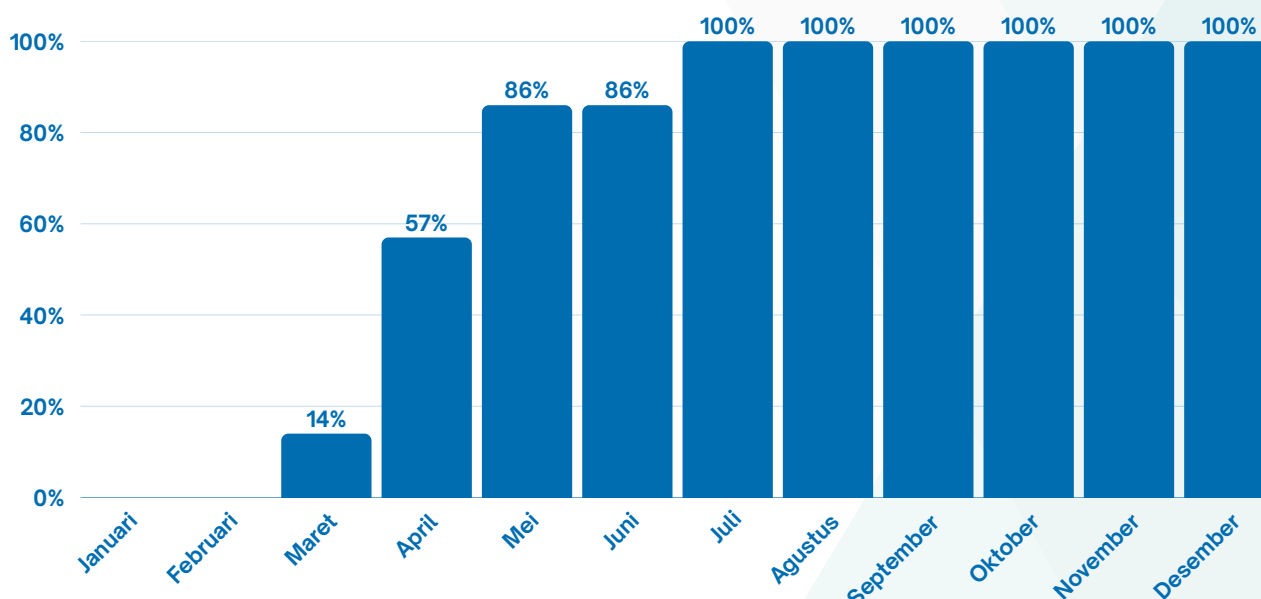
Indikator Kinerja	Persentase (%) monitoring penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di kabupaten/kota				
	2021	2022	2023	2024	2025
Target	80%	80%	80%	100%	80%
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%

Seluruh target kegiatan monitoring Spektrum Frekuensi Radio pada tahun 2025 telah tercapai 100%, sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan. Capaian tersebut meliputi:

- Monitoring telah dilaksanakan di 7 (tujuh) kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mencakup seluruh wilayah kerja Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang.
- Setiap kabupaten/kota telah diobservasi untuk 15 (lima belas) *subservice* atau pita frekuensi utama, sesuai sasaran teknis kegiatan.
- Monitoring minimal 60% ISR melalui Aplikasi *Report Online* (ROL)
- 80% hasil monitoring berhasil teridentifikasi

Dari capaian indikator kinerja persentase (%) kabupaten/kota yang telah dilaksanakan, berikut rincian progress capaian dari bulan ke bulan pada tahun 2025 :

Grafik PK Monitoring Kab/Kota - Per Bulan



III. Analisa

Secara umum, capaian indikator monitoring Capaian indikator Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik.

Karakteristik wilayah Bangka Belitung sebagai provinsi kepulauan dengan kondisi geografis yang didominasi oleh wilayah pesisir dan laut menjadikan pengelolaan serta pengawasan Spektrum Frekuensi Radio memiliki tantangan tersendiri, terutama terkait potensi interferensi antarpengguna, penggunaan frekuensi radio untuk kepentingan maritim, serta keterbatasan jangkauan perangkat monitoring di wilayah tertentu.

Namun demikian, pelaksanaan monitoring yang dilakukan oleh Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang telah mampu menjawab tantangan tersebut melalui perencanaan kegiatan yang berbasis kebutuhan wilayah dan karakteristik penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Bangka Belitung. Pemanfaatan stasiun monitoring tetap, transportable, serta stasiun bergerak memungkinkan kegiatan observasi dan identifikasi Spektrum Frekuensi Radio menjangkau seluruh kabupaten/kota secara efektif. Selain itu, penggunaan Aplikasi Report Online (ROL) dan data referensi perizinan menjadi faktor penting dalam meningkatkan akurasi hasil monitoring.

Keberhasilan pencapaian target 100% dipengaruhi oleh:

- Pemanfaatan teknologi monitoring spektrum secara optimal;
- Standarisasi metode observasi dan identifikasi pita frekuensi;
- Kompetensi SDM Fungsional Pengendali Frekuensi Radio;
- Koordinasi yang baik antara Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital dan UPT.

Hasil capaian monitoring tahun 2025 yang mencapai 100% menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan yang diterapkan telah berjalan efektif dalam menjaga ketertiban penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di wilayah Bangka Belitung.

IV. Faktor Kendala, Upaya Percepatan dan Dampak

Dalam pelaksanaannya, kegiatan monitoring tidak terlepas dari berbagai kendala, antara lain-luasnya wilayah pengawasan yang harus dijangkau, dinamika penggunaan frekuensi radio yang terus berkembang. Selain itu, potensi interferensi lintas wilayah juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses identifikasi dan analisis spektrum.

Untuk mengatasi kendala tersebut, dilakukan berbagai upaya percepatan dan perbaikan, antara lain optimalisasi penggunaan stasiun monitoring tetap, transportable, dan bergerak, serta peningkatan pemanfaatan Aplikasi Report Online dalam pelaporan hasil monitoring. Perencanaan kegiatan monitoring juga disusun secara lebih berbasis data historis sehingga pelaksanaan dapat lebih fokus dan efektif.

Dampak dari pencapaian indikator ini antara lain meningkatnya kepatuhan pengguna Spektrum Frekuensi Radio terhadap ketentuan perizinan, menurunnya potensi gangguan frekuensi, serta tersedianya data monitoring yang berkualitas sebagai dasar perencanaan dan pengendalian Spektrum Frekuensi Radio ke depan.



Gambar : Kegiatan Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

V. Tindak lanjut/Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja monitoring telah dimanfaatkan sebagai:

- Bahan evaluasi internal kinerja UPT;
- Dasar perencanaan kegiatan monitoring tahun berikutnya;
- Referensi pengambilan kebijakan pengendalian Spektrum Frekuensi Radio.

Rekomendasi perbaikan dari tahun sebelumnya yang telah ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

- **Pemutakhiran Database Nasional (SIMS)**

Temuan lapangan telah disinkronkan dengan data pada Sistem Informasi Manajemen Frekuensi Radio (SIMS) sehingga data spektrum lebih akurat dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan berbasis data aktual.

- **Pemetaan Potensi Gangguan dan Evaluasi Okupansi**

Hasil monitoring sudah menjadi dasar evaluasi okupansi frekuensi di setiap wilayah. Dari data ini, data dipetakan menjadi peta frekuensi yang padat, kosong, atau berisiko mengalami interferensi, yang selanjutnya digunakan untuk mendukung perencanaan perizinan dan alokasi frekuensi.

- **Pelatihan dan Penguatan SDM Monitoring**

Penguatan kapasitas petugas lapangan melalui pelatihan teknis lanjutan telah dilakukan untuk menjaga kualitas pelaksanaan monitoring dan pemanfaatan alat ukur terbaru.

- **Penyusunan Rekomendasi Tindak Lanjut**

Data hasil monitoring sudah digunakan untuk menyusun rekomendasi teknis kepada Direktorat terkait, termasuk penggudangan ISR yang tidak digunakan, atau penertiban terhadap penggunaan frekuensi ilegal.

VI. Rekomendasi Perbaikan

Meskipun capaian kinerja telah mencapai target maksimal, tetap diperlukan upaya perbaikan berkelanjutan. Rekomendasi yang dapat dilakukan pada tahun selanjutnya antara lain :

- **Pelatihan dan Penguatan SDM Monitoring**

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia fungsional pengendali frekuensi radio menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas kinerja monitoring. Upaya ini dapat dilakukan melalui pelatihan teknis berkelanjutan, pembaruan pengetahuan terkait regulasi dan teknologi terbaru, serta pengembangan kapasitas analisis data

- **Penyusunan Rekomendasi Tindak Lanjut**

Data hasil monitoring digunakan untuk menyusun rekomendasi teknis kepada Direktorat terkait, termasuk penggudangan ISR yang tidak digunakan, atau penertiban terhadap penggunaan frekuensi ilegal.

- **Pemetaan Potensi Gangguan dan Evaluasi Okupansi**

Hasil monitoring menjadi dasar evaluasi okupansi frekuensi di setiap wilayah akan terus dilakukan. Data hasil akan dipetakan menjadi peta frekuensi yang padat, kosong, atau berisiko mengalami interferensi, yang selanjutnya digunakan untuk mendukung perencanaan perizinan dan alokasi frekuensi.

- **Integrasi Sistem Data Monitoring**

Penguatan integrasi sistem data monitoring perlu terus dilakukan untuk memastikan ketersediaan data yang akurat, konsisten, dan mudah diakses. Integrasi antara data hasil monitoring, data perizinan, serta sistem pelaporan nasional akan meningkatkan kualitas analisis dan mempermudah proses evaluasi kinerja. Dengan sistem data yang terintegrasi, pengambilan keputusan terkait pengendalian Spektrum Frekuensi Radio dapat dilakukan secara lebih cepat dan berbasis data yang komprehensif.

VII. Efisiensi

Target indikator yang tercapai mencerminkan adanya efisiensi sumber daya. Beberapa efisiensi yang dilakukan salah satunya adalah efisiensi waktu, hal ini dicapai melalui pemanfaatan sistem pelaporan elektronik yang mempercepat proses pengumpulan dan pengolahan data. Efisiensi sumber daya manusia dilakukan melalui pengaturan penugasan monitoring yang berbasis perencanaan dan prioritas wilayah.

VIII. Implementasi budaya BerAKHLAK

- **Berorientasi Pelayanan**

Kegiatan monitoring dilakukan dengan tujuan utama memberikan perlindungan terhadap kepentingan publik dan pengguna spektrum lainnya dari potensi gangguan frekuensi, serta menjaga kualitas layanan komunikasi.

- **Akuntabel**

Seluruh kegiatan monitoring dicatat dalam log kegiatan, dilaporkan secara rutin ke Direktorat, dan didokumentasikan dalam bentuk data rekaman frekuensi, foto lokasi, serta peta titik pengukuran yang dapat dipertanggungjawabkan.

- **Kompeten**

Tim monitoring menggunakan peralatan yang sesuai standar teknis dan memiliki kompetensi dalam pengoperasian alat serta analisis hasil monitoring, termasuk dalam mengidentifikasi sinyal ilegal atau tidak sesuai izin.

- **Harmonis**

Kerja sama yang baik terjalin antar anggota tim, serta dengan pemangku kepentingan daerah saat pelaksanaan di lapangan, seperti aparat pemerintah daerah dan masyarakat sekitar lokasi monitoring.

- **Loyal**

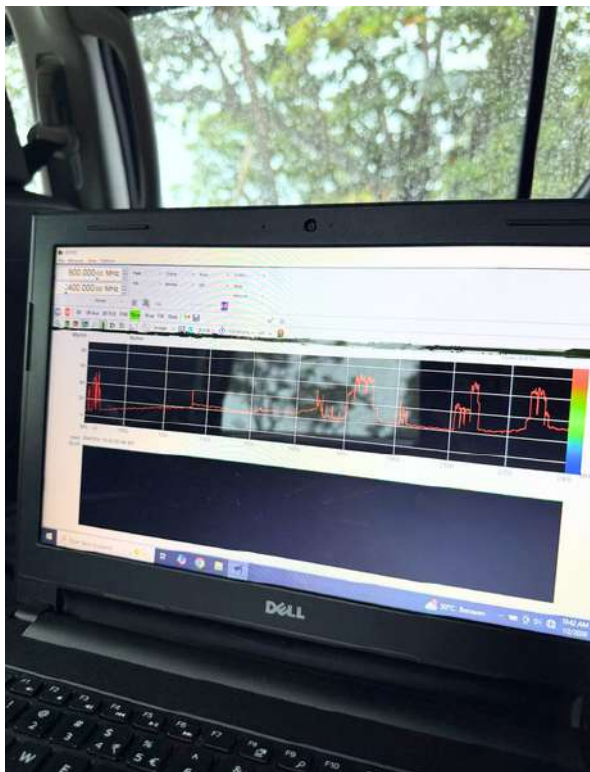
Petugas melaksanakan monitoring secara penuh meskipun dalam kondisi geografis yang menantang, menunjukkan dedikasi terhadap tugas pengawasan spektrum.

- **Adaptif**

Tim mampu menyesuaikan metode monitoring sesuai dengan kondisi wilayah, baik secara mobile, stasioner, maupun kombinasi keduanya, untuk memastikan hasil yang optimal.

- **Kolaboratif**

Monitoring dilaksanakan secara sinergis dengan kegiatan inspeksi dan pengukuran, serta menghasilkan data yang digunakan bersama oleh unit lain dalam mendukung kebijakan pengendalian Spektrum Frekuensi Radio nasional.



Gambar : Kegiatan Pemantauan di Lapangan

IK 2 Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio

I. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan serta pengendalian penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang melaksanakan kegiatan inspeksi stasiun radio *microwave link* di wilayah Bangka Belitung. Inspeksi ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menjaga kesesuaian antara penggunaan spektrum frekuensi dengan Izin Stasiun Radio (ISR) yang telah diterbitkan.

Sifat spektrum radio yang merambat tanpa mengenal batas wilayah memerlukan pengawasan aktif agar tidak terjadi gangguan antar pengguna. Maksud kegiatan ini adalah untuk mengecek kesesuaian antara parameter teknis dan administratif stasiun radio dengan *database* ISR (SIMS).

II. Capaian

Seluruh kegiatan pemeriksaan stasiun radio pada tahun 2025 telah terlaksana 100% sesuai dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Capaian tersebut meliputi:

Tabel Realisasi Pemeriksaan Stasiun Radio Kabupaten/Kota

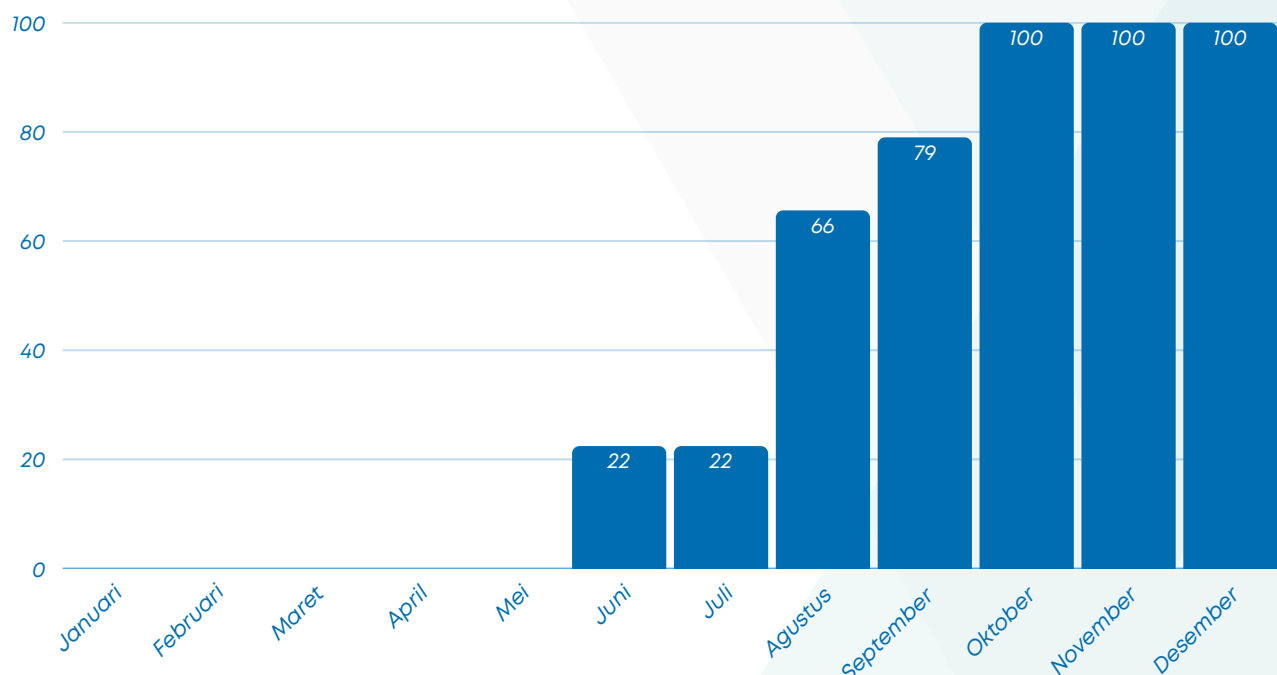
Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Target	50 %	100%	100%	100%	100%
Realisasi	87.04 %	100%	100%	100%	100%
(%) Capaian	174.08 %	100%	100%	100%	105,26%

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang ditargetkan mencapai 100% pemeriksaan stasiun radio, dengan rincian sebagai berikut:

• Pemeriksaan *Microwave Link*

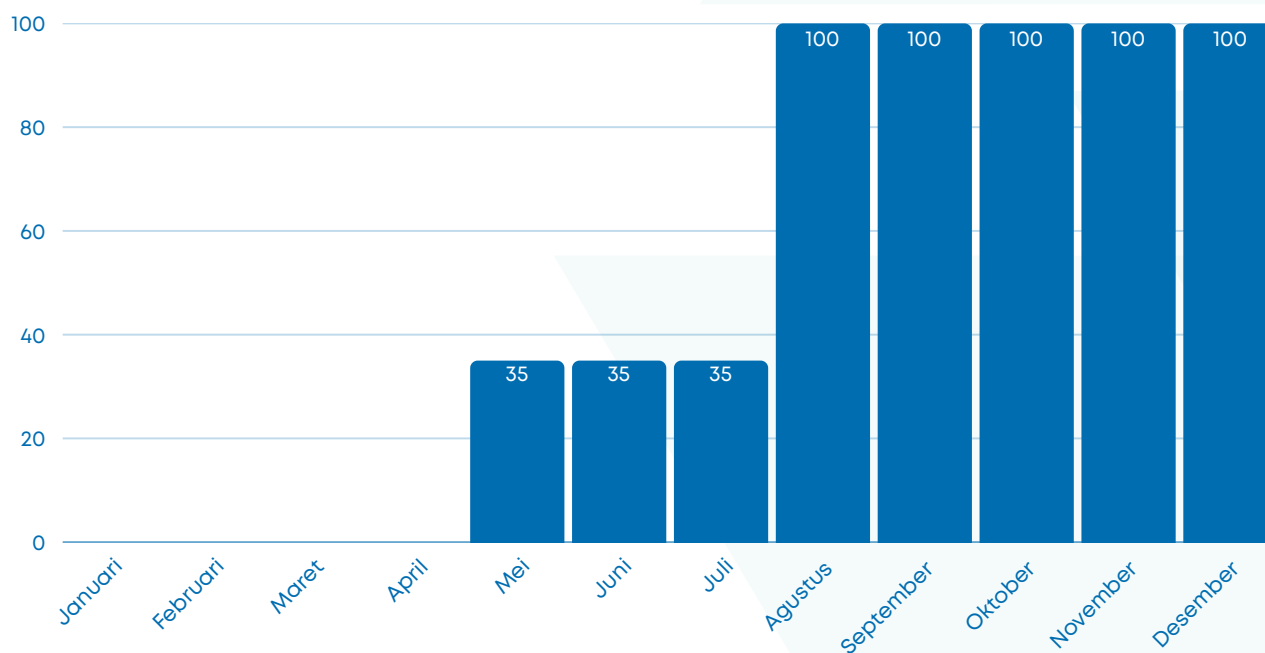
Kegiatan Pemeriksaan *Microwave Link* dengan metode *Remote Site* ditargetkan terhadap 1.114 stasiun radio *microwave link*. Pelaksanaan kegiatan ini berhasil mencapai tingkat realisasi 100%, di mana seluruh stasiun yang menjadi target telah diperiksa sesuai dengan ruang lingkup dan standar yang ditetapkan.

Grafik Persentase PK Inspeksi Microwave Link (Remote Site)



Kegiatan pemeriksaan microwave link dengan metode **Open Shelter** ditargetkan terhadap 108 stasiun radio *microwave link*. Pelaksanaan kegiatan ini berhasil mencapai realisasi 100%, di mana seluruh stasiun yang menjadi target telah diperiksa sesuai dengan ruang lingkup dan standar yang ditetapkan.

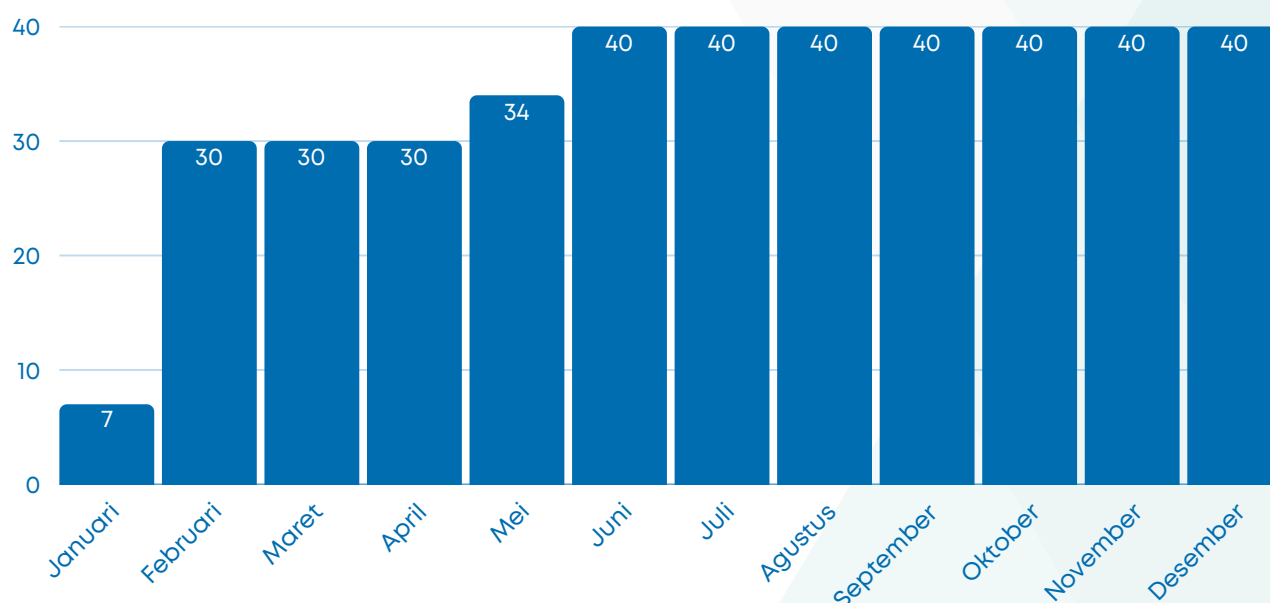
Grafik Persentase PK Inspeksi Microwave Link (Open Shelter)



• Pemeriksaan Stasiun Radio Siaran FM & TV Digital

Pengukuran stasiun siaran radio FM dan TV Digital ditetapkan dengan target sebanyak 40 stasiun. Berdasarkan hasil pelaksanaan, seluruh stasiun berhasil diukur sehingga realisasi kegiatan mencapai 40 stasiun atau sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan.

Grafik PK Inspeksi Stasiun Radio FM & TV Digital



Seluruh kegiatan pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memastikan kepatuhan pengguna spektrum terhadap Izin Stasiun Radio (ISR), serta mendukung pengendalian dan penertiban terhadap potensi gangguan dan penggunaan ilegal frekuensi. Realisasi capaian ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta komitmen tim dalam memenuhi seluruh target yang ditetapkan secara tepat waktu dan menyeluruh.

Kegiatan inspeksi mencakup kegiatan Penertiban Nasional Tahap II secara serentak, untuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kegiatan dilaksanakan di Kab. Bangka dan Kab. Belitung pada tanggal 05 - 08 Agustus 2025 dengan target Microwave link. Terdapat 43 (empat puluh tiga) temuan pelanggaran dan telah dilakukan tindak lanjut terhadap semua pelanggaran tersebut.

III. Analisa

Capaian PK Inspeksi Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang optimal dan berkelanjutan, di mana seluruh target inspeksi sebanyak 1.262 objek yang mencakup Inspeksi *Microwave Link* metode *Remote Site* dan *Open Shelter*, serta Inspeksi Radio Siaran FM dan TV Digital berhasil direalisasikan secara penuh dengan tingkat capaian 100% hingga akhir tahun. Pola realisasi yang meningkat secara bertahap, dengan akselerasi signifikan pada semester II, mencerminkan efektivitas perencanaan operasional yang adaptif serta kemampuan organisasi dalam merespons dinamika pelaksanaan di lapangan.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh optimalisasi metode remote site yang meningkatkan efisiensi dan cakupan inspeksi, penguatan koordinasi dan pengendalian kinerja internal, serta pemanfaatan data capaian bulanan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Secara umum, strategi dan inovasi yang diterapkan tidak hanya memastikan ketercapaian target tahunan, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai regulator yang mampu menerapkan pengawasan infrastruktur dan spektrum frekuensi secara efektif, efisien, dan sejajar dengan standar pengelolaan inspeksi di kawasan regional maupun internasional. Dalam konteks nasional, capaian ini menjadi indikator keberhasilan pengelolaan inspeksi di tengah tantangan geografis Indonesia yang luas dan beragam.

IV. Faktor Kendala, Upaya Percepatan dan Dampak

Pelaksanaan Pemeriksaan *Microwave Link* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghadapi kendala utama berupa kebutuhan waktu pemeriksaan yang relatif lama dan harus dilakukan secara berkala, sementara ketersediaan teknisi dari operator seluler terbatas. Kondisi ini berdampak pada penyesuaian jadwal pelaksanaan karena wilayah kerja operator mencakup Pulau Bangka dan Pulau Belitung, sehingga koordinasi dan mobilisasi teknisi memerlukan waktu yang tidak singkat. Untuk mengatasi kendala tersebut, dilakukan upaya percepatan melalui pengaturan ulang jadwal pemeriksaan secara lebih terencana, optimalisasi metode Pemeriksaan *Microwave Link Remote Site*, serta penguatan koordinasi dengan pihak operator dalam penentuan prioritas lokasi inspeksi.

Strategi tersebut mampu meminimalkan hambatan waktu penyelesaian kegiatan sehingga seluruh target pemeriksaan dapat direalisasikan sesuai dengan rencana. Dampak dari pencapaian indikator ini tercermin pada terjaganya kepatuhan teknis penyelenggara, meningkatnya keandalan jaringan microwave link, serta tersedianya data hasil pemeriksaan yang komprehensif sebagai dasar pengawasan dan pembinaan berkelanjutan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

V. Tindak lanjut/Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja Pemeriksaan Stasiun Radio pada tahun sebelumnya telah dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan rujukan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Spektrum Frekuensi Radio di wilayah kerja.

Rekomendasi perbaikan dari tahun sebelumnya yang telah ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

- **Menyarankan kepada operator untuk melakukan penggudangan ISR terhadap site yang sudah off-air.**

Pada periode sebelumnya, ditemukan sejumlah site Microwave Link yang sudah tidak beroperasi (off-air) namun masih tercatat aktif dalam database ISR. Sebagai tindak lanjut, telah dilakukan penyampaian rekomendasi kepada operator untuk melaksanakan penggudangan ISR terhadap site-site dimaksud. Upaya ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara kondisi operasional di lapangan dengan data perizinan, sehingga basis data ISR menjadi lebih akurat dan terkini.

- **Melaksanakan tindakan penertiban seperti teguran, penghentian pemancaran, dan penyegelan terhadap site yang tidak sesuai parameter teknis.**

Pada pelaksanaan inspeksi sebelumnya, masih ditemukan site Microwave Link yang tidak memenuhi parameter teknis sesuai ketentuan perizinan. Sebagai langkah perbaikan, telah dilaksanakan tindakan penertiban, mulai dari pemberian teguran, penghentian sementara pemancaran, hingga penyegelan terhadap site yang tidak menunjukkan upaya perbaikan. Tindakan ini dilakukan sebagai bentuk penegakan kepatuhan dan untuk mendorong operator segera melakukan penyesuaian teknis sesuai ketentuan yang berlaku.

VI. Rekomendasi Perbaikan

Untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pelaksanaan PK Inspeksi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, direkomendasikan penguatan integrasi data inspeksi melalui sistem monitoring yang lebih terpusat dan mudah diakses. Selain itu, penerapan pendekatan inspeksi berbasis risiko perlu terus dikembangkan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah kepulauan, kepadatan infrastruktur, serta potensi gangguan frekuensi. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan teknis inspeksi dan pemanfaatan teknologi digital juga perlu dilanjutkan agar pelaksanaan inspeksi semakin adaptif terhadap tantangan geografis dan operasional di daerah.

VII. Efisiensi

Pencapaian target PK Inspeksi Tahun 2025 menunjukkan efisiensi pemanfaatan sumber daya, khususnya melalui optimalisasi metode Remote Site yang mampu mengurangi kebutuhan perjalanan antar pulau, mempercepat waktu pelaksanaan inspeksi, serta menekan biaya operasional lapangan. Selain itu, pengelolaan jadwal inspeksi yang terencana dan pemantauan capaian secara berkala turut berkontribusi pada optimalisasi penggunaan sumber daya manusia dan anggaran secara efektif dan terukur. Efisiensi ini mendukung pencapaian target kinerja secara penuh sekaligus memperkuat prinsip tata kelola pemerintahan yang efisien dan akuntabel di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

VIII. Implementasi Budaya BerAKHLAK

• Berorientasi Pelayanan

Selalu mengutamakan kebutuhan dan kepentingan client dalam penanganan gangguan Spektrum Frekuensi Radio. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan Informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang kebijakan, prosedur, dan tindakan yang akan dilakukan untuk menangani gangguan tersebut. Selain itu, pastikan bahwa client dapat mengakses layanan tersebut dengan mudah dan dapat memberikan masukan atau umpan balik terkait kualitas layanan yang diberikan melalui aplikasi *Trouble Ticket*.

• Akuntabel

Memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan untuk menangani gangguan Spektrum Frekuensi Radio dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini meliputi pelaporan secara terbuka tentang tindakan yang diambil dan hasil yang dicapai, serta memastikan bahwa pengguna spektrum radio yang melanggar aturan dikenakan sanksi yang sesuai.

• Kompeten

Memastikan personel yang bertanggung jawab untuk menangani gangguan Spektrum Frekuensi Radio memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai dalam bidang tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan pelatihan dan pengembangan yang terus menerus, serta memastikan bahwa staf memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk melakukan tugas mereka dengan efektif.

• Harmonis

Menerapkan prinsip-prinsip harmonis dalam penanganan gangguan Spektrum Frekuensi Radio, meliputi koordinasi yang baik antara organisasi yang terlibat dalam pengelolaan spektrum radio, serta memastikan bahwa tindakan yang diambil untuk menangani gangguan tidak mengganggu kegiatan pengguna lain yang legal.

• Loyal

Menunjukkan loyalitas kepada aturan yang berlaku seperti memberikan layanan dengan sepenuh hati dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi pengguna yang legal.

- **Adaptif**

Kegiatan penanganan gangguan Spektrum Frekuensi Radio seringkali membutuhkan fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang berubah-ubah. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan prosedur dan strategi yang dapat menangani berbagai jenis gangguan, serta dengan terus mengembangkan dan memperbarui kebijakan dan prosedur sesuai dengan perubahan yang terjadi.

- **Kolaboratif**

Membangun kerja sama dan kolaborasi yang baik dengan semua pihak yang terlibat dalam penanganan gangguan Spektrum Frekuensi Radio.



Gambar: Kegiatan Pemeriksaan stasiun radio Tahun 2025

IK 3 Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio

I. Latar Belakang

Penanganan gangguan Spektrum Frekuensi Radio merupakan bagian dari layanan publik yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Layanan ini menjadi prioritas karena gangguan Spektrum Frekuensi Radio dapat berdampak langsung terhadap kualitas layanan telekomunikasi dan berpotensi merugikan masyarakat luas. Pengaduan masyarakat terkait gangguan Spektrum Frekuensi Radio juga merupakan salah satu bentuk layanan pengaduan publik yang harus ditangani secara cepat, tepat, dan akuntabel.

Seiring dengan pertumbuhan industri telekomunikasi dan meningkatnya jumlah pengguna frekuensi radio, potensi terjadinya gangguan Spektrum Frekuensi Radio semakin besar. Oleh karena itu, indikator Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio diperlukan untuk memastikan bahwa setiap laporan gangguan yang diterima dapat ditindaklanjuti secara efektif. Penerima manfaat dari indikator ini meliputi masyarakat pengguna layanan telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi yang berizin, serta instansi pemerintah yang memanfaatkan Spektrum Frekuensi Radio.

Penanganan gangguan Spektrum Frekuensi Radio juga merupakan salah satu bukti nyata pelayanan yang dilakukan Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang terhadap pemegang Izin Stasiun Radio (ISR), pemegang Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio (IPSFR), maupun pengguna Non Pemegang Izin dalam mengatasi adanya gangguan akibat interferensi frekuensi radio di wilayah kerja Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang.

Adapun target untuk sasaran Kegiatan penanganan gangguan Spektrum Frekuensi Radio di Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang selama Tahun 2025 adalah 95%, meliputi :

- Menangani seluruh aduan gangguan frekuensi radio yang dilaporkan melalui aplikasi Trouble Ticket;
- Melaporkan hasil penanganan gangguan melalui aplikasi Trouble Ticket.

II. Capaian

Indikator kerja Penanganan gangguan Spektrum Frekuensi Radio pada tahun 2025 mencapai target yaitu 100%, sesuai dengan sasaran kegiatan yang harus menyelesaikan seluruh aduan yang masuk pada aplikasi *Trouble Ticket*.

Pada Tahun 2025 terdapat 1 objek aduan gangguan, dan aduan yang masuk sudah ditindaklanjuti hingga selesai. Dengan demikian Persentase (%) penanganan gangguan Spektrum Frekuensi Radio tercapai sebesar 100%. Adapun surat gangguan yang masuk adalah sebagai berikut :

PT Telekomunikasi Seluler

- Gangguan frekuensi/kualitas layanan *Upload Band* (880 - 915 MHz)



Terlampir juga hasil capaian kinerja indikator penanganan gangguan di Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang, 5 tahun terakhir :

Tabel Capaian Penanganan Gangguan

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Target	70%	90%	93%	93%	95%
Realisasi	96,67%	96,34%	100%	100%	100%
(%) Capaian	138,10%	107,04%	107,53%	107,53%	105,26%

III. Analisa

Pelaksanaan penanganan gangguan Spektrum Frekuensi Radio di wilayah kerja Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. Setiap laporan gangguan yang diterima segera ditindaklanjuti melalui penugasan tim untuk melakukan analisis dan penanganan di lapangan. Meskipun jumlah laporan gangguan yang diterima relatif terbatas, proses penanganan tetap dilaksanakan secara sistematis dan profesional.

Capaian kinerja sebesar 100% menunjukkan bahwa mekanisme penanganan gangguan Spektrum Frekuensi Radio telah berjalan efektif. Keberhasilan ini didukung oleh koordinasi internal yang baik, pemanfaatan perangkat monitoring yang tersedia, serta kompetensi sumber daya manusia dalam melakukan analisis gangguan. Dengan penanganan yang tepat waktu, potensi gangguan lanjutan dapat diminimalkan dan kualitas layanan telekomunikasi tetap terjaga.

IV. Faktor Kendala, Upaya Percepatan dan Dampak

Dalam pelaksanaan penanganan gangguan Spektrum Frekuensi Radio, kendala yang dihadapi antara lain kompleksitas interferensi pada jaringan operator seluler yang disebabkan oleh tumpang tindih penggunaan frekuensi, karakteristik teknis jaringan seluler yang saling berdekatan, serta potensi gangguan dari perangkat non-standar di sekitar wilayah layanan. Interferensi pada jaringan seluler sering kali bersifat dinamis dan tidak terjadi secara terus-menerus, sehingga memerlukan waktu dan ketelitian lebih dalam proses identifikasi sumber gangguan.

Selain itu, kendala lain yang dihadapi adalah ketergantungan pada data teknis dan koordinasi dengan pihak operator seluler, khususnya dalam memperoleh informasi parameter jaringan yang diperlukan untuk analisis gangguan. Perbedaan waktu respons dan kebutuhan sinkronisasi jadwal antara petugas monitoring dan operator dapat memengaruhi kecepatan penanganan gangguan di lapangan.

Upaya percepatan dilakukan berupa :

- Melalui penguatan koordinasi teknis dengan operator seluler, pemanfaatan perangkat monitoring untuk melakukan pengukuran berulang pada waktu yang berbeda, serta analisis data hasil pengukuran yang lebih mendalam. Pendekatan ini memungkinkan sumber interferensi dapat diidentifikasi secara lebih akurat dan ditangani sesuai ketentuan.

Dampak dari upaya penanganan gangguan tersebut :

- Pemulihan kualitas layanan jaringan seluler, berkurangnya potensi gangguan berulang, serta meningkatnya keandalan layanan telekomunikasi bagi masyarakat pengguna layanan seluler di wilayah terdampak.

V. Tindak lanjut/Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja Laporan kinerja penanganan gangguan Spektrum Frekuensi Radio telah dimanfaatkan sebagai:

- Bahan evaluasi pelaksanaan layanan pengaduan dan penanganan gangguan;
- Data hasil penanganan gangguan digunakan untuk memetakan potensi gangguan, meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanganan gangguan selanjutnya, serta menjadi dasar perencanaan pengawasan Spektrum Frekuensi Radio.

Rekomendasi perbaikan dari tahun sebelumnya yang telah ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan koordinasi antara pengguna Spektrum Frekuensi Radio dengan maksud dan tujuan untuk meminimalisir gangguan Spektrum Frekuensi Radio.
- Memberikan pendidikan dan kesadaran publik melalui kegiatan sosialisasi terkait tertib penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan/atau alat perangkat telekomunikasi.

VI. Rekomendasi Perbaikan

Meskipun capaian kinerja penanganan gangguan Spektrum Frekuensi Radio telah mencapai target, perbaikan berkelanjutan tetap diperlukan untuk menjaga kualitas layanan serta mengantisipasi potensi peningkatan gangguan di masa mendatang, sebagai berikut :

Peningkatan kapasitas dan keandalan perangkat monitoring

Guna mendukung analisis gangguan jaringan seluler yang semakin kompleks.

Penguatan integrasi data penanganan gangguan

Dengan sistem monitoring dan data perizinan untuk mempercepat proses analisis dan pengambilan keputusan.

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia

Melalui pelatihan teknis berkelanjutan terkait penanganan gangguan.

Pengembangan analisis berbasis data

Sebagai upaya pencegahan dini terhadap potensi gangguan Spektrum Frekuensi Radio.

VI. Efisiensi

Untuk mencapai efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan penanganan gangguan Spektrum Frekuensi Radio, dilakukan beberapa cara berikut:

- Meningkatkan pemantauan frekuensi radio secara terus-menerus menggunakan teknologi pemantauan (*transportable*) untuk mendukung kegiatan penanganan gangguan Spektrum Frekuensi Radio.
- Penggunaan sistem pelaporan gangguan frekuensi radio melalui aplikasi *Trouble Ticket* telah membantu meningkatkan efisiensi penanganan gangguan. Sistem *Trouble Ticket* memungkinkan pelaporan gangguan yang mudah dan cepat, serta memungkinkan penggunaan informasi yang dikumpulkan untuk mempercepat penanganan gangguan.

VIII. Implementasi budaya BerAKHLAK

Implementasi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif sangat penting dalam kegiatan penanganan gangguan Spektrum Frekuensi Radio. Terlampir langkah yang diambil dalam kegiatan berdasarkan nilai-nilai ini :

• **Berorientasi Pelayanan**

Selalu mengutamakan kebutuhan dan kepentingan client dalam penanganan gangguan spektrum frekuensi radio. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang kebijakan, prosedur, dan tindakan yang akan dilakukan untuk menangani gangguan tersebut.

Selain itu, pastikan bahwa client dapat mengakses layanan tersebut dengan mudah dan dapat memberikan masukan atau umpan balik terkait kualitas layanan yang diberikan melalui aplikasi Trouble Ticket.

- **Akuntabel**

Memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan untuk menangani gangguan spektrum frekuensi radio dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini meliputi pelaporan secara terbuka tentang tindakan yang diambil dan hasil yang dicapai, serta memastikan bahwa pengguna spektrum radio yang melanggar aturan dikenakan sanksi yang sesuai.

- **Kompeten**

Memastikan personel yang bertanggung jawab untuk menangani gangguan spektrum frekuensi radio memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai dalam bidang tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan pelatihan dan pengembangan yang terus menerus, serta memastikan bahwa staf memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk melakukan tugas mereka dengan efektif.

- **Harmonis**

Menerapkan prinsip-prinsip harmonis dalam penanganan gangguan spektrum frekuensi radio, meliputi koordinasi yang baik antara organisasi yang terlibat dalam pengelolaan spektrum radio, serta memastikan bahwa tindakan yang diambil untuk menangani gangguan tidak mengganggu kegiatan pengguna lain yang legal.

- **Loyal**

Menunjukkan loyalitas kepada aturan yang berlaku seperti memberikan layanan dengan sepenuh hati dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi pengguna yang legal.

- **Adaptif**

Kegiatan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio seringkali membutuhkan fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang berubah-ubah. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan prosedur dan strategi yang dapat menangani berbagai jenis gangguan, serta dengan terus mengembangkan dan memperbarui kebijakan dan prosedur sesuai dengan perubahan yang terjadi.

- **Kolaboratif**

Membangun kerja sama dan kolaborasi yang baik dengan semua pihak yang terlibat dalam penanganan gangguan spektrum frekuensi radio.

IK 4 Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dan Digital

I. Latar Belakang

Perkembangan teknologi telekomunikasi yang semakin pesat mendorong meningkatnya penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta alat dan perangkat telekomunikasi di berbagai sektor. Di satu sisi, kondisi ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat dalam bentuk kemudahan komunikasi, akses informasi, dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun di sisi lain, peningkatan penggunaan tersebut juga menimbulkan potensi permasalahan, antara lain interferensi frekuensi, pelanggaran ketentuan perizinan, serta penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi yang tidak memenuhi standar teknis.

Oleh karena itu, indikator Penertiban Kepatuhan Standar Teknis dan Alat/Perangkat Telekomunikasi menjadi penting sebagai instrumen pengawasan dan penegakan kepatuhan terhadap regulasi. Melalui kegiatan penertiban, negara memastikan bahwa Spektrum Frekuensi Radio sebagai sumber daya alam terbatas dimanfaatkan secara tertib, efisien, dan aman. Penerima manfaat dari indikator ini meliputi penyelenggara telekomunikasi yang berizin, instansi pemerintah, serta masyarakat luas yang membutuhkan layanan telekomunikasi yang berkualitas dan bebas gangguan.

Untuk target sasaran kegiatan indikator kinerja Penertiban Kepatuhan Standar Teknis dan Alat/Perangkat Telekomunikasi Tahun 2025 adalah 75% temuan tertangani dari seluruh pelanggaran yang ditemukan saat kegiatan monitoring alat dan/atau perangkat telekomunikasi.

II. Capaian

Kegiatan kepatuhan standar teknis Radio dan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi terhadap 16 Jenis Perangkat (*HF All Band Transceiver, Wireless Access Point, Pemancar FM, Simbox, Repeater GSM, Radio RIG, GPS Tracker, Microwave Link (IDU/ODU) Handy Talkie, Set Top Box, Perangkat Low Power, Optical Line Terminal, Radio POC, Jammer, Fake BTS* dan APT Rakitan) dilaksanakan sebanyak 11 kegiatan pada tahun 2025, dengan pelaksanaan pelaporannya melalui aplikasi SMART (Sistem Aplikasi Monitoring dan Penertiban Alat/Perangkat Telekomunikasi).

Jumlah perangkat termonitor sebanyak **310** perangkat, terdiri dari **309** perangkat bersertifikat dan 1 pelanggaran perangkat yang ditindaklanjuti, berdasarkan perjanjian kinerja maka persentase capaian kegiatan dapat dihitung sebagai berikut:

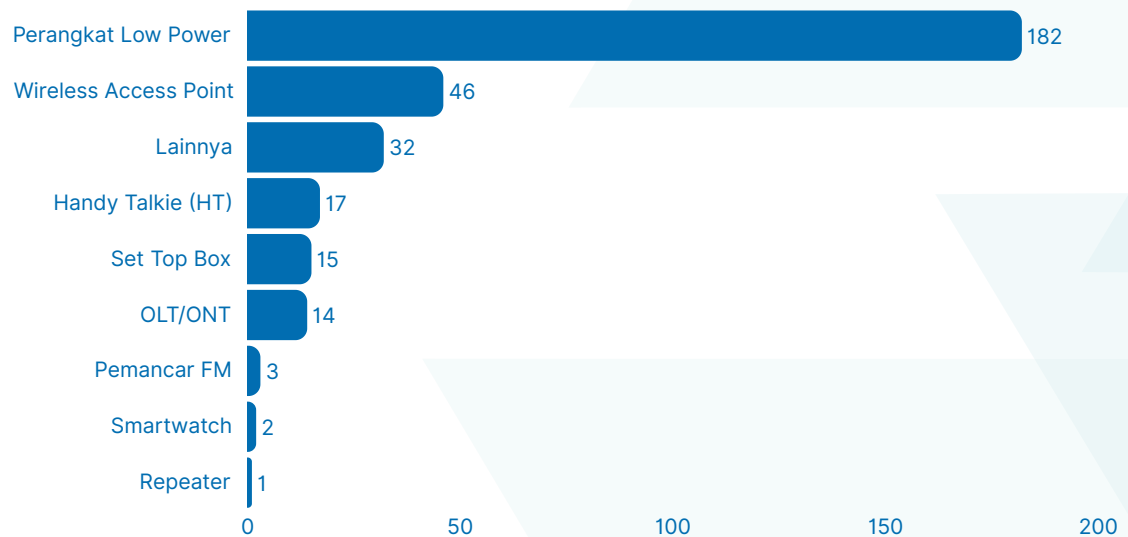
$$\frac{\sum \text{Perangkat bersertifikat termonitor} + \sum \text{Pelanggaran perangkat ditindaklanjuti}}{\sum \text{Perangkat termonitor}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Capaian } \frac{309+1}{310} \times 100\% = 100\%$$

Sehingga, persentase capaian kegiatan Monitoring Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi adalah sebesar **100%**.

Berikut grafik hasil monitoring Alat dan atau Perangkat Telekomunikasi berdasarkan jenis alat yang termonitoring :

Hasil Monitoring APT Per Jenis Perangkat



Dokumentasi Kegiatan Monitoring APT

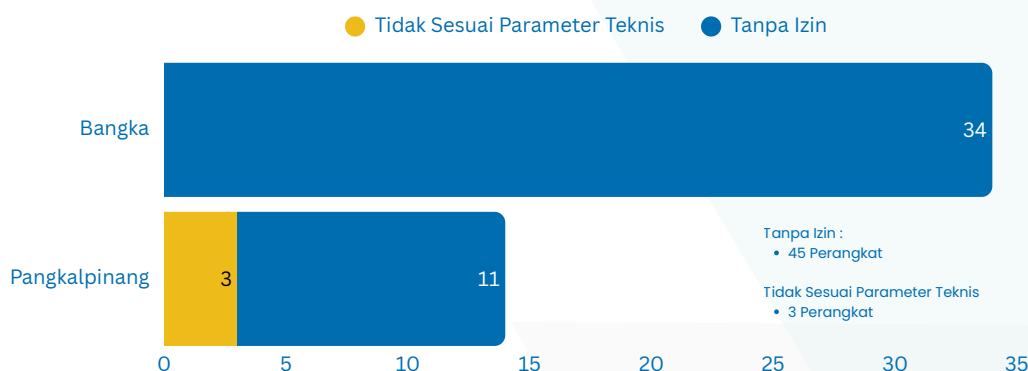


Gambar: Kegiatan Monitoring APT Tahun 2025

Selain itu, terdapat kegiatan Penertiban yang menargetkan penggunaan Radio dan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi, kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2025, sebagai berikut :

- Penertiban Nasional Tahap I pelaksanaan di Kab. Bangka dan Kota Pangkalpinang pada tanggal 05 - 09 Mei 2025 dengan target Izin Kelas Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi. Tidak terdapat temuan pelanggaran.
- Penertiban Nasional Tahap III pelaksanaan di Kota Pangkalpinang, Kab. Bangka dan Bangka Tengah pada tanggal 27 - 31 Oktober 2025 dengan target penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi pada dinas *Land Mobile*. Terdapat 7 (tujuh) temuan pelanggaran dan telah dilakukan tindak lanjut terhadap pelanggaran tersebut.
- Kegiatan penertiban yang dilaksanakan di Kab. Bangka dengan target penggunaan alat /atau perangkat telekomunikasi oleh pelaku usaha Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi pada dinas *Land Mobile* pada tanggal 25 - 29 November 2025. Terdapat 2 (dua) temuan pelanggaran dan telah dilakukan tindak lanjut terhadap pelanggaran tersebut.

Grafik jumlah temuan perangkat berdasarkan jenis pelanggaran di Kabupaten/Kota :



Tabel Capaian Penertiban

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2021	Monitoring Perangkat Telekomunikasi	3 Kegiatan	6 Kegiatan
2022	Persentase (%) Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi	90%	96.34%
2023	Persentase (%) Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi	93%	100%
2024	Persentase (%) Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi	93%	100%
2025	Persentase (%) Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi	75%	100%

III. Analisa

Target Perjanjian Kinerja untuk Penertiban Standar Teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi adalah 75% dan telah direalisasikan sebesar 100%. Namun demikian, terdapat kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan penertiban, seperti semakin banyaknya pengguna frekuensi illegal di wilayah hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang harus ditertibkan.

Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi dan pengawasan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio terhadap masyarakat di wilayah Provinsi Bangka Belitung.

Hasil penertiban selanjutnya ditindaklanjuti dengan pengenaan denda administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Dokumentasi Kegiatan Penertiban APT



Gambar: Kegiatan Penertiban APT Tahun 2025

IV. Faktor Kendala, Upaya Percepatan dan Dampak

Dalam pelaksanaan kegiatan tingkat kepatuhan standar teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi, kendala yang dihadapi antara lain :

- Luasnya wilayah pengawasan, sehingga adanya keterbatasan akses lokasi target operasi yang dapat dijangkau menggunakan mobil monitoring.
- Masih adanya sifat kurang kooperatif dari pihak yang menjadi target operasi, sehingga mengakibatkan kondisi lapangan yang kurang kondusif. Upaya yang telah dilakukan adalah bersikap humanis dan persuasif.

Upaya percepatan dalam pelaksanaan penertiban Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi dilakukan melalui :

- Integrasi hasil monitoring dengan kegiatan penertiban,
- Optimalisasi pemanfaatan aplikasi pelaporan,
- Pelaksanaan penertiban terencana baik dalam skala nasional maupun regional. Pendekatan ini memungkinkan setiap pelanggaran yang ditemukan dapat segera ditindaklanjuti.

Dampak dari pencapaian indikator tingkat kepatuhan standar teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi adalah :

- Meningkatnya kepatuhan pengguna Spektrum Frekuensi Radio dan alat/perangkat telekomunikasi terhadap regulasi,
- Menurunnya potensi interferensi,
- Serta terjaganya kualitas dan keandalan layanan telekomunikasi di wilayah kerja.

V. Tindak lanjut/Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja Laporan kinerja tingkat kepatuhan Standar Teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi telah dimanfaatkan sebagai :

- Bahan evaluasi pengawasan dan pengendalian penggunaan perangkat Spektrum Frekuensi Radio.
- Data hasil penertiban digunakan untuk mengidentifikasi pola pelanggaran, menyusun langkah pencegahan, serta menjadi dasar perencanaan kegiatan pengawasan dan penertiban pada periode selanjutnya.

Tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan tahun sebelumnya telah dilaksanakan adalah :

- Peningkatan koordinasi antara kegiatan monitoring dan penertiban, serta penyempurnaan mekanisme pelaporan hasil penindakan ke dalam sistem nasional.
- Memberikan edukasi dan kesadaran publik terkait tertib penggunaan perangkat Spektrum Frekuensi Radio melalui kegiatan sosialisasi.

VI. Rekomendasi Perbaikan

Untuk menjaga keberlanjutan capaian kinerja Penertiban Standar Teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi diperlukan perbaikan sebagai berikut :

- Diperlukan peningkatan kapasitas perangkat pendukung penertiban,
- Penguatan integrasi data hasil monitoring dan penertiban,
- Peningkatan kompetensi sumber daya manusia,
- Pengembangan analisis data untuk pencegahan pelanggaran secara lebih dini dan sistematis.
- Perlunya koordinasi dengan berbagai pihak pengguna Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi.
- Selain itu, proses penertiban juga memerlukan pendekatan yang cermat agar penegakan ketentuan dapat berjalan efektif tanpa mengganggu layanan penting.

VII. Efisiensi

Pencapaian indikator penertiban Penertiban Standar Teknis Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi mencerminkan adanya efisiensi yang diterapkan, yaitu sebagai berikut :

• Pelatihan dan pengembangan kapasitas personel

Dapat membantu dalam meningkatkan kemampuan personel dalam melakukan tugas-tugas penertiban standar teknis alat/perangkat telekomunikasi. Dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, personel dapat lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

- **Proses pelaporan dan tindak lanjut yang jelas**

Dapat membantu dalam meminimalkan waktu yang diperlukan untuk menangani pelanggaran. Hal ini dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan alat/perangkat telekomunikasi.

- **Kerjasama dan koordinasi dengan stakeholder terkait**

Seperti penyelenggara telekomunikasi, regulator, dan lembaga penegak hukum dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas penertiban. Kerjasama ini dapat membantu dalam membagi tugas-tugas penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan alat/perangkat telekomunikasi.

VIII. Implementasi Budaya BerAKHLAK

Implementasi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif sangat penting dalam kegiatan penertiban standar teknis alat/perangkat telekomunikasi. Berikut adalah beberapa contoh langkah-langkah yang dapat diambil untuk menerapkan prinsip - prinsip ini:

- **Berorientasi Pelayanan**

Fokus pada memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa peraturan dan kebijakan yang diterapkan bertujuan untuk melindungi hak-hak pengguna dan mengoptimalkan pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio.

- **Akuntabel**

Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan alat/perangkat telekomunikasi dilakukan secara akuntabel berupa pengawasan yang efektif terhadap pelanggaran dan penegakan hukum yang konsisten, serta transparansi dalam pengelolaan sumber daya Spektrum Frekuensi Radio.

- **Kompeten**

Memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai untuk menangani isu-isu teknis dan peraturan yang berkaitan dengan penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan alat/perangkat telekomunikasi.

- **Harmonis**

Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan alat/perangkat telekomunikasi dilakukan secara harmonis dengan kebijakan dan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah berupa koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio, seperti regulator, operator telekomunikasi, dan masyarakat umum.

- **Loyal**

Setia pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, termasuk integritas dan konsistensi dalam penegakan hukum, serta pengelolaan sumber daya Spektrum Frekuensi Radio yang adil dan transparan.

- **Adaptif**

Adaptif terhadap perubahan dalam industri telekomunikasi dan lingkungan regulasi yang berkaitan berupa kemampuan untuk menyesuaikan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan untuk memastikan penggunaan sumber daya Spektrum Frekuensi Radio yang optimal.

- **Kolaboratif**

Bekerjasama dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait dan aparat penegak hukum yang berwenang untuk mendampingi dalam kegiatan penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan alat/perangkat telekomunikasi.

IK 5 Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT

I. Latar Belakang

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang berkewajiban menjaga keberlangsungan operasional dan fungsi monitoring stasiun monitor frekuensi radio di wilayah kerjanya. Stasiun monitor frekuensi radio merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan tugas pengawasan, pengendalian, dan penertiban penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

Terjaganya operasional dan fungsi monitoring stasiun monitor sangat ditentukan oleh keandalan perangkat utama dan pendukung, kesiapan sistem, serta pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, inspeksi, dan verifikasi secara berkala. Penurunan tingkat operasional dan fungsi monitoring dapat berdampak pada tidak optimalnya pencapaian target kinerja pengawasan Spektrum Frekuensi Radio.

Sehubungan dengan hal tersebut, Loka Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang menetapkan indikator kinerja Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT sebagai salah satu ukuran kinerja utama. Melalui pelaksanaan pemeliharaan, inspeksi, dan verifikasi sistem secara terencana dan berkesinambungan, ditargetkan sebesar 85% stasiun monitor berada dalam kondisi operasional dan berfungsi dengan baik, guna mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

II. Capaian

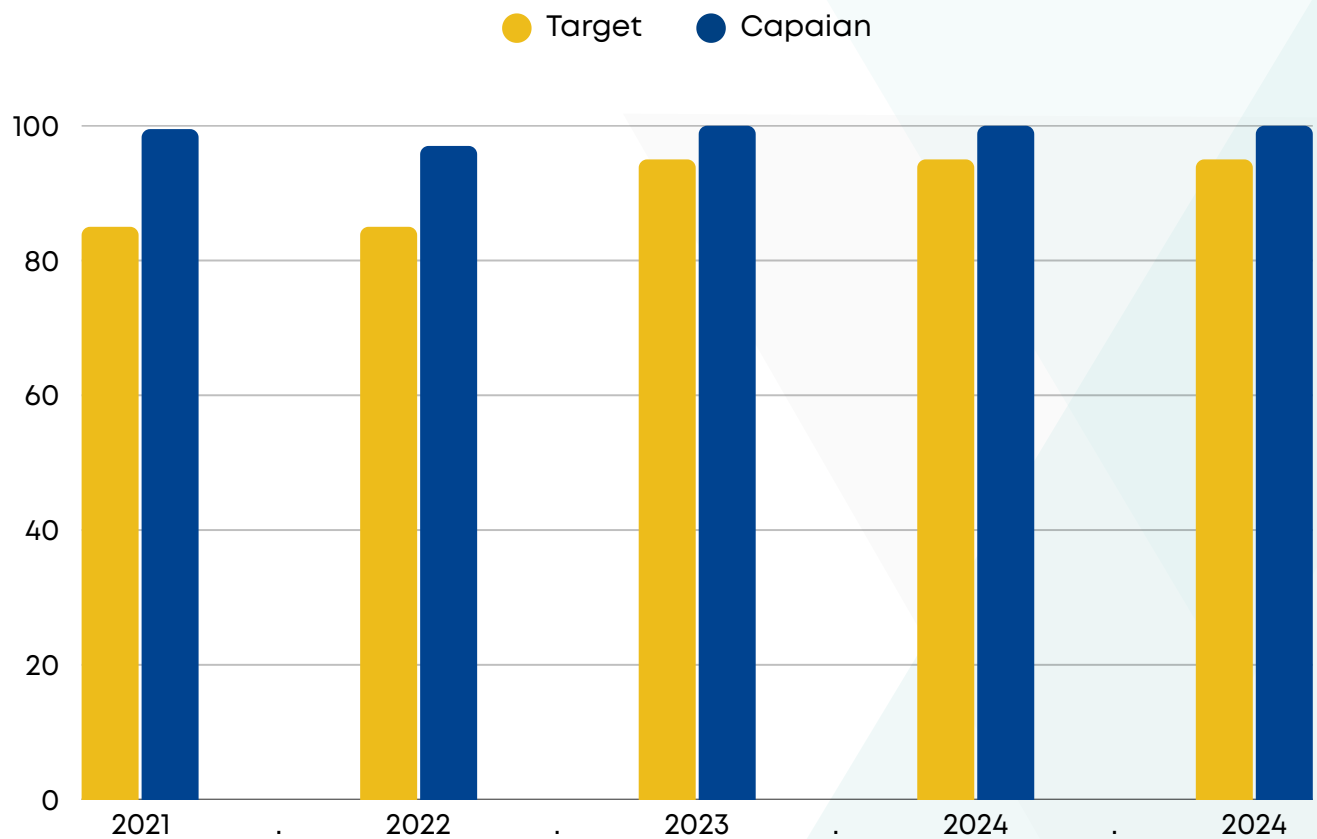
Indikator Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT mencapai 100%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 85%. Seluruh stasiun monitor frekuensi radio dan perangkat pendukung kegiatan monitoring di wilayah kerja Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang berada dalam kondisi operasional dan berfungsi dengan baik, yang didukung oleh pelaksanaan pemeliharaan, inspeksi, dan pengujian sistem secara rutin serta penanganan gangguan secara cepat dan tepat.

Berikut terlampir Tabel Realisasi PK Perangkat Pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio.

Tabel Realisasi PK Perangkat Pendukung SMFR

No	Tahun	Target (Rata-rata)	Realisasi
1.	2021	85%	99.5%
2.	2022	85%	97%
3.	2023	95%	100%
4.	2024	95%	100%
5.	2025	85%	100%

Grafik Realisasi dan Capaian PK Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur



Tabel Inspeksi Perangkat SMFR

Indikator Kegiatan	Kendala	Upaya Yang Telah Dilakukan	Tindak Lanjut
Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur di UPT	Jaringan Internet kadang tidak stabil saat dilakukan remote monitoring di stasiun monitor di kabupaten Bangka Barat	Penjadwalan perbaikan jaringan Internet di stasiun monitoring di kabupaten Bangka Barat	Perbaikan Jaringan internet atau ISP oleh vendor di stasiun monitor di kabupaten Bangka Barat pada bulan Februari 2025
	Tahanan grouding saat diukur di dapat angka 8,65 ohm di stasiun monitor di kabupaten Bangka Barat	Penjadwalan perbaikan sistem grounding oleh vendor di stasiun monitor di kabupaten Bangka Barat	Perbaikan sistem grouding oleh vendor dan didapat nilai 0,90 ohm di stasiun monitor di kabupaten Bangka Barat pada bulan februari 2025
	Menurunnya kualitas level baterai UPS akibat umur baterai yang sudah lama dan berdampak kepada tidak berfungsinya perangkat monitoring di stasiun monitor kabupaten Belitung	Penjadwalan penggantian baterai UPS perangkat monitoring di stasiun monitor kabupaten Belitung	Penggantian baterai UPS perangkat monitoring di stasiun monitor kabupaten Belitung pada bulan september 2025

III. Analisa

Capaian indikator Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT tahun 2025 mencapai 100%, melampaui target sebesar 85%, yang menunjukkan tingkat keandalan operasional stasiun monitor frekuensi radio yang sangat baik. Capaian ini mencerminkan efektivitas strategi pemeliharaan preventif, pengujian sistem secara berkala, serta respon cepat terhadap gangguan teknis, sejalan dengan praktik pengelolaan monitoring Spektrum Frekuensi Radio yang menekankan ketersediaan dan keberlangsungan sistem. Ke depan, upaya peningkatan kinerja difokuskan pada penguatan pemeliharaan berkelanjutan, modernisasi perangkat, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia guna memastikan stabilitas operasional dan adaptivitas terhadap perkembangan teknologi.

IV. Faktor Kendala, Upaya Percepatan dan Dampak

Kendala yang dihadapi dalam menjaga operasional dan fungsi monitoring stasiun monitor frekuensi radio meliputi gangguan teknis akibat usia perangkat, kondisi lingkungan, serta keterbatasan waktu pemeliharaan dan ketersediaan suku cadang.

Upaya yang dilakukan meliputi pelaksanaan pemeliharaan dan pengujian perangkat secara terjadwal dan preventif, peningkatan pemantauan kondisi perangkat untuk mendeteksi potensi gangguan sejak dini, serta penguatan koordinasi internal dan dengan pihak terkait dalam penanganan gangguan teknis. Selain itu, dilakukan optimalisasi penggunaan perangkat cadangan serta perencanaan kebutuhan suku cadang untuk mempercepat proses pemulihan operasional.

Dengan terjaganya keberlangsungan operasional dan fungsi monitoring stasiun monitor frekuensi radio, maka pengawasan Spektrum Frekuensi Radio dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

V. Tindak lanjut/Pemanfaatan Laporan Kinerja

Sebagai tindak lanjut, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio akan mempertahankan pelaksanaan pemeliharaan dan pengujian sistem secara berkala, meningkatkan pemantauan kondisi perangkat secara preventif, serta memperkuat kesiapsiagaan penanganan gangguan operasional. Selain itu, akan dilakukan perencanaan penggantian dan pembaruan perangkat secara bertahap, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta optimalisasi koordinasi dengan pihak terkait guna menjamin keberlangsungan operasional dan fungsi monitoring stasiun monitor frekuensi radio secara berkelanjutan.

VI. Rekomendasi Perbaikan

Rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan ke depan meliputi penguatan pemeliharaan preventif berbasis kondisi perangkat, percepatan modernisasi dan penggantian perangkat yang telah mendekati akhir masa pakai, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan teknis yang berkelanjutan. Selain itu, diperlukan penguatan sistem pencatatan dan monitoring kondisi perangkat secara terintegrasi serta peningkatan koordinasi dengan penyedia teknis dan pihak terkait untuk memastikan respons penanganan gangguan yang lebih cepat dan efektif.

VII. Efisiensi

Dalam pencapaian indikator Persentase (%) Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT, efisiensi sumber daya dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang tersedia. Pelaksanaan pemeliharaan preventif dan pengujian sistem secara terjadwal memungkinkan seluruh stasiun monitor frekuensi radio beroperasi secara optimal hingga mencapai capaian kinerja 100% tanpa penambahan sumber daya. Efisiensi tercermin dari menurunnya potensi gangguan operasional, berkurangnya kebutuhan penanganan darurat, serta terjaganya tingkat ketersediaan sistem dengan pemanfaatan sumber daya yang terukur dan terkendali.

VIII. Implementasi Budaya BerAKHLAK

- **Berorientasi Pelayanan**

Menjaga keandalan operasional stasiun monitor agar layanan pengawasan Spektrum Frekuensi Radio kepada masyarakat dan pemangku kepentingan berjalan optimal.

- **Akuntabel**

Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban kondisi operasional perangkat secara tertib dan transparan.

- **Kompeten**

Meningkatkan kemampuan teknis petugas melalui pemeliharaan, pengujian, dan pengembangan kapasitas secara berkelanjutan.

- **Harmonis**

Membangun kerja sama yang baik antarpetugas dan menciptakan lingkungan kerja yang saling mendukung.

- **Loyal**

Menunjukkan komitmen dalam menjaga keberlangsungan operasional sesuai tugas, fungsi, dan ketentuan yang berlaku.

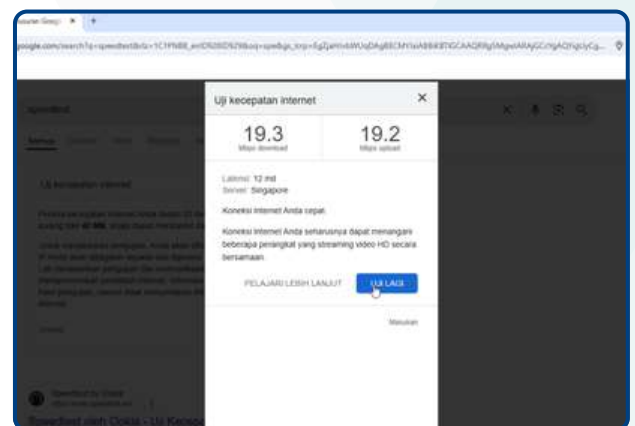
- **Adaptif**

Menyesuaikan metode kerja dan pemeliharaan dengan perkembangan teknologi dan dinamika kondisi lapangan.

- **Kolaboratif**

Memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait dalam penanganan gangguan dan peningkatan keandalan sistem.

IX. Dokumentasi



Hasil Pengukuran grounding dan Hasil Pengukuran kecepatan internet pada Stasiun Monitor Frekuensi Radio Bangka Barat



Kegiatan Pengecekan kondisi Perangkat di Stasiun Monitor Frekuensi Radio Tanjung Pandan



Mobil Unit Monitoring DF Toyota Hilux Rohde Schwarz DDF205

IK 6 Persentase (%) Penanganan Sanksi Denda Administratif

I. Latar Belakang

Penanganan sanksi denda administratif merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola Spektrum Frekuensi Radio dan perangkat telekomunikasi yang tertib dan patuh regulasi. Seiring meningkatnya penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan perangkat telekomunikasi di wilayah Bangka Belitung, potensi pelanggaran terhadap ketentuan perizinan dan sertifikasi juga semakin besar. Pengenaan dan penanganan sanksi administratif diperlukan untuk memastikan kepatuhan pengguna, menjaga ketertiban pemanfaatan spektrum, serta mengamankan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Penerima manfaat dari indikator ini meliputi pemerintah sebagai pengelola spektrum, penyelenggara telekomunikasi yang patuh aturan, serta masyarakat sebagai pengguna layanan telekomunikasi yang berkualitas.

Dengan adanya Penanganan Sanksi Denda Administratif dapat memberikan efek jera terhadap pelanggaran berupa :

- Penggunaan spektrum tanpa izin;
- Penyalahgunaan pita frekuensi;
- Penggunaan perangkat tidak bersertifikat;

Semua ini akan mendukung terciptanya ekosistem penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan perangkat telekomunikasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

II. Capaian

Indikator Penanganan Sanksi Denda Administratif ditetapkan dengan target capaian sesuai Perjanjian Kinerja UPT yaitu 80%. Berdasarkan data hingga Desember 2025, capaian kinerja menunjukkan hasil 100%, di mana seluruh *invoice* denda administratif yang jatuh tempo telah ditindaklanjuti dan diselesaikan.

Tabel Capaian Penanganan Sanksi Denda Administratif

Indikator	Tahun	Target	Realisasi
% Penanganan Sanksi Denda Administratif	2021	-	-
	2022	-	-
	2023	-	-
	2024	-	-
	2025	80%	100%

*Indikator Kinerja Penanganan Sanksi Denda Administratif baru dilaksanakan pada Tahun 2025.

Tabel Detail Penanganan Sanksi Denda Administratif Tahun 2025

Triwulan	Jumlah Invoice Denda Administratif	Jumlah Invoice Denda Administratif Terbayar	Target PK	Capaian PK
I	0	0	60%	-
II	0	0	65%	-
III	0	0	70%	-
IV	9	9	80%	100%

III. Analisa

Secara umum, capaian indeks kinerja Penanganan Sanksi Denda Administratif di wilayah Bangka Belitung menunjukkan kondisi yang sangat baik. Tidak terdapat tunggakan *invoice* denda administratif pada akhir tahun 2025, yang menandakan meningkatnya kepatuhan pengguna spektrum dan perangkat telekomunikasi. Capaian ini didukung oleh pendekatan persuasif, pembinaan berkelanjutan, serta koordinasi yang efektif antara Loka Monitor dan pemegang izin. Strategi penegakan yang konsisten dan transparan menjadi faktor utama keberhasilan pencapaian target indikator ini.

IV. Faktor Kendala, Upaya Percepatan dan Dampak

Indeks kinerja Penanganan Sanksi Denda Administratif pada Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang mengalami beberapa kendala yang dihadapi antara lain adalah :

Keterlambatan pemenuhan kewajiban oleh sebagian pengguna Spektrum Frekuensi Radio dan/atau Alat Perangkat Telekomunikasi.

- Beberapa pengguna mengalami masalah pada saat klarifikasi administratif terkait status perizinan. Proses administratif tersebut terkadang memerlukan waktu tambahan, terutama apabila terdapat perbedaan data atau perubahan status perizinan.
- Upaya percepatan pada indikator penanganan sanksi denda administratif dilakukan melalui peningkatan koordinasi, pemantauan berkala terhadap status *invoice*, serta pendekatan pembinaan kepada pihak terkait. Dampak dari pelaksanaan kegiatan ini adalah meningkatnya kepatuhan pengguna, tertibnya administrasi perizinan, serta optimalisasi PNBK.

V. Tindak lanjut/Pemanfaatan Laporan Kinerja

Indikator Kinerja Penanganan Sanksi Denda Administratif pada tahun sebelumnya belum menjadi salah satu penilaian dalam indikator kinerja. Namun kedepannya indikator ini dapat dimanfaatkan sebagai :

- Bahan evaluasi internal dan dasar pengambilan keputusan dalam pengawasan pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio.
- Menjadi rujukan dalam perencanaan kegiatan pengawasan dan penegakan kepatuhan pada tahun berjalan.
- Bahan evaluasi respons pengguna terhadap pengenaan sanksi, serta menyusun strategi pembinaan yang lebih tepat sasaran.

VI. Rekomendasi Perbaikan

Meskipun capaian kinerja telah mencapai target maksimal, perbaikan berkelanjutan tetap diperlukan untuk menjaga konsistensi kinerja dan mengantisipasi potensi pelanggaran di masa mendatang, seperti :

- Peningkatan pemantauan status pembayaran dan penguatan koordinasi dengan pemegang izin.
- Peningkatan integrasi data sanksi dengan sistem pengawasan dan perizinan.
- Optimalisasi pembinaan preventif kepada pengguna spektrum dan perangkat.
- Peningkatan kualitas analisis data sebagai dasar pengambilan kebijakan.

VII. Efisiensi

Pelaksanaan penanganan sanksi denda administratif menunjukkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya. Kegiatan dapat dilaksanakan melalui optimalisasi sumber daya manusia dan sistem yang tersedia. Selain itu dapat dilakukan :

- Efisiensi waktu melalui pemantauan dan tindak lanjut invoice secara berkala.
- Efisiensi SDM melalui pembagian tugas yang jelas dan terukur.
- Efisiensi operasional melalui pemanfaatan data dan sistem administrasi yang ada.

VIII. Implementasi Budaya BerAKHLAK

Pelaksanaan penanganan sanksi denda administratif telah menginternalisasi nilai-nilai BerAKHLAK

• Berorientasi Pelayanan

Penanganan sanksi denda administratif dilaksanakan dengan mengedepankan pelayanan kepada pengguna spektrum dan perangkat telekomunikasi melalui pemberian informasi yang jelas, pendampingan administratif, serta pembinaan agar kewajiban dapat dipenuhi tepat waktu.

• Akuntabel

Seluruh proses penanganan sanksi denda administratif dilaksanakan secara transparan dan terdokumentasi dengan baik, mulai dari penerbitan hingga penyelesaian invoice, sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

• Kompeten

Petugas melaksanakan penanganan sanksi berdasarkan pemahaman regulasi dan prosedur yang berlaku, serta terus meningkatkan kapasitas melalui pembelajaran dan pengalaman dalam pengelolaan administrasi kepatuhan.

• Harmonis

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menjaga hubungan kerja yang baik antara petugas dan pemegang izin, melalui komunikasi yang santun dan saling menghormati dalam proses penyelesaian kewajiban administratif.

- **Loyal**

Penanganan sanksi denda administratif dilaksanakan dengan mematuhi kebijakan dan regulasi pemerintah, serta mendukung upaya penegakan aturan dalam pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio dan perangkat telekomunikasi.

- **Adaptif**

Petugas menyesuaikan mekanisme penanganan dengan perkembangan sistem administrasi dan regulasi yang berlaku, termasuk pemanfaatan sistem informasi dalam pemantauan status pembayaran denda.

- **Kolaboratif**

Kegiatan penanganan sanksi dilaksanakan melalui koordinasi dan kerja sama yang baik dengan unit terkait dan pemangku kepentingan lainnya guna memastikan kelancaran dan ketepatan penyelesaian kewajiban administratif.

IK 7 Persentase (%) Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan

I. Latar Belakang

Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang sebagai bagian dari manajemen Spektrum Frekuensi Radio yang mempunyai fungsi pengawasan dan pengendalian penggunaan frekuensi radio, secara periodik melakukan pengukuran kualitas layanan infrastruktur digital di wilayah yang menjadi kewenangan fungsi dan tugas Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang. Ketersediaan layanan telekomunikasi yang andal menjadi prasyarat utama dalam mendukung aktivitas sosial, ekonomi, pendidikan, serta layanan publik berbasis digital. Oleh karena itu, pemerintah melalui Unit Pelaksana Teknis Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang memiliki peran strategis dalam melakukan pengukuran kualitas layanan sebagai bentuk pengawasan terhadap kepatuhan penyelenggara jaringan bergerak seluler.

Penerima manfaat dari indikator ini meliputi masyarakat pengguna layanan telekomunikasi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, penyelenggara jaringan seluler sebagai bahan evaluasi dan peningkatan layanan, serta pemerintah daerah dan pusat dalam penyusunan kebijakan berbasis data guna menjamin mutu layanan telekomunikasi yang berkeadilan dan merata.

II. Capaian

Tabel Realisasi Pengukuran Kualitas Layanan Kabupaten/Kota

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Target	-	-	-	-	100 %
Realisasi	-	-	-	-	100%
(%) Capaian	-	-	-	-	105,26%

Pada Tahun 2025, target PK ditetapkan sebesar 100%, yaitu tersedianya data hasil pengukuran kualitas layanan pada 80% kabupaten/kota di wilayah kerja, dalam hal ini berarti minimal 6 dari 7 Kab/kota di provinsi Bangka Belitung. Berdasarkan hasil pelaksanaan, pengukuran Kualitas Layanan berhasil dilakukan pada seluruh 7 kabupaten/kota, sehingga capaian kinerja mencapai 100% dari target.

Capaian kinerja menunjukkan progres berkelanjutan sepanjang tahun, dengan peningkatan signifikan pada semester II hingga seluruh wilayah kabupaten/kota berhasil diukur pada bulan November, dan capaian tetap terjaga hingga akhir Desember 2025. Dari hasil pengukuran kualitas layanan, kecepatan internet antar penyelenggara jaringan bergerak seluler berkisar antara 40 Mbps sampai dengan 115 Mbps. Data kecepatan tersebut dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi, pembinaan, serta peningkatan mutu layanan telekomunikasi bagi masyarakat.

III. Analisa

Secara umum, capaian PK Kualitas Layanan Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan sejalan dengan praktik pengawasan kualitas layanan telekomunikasi di tingkat regional maupun internasional. Pengukuran Kualitas Layanan yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan mencerminkan pendekatan *data-driven* monitoring sebagaimana diterapkan oleh regulator telekomunikasi di berbagai negara.

Rata-rata hasil *speed test* di seluruh wilayah Bangka Belitung menunjukkan performa layanan data yang kompetitif, dengan variasi kecepatan antar penyelenggara jaringan dan wilayah yang dapat dijadikan dasar evaluasi lanjutan. Strategi keberhasilan pencapaian target didukung oleh perencanaan pengukuran yang terstruktur, pemanfaatan aplikasi SIGMON dan RS Monitor, serta kombinasi kegiatan Kualitas Layanan reguler dan khusus (event nasional/NARU). Pendekatan ini memastikan data Kualitas Layanan yang diperoleh representatif, akurat, dan relevan untuk pengambilan kebijakan.

IV. Faktor Kendala, Upaya Percepatan dan Dampak

Pelaksanaan pengukuran kualitas layanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghadapi sejumlah kendala, baik dari aspek geografis maupun teknis. Dari sisi wilayah, karakteristik daerah kepulauan dan keterbatasan akses antar lokasi pengukuran memerlukan pengaturan waktu dan perencanaan yang cermat. Selain itu, pada aspek teknis ditemukan kendala berupa perangkat *probe* yang beberapa kali mengalami gangguan fungsi akibat *over heat* saat digunakan dalam durasi pengukuran yang relatif panjang, serta kondisi baterai *probe* yang sudah tidak optimal sehingga berpengaruh terhadap stabilitas dan kontinuitas proses pengukuran.

Untuk mengatasi kendala tersebut, dilakukan upaya percepatan dan mitigasi melalui pengaturan ulang jadwal pengukuran, pembatasan durasi penggunaan *probe* secara bertahap, optimalisasi pendinginan perangkat, serta penyediaan cadangan sumber daya selama pelaksanaan kegiatan. Di samping itu, dilakukan penyesuaian metode pengukuran dan pemantauan kondisi perangkat secara berkala agar kegiatan tetap berjalan sesuai rencana. Dampak dari upaya tersebut adalah tetap tercapainya target ketersediaan data hasil pengukuran kualitas layanan secara lengkap dan akurat, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi kinerja penyelenggara jaringan seluler serta peningkatan kualitas layanan telekomunikasi bagi masyarakat di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

V. Tindak lanjut/Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja PK Kualitas Layanan dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pengukuran kualitas layanan, khususnya dalam mengidentifikasi kendala teknis pada penggunaan perangkat *probe*, seperti terjadinya gangguan fungsi akibat *over heat* dan keterbatasan daya baterai. Informasi tersebut digunakan sebagai dasar perbaikan dalam perencanaan kegiatan pengukuran berikutnya, termasuk penyesuaian durasi penggunaan perangkat, pengaturan jadwal pengukuran yang lebih efisien, serta peningkatan pengendalian kondisi perangkat selama kegiatan berlangsung. Selain itu, hasil pengukuran Kualitas Layanan tetap dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi kualitas layanan penyelenggara jaringan seluler dan bahan pembinaan untuk mendorong peningkatan mutu layanan kepada masyarakat.

VI. Rekomendasi Perbaikan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kendala teknis yang dihadapi, direkomendasikan adanya peningkatan keandalan perangkat pengukuran melalui pemeliharaan dan peremajaan *probe*, khususnya pada komponen baterai yang sudah tidak optimal. Selain itu, diperlukan penguatan prosedur operasional standar terkait manajemen penggunaan perangkat, termasuk pengaturan waktu kerja, mekanisme pendinginan, serta penyediaan perangkat cadangan untuk mengantisipasi gangguan fungsi akibat *over heat*. Peningkatan kompetensi teknis petugas dalam penanganan dan mitigasi gangguan perangkat juga menjadi bagian penting untuk menjaga kesinambungan dan kualitas hasil pengukuran Kualitas Layanan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

VII. Efisiensi

Upaya penyesuaian pelaksanaan pengukuran Kualitas Layanan dengan mempertimbangkan keterbatasan perangkat *probe* telah mendorong efisiensi pemanfaatan sumber daya, khususnya dalam pengaturan waktu, tenaga, dan penggunaan perangkat. Pengelolaan jadwal pengukuran yang lebih terencana serta pembatasan durasi penggunaan *probe* secara bergantian mampu meminimalkan risiko kerusakan perangkat dan mengurangi potensi pengulangan kegiatan. Efisiensi ini berdampak pada optimalisasi penggunaan sumber daya manusia dan anggaran, sekaligus memastikan target kinerja tetap tercapai tanpa penambahan sumber daya secara signifikan, meskipun terdapat kendala teknis pada perangkat pengukuran.

VIII. Implementasi Budaya BerAKHLAK

• Berorientasi Pelayanan

Pelaksanaan pengukuran Kualitas Layanan dilakukan untuk menyediakan data kualitas layanan yang akurat dan tepat waktu sebagai dasar peningkatan mutu layanan telekomunikasi bagi masyarakat.

- **Akuntabel**

Kegiatan pengukuran Kualitas Layanan dilaksanakan sesuai standar dan prosedur yang berlaku serta didukung dokumentasi dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

- **Kompeten**

Petugas melaksanakan pengukuran dengan penguasaan teknis yang memadai serta mampu menangani kendala perangkat selama kegiatan berlangsung.

- **Harmonis**

Pelaksanaan kegiatan didukung kerja sama tim yang baik dan komunikasi yang efektif antaranggota.

- **Loyal**

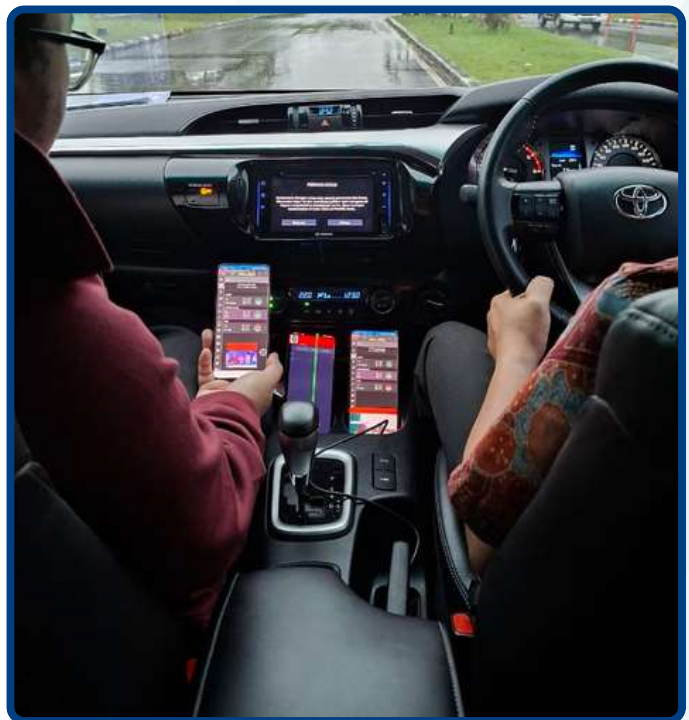
Petugas melaksanakan pengukuran Kualitas Layanan secara konsisten sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas pemerintah di bidang telekomunikasi.

- **Adaptif**

Pelaksanaan pengukuran menyesuaikan kondisi lapangan dan keterbatasan perangkat agar kegiatan tetap berjalan optimal.

- **Kolaboratif**

Koordinasi internal dan sinergi dengan pihak terkait mendukung kelancaran pelaksanaan pengukuran Kualitas Layanan.



Gambar: Kegiatan Pelaksanaan Pengukuran Kualitas Layanan Tahun 2025

IK 8 Persentase (%) Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)

I. Latar Belakang

Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR dan MOTS-IKRAN) merupakan salah satu kegiatan strategis Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) serta dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong tertib penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di wilayah kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sertifikasi operator radio menjadi instrumen penting dalam menjamin kompetensi dan kepatuhan operator radio terhadap ketentuan teknis dan regulasi penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. Melalui penyelenggaraan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) dan Maritime On The Spot-Izin Komunikasi Radio Perikanan (MOTS-IKRAN), Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang berkontribusi langsung terhadap pencapaian target kinerja, khususnya pada indikator peningkatan jumlah operator radio tersertifikasi dan penurunan potensi gangguan frekuensi radio.

Pelaksanaan kegiatan sertifikasi ini juga merupakan wujud akuntabilitas kinerja organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio. Hasil pelaksanaan kegiatan menjadi bagian dari pengukuran kinerja dan bahan pelaporan dalam LKIP, sebagai dasar evaluasi efektivitas program serta peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya.

II. Capaian

Pada tahun 2025, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang berhasil melaksanakan layanan sertifikasi dan perizinan operator radio secara optimal sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Capaian kinerja ini tercermin dari terselenggaranya UNAR berbasis Computer Assisted Test (CAT) sebanyak 6 (enam) kali dengan total peserta sebanyak 76 orang. Pelaksanaan UNAR berjalan dengan tertib, transparan, dan akuntabel, serta berkontribusi dalam meningkatkan jumlah operator radio amatir yang tersertifikasi dan taat regulasi di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.

Selain itu, layanan Bimbingan Teknis IKRAN berhasil dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah 50 peserta. Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin kompetensi operator radio maritim dalam pengoperasian perangkat komunikasi radio. Pelaksanaan sertifikasi Bimbingan Teknis IKRAN berkontribusi dalam meningkatkan keselamatan komunikasi radio maritim serta mendorong kepatuhan terhadap penggunaan Spektrum Frekuensi Radio secara tertib dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di bidang perizinan Izin Stasiun Radio (ISR) Maritim, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang melaksanakan layanan MOTS melalui penerbitan 41 ISR Maritim. Layanan ini dilaksanakan secara langsung di lapangan untuk mempercepat proses perizinan radio maritim. Pelaksanaan MOTS meningkatkan akses layanan perizinan bagi pengguna radio maritim serta mendorong kepatuhan terhadap regulasi.

Tabel Realisasi Pencapaian Penyelenggaraan UNAR

No	Tahun	Perhitungan PK	Target	Realisasi
1	2021	Jumlah Peserta	100 Peserta (100%)	118 Peserta (100%)
2	2022	Jumlah Peserta	100 Peserta (100%)	128 Peserta (100%)
3	2023	Jumlah Peserta	60 Peserta (100%)	101 Peserta (100%)
4	2024	Jumlah Peserta	60 Peserta (100%)	90 Peserta (100%)
5	2025	Jumlah Kegiatan	6 Kegiatan (100%)	6 Kegiatan (100%)

Tabel realisasi Pencapaian Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (MOTS-IKRAN)

No	Tahun	Perhitungan PK	Target	Realisasi
1	2021	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan (100%)	1 Kegiatan (100%)
2	2022	Jumlah Peserta	20 Peserta (100%)	107 Peserta (100%)
3	2023	Jumlah Peserta	54 Peserta (100%)	119 Peserta (100%)
4	2024	Jumlah Peserta	54 Peserta (100%)	131 Peserta (100%)
5	2025	Jumlah Kegiatan	1 Kegiatan (100%)	1 Kegiatan (100%)

Tabel Realisasi Pencapaian ISR Maritim

No	Tahun	Perhitungan PK	Target	Realisasi
1	2021	Penerbitan ISR Maritim	10 ISR Maritim (100%)	22 ISR Maritim (100%)
2	2022	Penerbitan ISR Maritim	10 ISR Maritim (100%)	34 ISR Maritim (100%)
3	2023	Penerbitan ISR Maritim	15 ISR Maritim (100%)	30 ISR Maritim (100%)
4	2024	Penerbitan ISR Maritim	15 ISR Maritim (100%)	29 ISR Maritim (100%)
5	2025	Penerbitan ISR Maritim	15 ISR Maritim (100%)	41 ISR Maritim (100%)

Tabel Pelaksanaan UNAR Tahun 2025

No	Keterangan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Peserta		
				Siaga	Penggalang	Penegak
1	UNAR CAT Reguler Ke-I	24 Feb 2025	Lokmon Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang	6 (lulus)	-	-
2	UNAR CAT Reguler Ke-II	26 Mei 2025	Lokmon Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang	3 (lulus)	6 (lulus)	-
3	UNAR CAT Reguler Ke-III	4 Agu 2025	Lokmon Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang	8 (lulus)	1 (lulus)	-
4	UNAR CAT Reguler Ke-IV	24 Nov 2025	Lokmon Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang	7 6 (lulus) 1 (tdk lulus)	-	-
5	UNAR CAT Reguler Ke-V	22 Des 2025	Lokmon Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang	11 10 (lulus) 1 (tdk lulus)	-	1 (lulus)
6	UNAR CAT Non-Reguler	26 Okt 2025	Sunjaya Hotel Bangka	31 30 (lulus) 1 (tdk lulus)	2 (lulus)	-

Tabel Pencapaian ISR Maritim Tahun 2025

Bulan	PPN Sungailiat	PPN Tanjung Pandan
Januari	1	0
Februari	1	1
Maret	2	1
April	1	1
Mei	4	1

Juni	3	1
Juli	6	3
Agustus	2	2
September	4	1
Oktober	1	1
November	1	1
Desember	1	1
Total	27	14

III. Analisa

Capaian indikator kinerja layanan sertifikasi dan perizinan operator radio tahun 2025 menunjukkan hasil sesuai target. Pelaksanaan UNAR berbasis CAT sebanyak 6 kali dengan 76 peserta, bimbingan teknis IKRAN kepada 50 peserta serta penerbitan 41 ISR Maritim melalui MOTS mencerminkan peningkatan akses dan kepatuhan masyarakat terhadap penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.

Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh perencanaan kegiatan yang selaras dengan Perjanjian Kinerja, pemanfaatan sistem digital, serta penerapan strategi jemput layanan. Pendekatan ini efektif meningkatkan jangkauan layanan dan partisipasi masyarakat, khususnya di sektor pesisir dan maritim, serta mendukung tertib penggunaan Spektrum Frekuensi Radio secara berkelanjutan.

IV. Faktor Kendala, Upaya Percepatan dan Dampak

Pelaksanaan layanan sertifikasi dan perizinan operator radio masih menghadapi keterbatasan jangkauan layanan ke wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, keterbatasan waktu dan mobilitas peserta, serta tingkat pemahaman regulasi penggunaan Spektrum Frekuensi Radio yang belum merata, khususnya bagi nelayan dan pengguna radio maritim.

Upaya percepatan dilakukan melalui penerapan strategi jemput layanan seperti MOTS, optimalisasi penggunaan sistem digital pada proses sertifikasi dan perizinan, serta penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan daerah untuk meningkatkan sosialisasi dan partisipasi masyarakat.

Pelaksanaan upaya percepatan berdampak pada meningkatnya akses layanan sertifikasi dan perizinan, percepatan proses penerbitan izin, serta peningkatan kepatuhan pengguna radio terhadap ketentuan yang berlaku, sehingga mendukung tertib penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di wilayah Kepulauan Bangka Belitung.

V. Tindak lanjut/Pemanfaatan Laporan Kinerja

Hasil Laporan Kinerja dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian layanan sertifikasi serta perizinan operator radio pada periode berikutnya. Capaian kinerja menjadi dasar penyempurnaan strategi pelayanan, perluasan jangkauan layanan ke wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penguatan pemanfaatan sistem digital. Selain itu, laporan kinerja digunakan sebagai dasar peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan dan penetapan target kinerja yang lebih efektif dan terukur.

VI. Rekomendasi Perbaikan

Untuk meningkatkan kinerja layanan sertifikasi dan perizinan operator radio ke depan, diperlukan penguatan strategi layanan jemput bola, khususnya melalui pelaksanaan MOTS dan fasilitasi IKRAN, agar jangkauan layanan dapat menjangkau wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara lebih merata. Selain itu, pemanfaatan sistem digital perlu terus dioptimalkan pada seluruh tahapan layanan guna mempercepat proses, meningkatkan akurasi data, dan menjaga transparansi. Upaya sosialisasi dan edukasi terkait regulasi penggunaan Spektrum Frekuensi Radio juga perlu ditingkatkan, terutama kepada nelayan dan pengguna radio maritim, serta didukung dengan penguatan koordinasi dan sinergi bersama pemangku kepentingan daerah agar pelaksanaan layanan lebih efektif, terukur, dan berkelanjutan.

VII. Efisiensi

Pelaksanaan layanan sertifikasi dan perizinan operator radio pada tahun 2025 dilaksanakan secara efisien melalui optimalisasi perencanaan kegiatan, pemanfaatan sistem digital, dan penerapan strategi layanan terpadu. Penggunaan sistem berbasis aplikasi pada UNAR, IKRAN, dan MOTS mampu mengurangi waktu proses layanan, meminimalkan penggunaan sumber daya, serta menekan biaya operasional tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Efisiensi pelaksanaan kegiatan juga didukung oleh integrasi jadwal layanan dan koordinasi dengan pemangku kepentingan daerah, sehingga capaian kinerja dapat dicapai secara optimal dengan penggunaan anggaran yang lebih efektif dan akuntabel.

VIII. Implementasi Budaya BerAKHLAK

• Berorientasi Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan dengan mengutamakan kemudahan akses, kecepatan, dan kejelasan informasi bagi masyarakat.

• Akuntabel

Setiap kegiatan dilaksanakan sesuai prosedur dan dilaporkan secara tertib serta dapat dipertanggungjawabkan.

• Kompeten

Meningkatkan kemampuan teknis dan pemahaman regulasi guna memastikan layanan berjalan tepat dan sesuai standar.

- **Harmonis**

Menjaga sikap ramah, santun, dan saling menghormati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.

- **Loyal**

Melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan organisasi secara konsisten.

- **Adaptif**

Menyesuaikan metode pelayanan dengan perkembangan teknologi dan kondisi lapangan melalui pemanfaatan sistem digital dan layanan jemput bola.

- **Kolaboratif**

Membangun kerja sama dengan instansi terkait dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas serta jangkauan layanan.

IX. Dokumentasi



Gambar: Kegiatan Pelaksanaan UNAR



Gambar: Kegiatan Pelaksanaan Bimtek IKRAN



Kegiatan Pelaksanaan MOTS

IK 9 Persentase (%) Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio

I. Latar Belakang

Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP (Biaya Hak Pengguna) Frekuensi Radio merupakan salah satu kegiatan strategis yang dilaksanakan dalam rangka mendukung tertib administrasi, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara, serta optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio. Piutang BHP Frekuensi Radio yang belum diselesaikan oleh wajib bayar berpotensi menimbulkan akumulasi piutang macet apabila tidak ditangani secara tepat waktu dan terkoordinasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah penanganan piutang yang sistematis, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan penanganan piutang dilaksanakan melalui serangkaian proses yang meliputi identifikasi dan verifikasi data piutang, penyampaian informasi dan penagihan kepada wajib bayar, serta tindak lanjut administratif berupa koordinasi pelimpahan piutang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk komitmen unit kerja dalam menjaga akuntabilitas kinerja dan mendukung efektivitas penyelesaian piutang negara, sekaligus memperkuat sinergi antarinstansi dalam pengelolaan aset dan piutang negara.

Pada Tahun 2025, pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan target capaian sebesar 100%. Target tersebut mencakup penanganan seluruh piutang BHP Frekuensi Radio melalui indikator 100% piutang dihubungi serta pelaksanaan koordinasi pelimpahan piutang ke KPKNL sebanyak 4 (empat) kali kegiatan. Realisasi kinerja menunjukkan bahwa seluruh target telah tercapai secara optimal, dengan penyampaian piutang sebanyak 193 Invoice atau 100% dari total piutang yang ditangani, serta koordinasi pelimpahan piutang ke KPKNL yang dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali kegiatan atau 100%. Dengan demikian, capaian Perjanjian Kinerja pada kegiatan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio Tahun 2025 tercapai sepenuhnya.

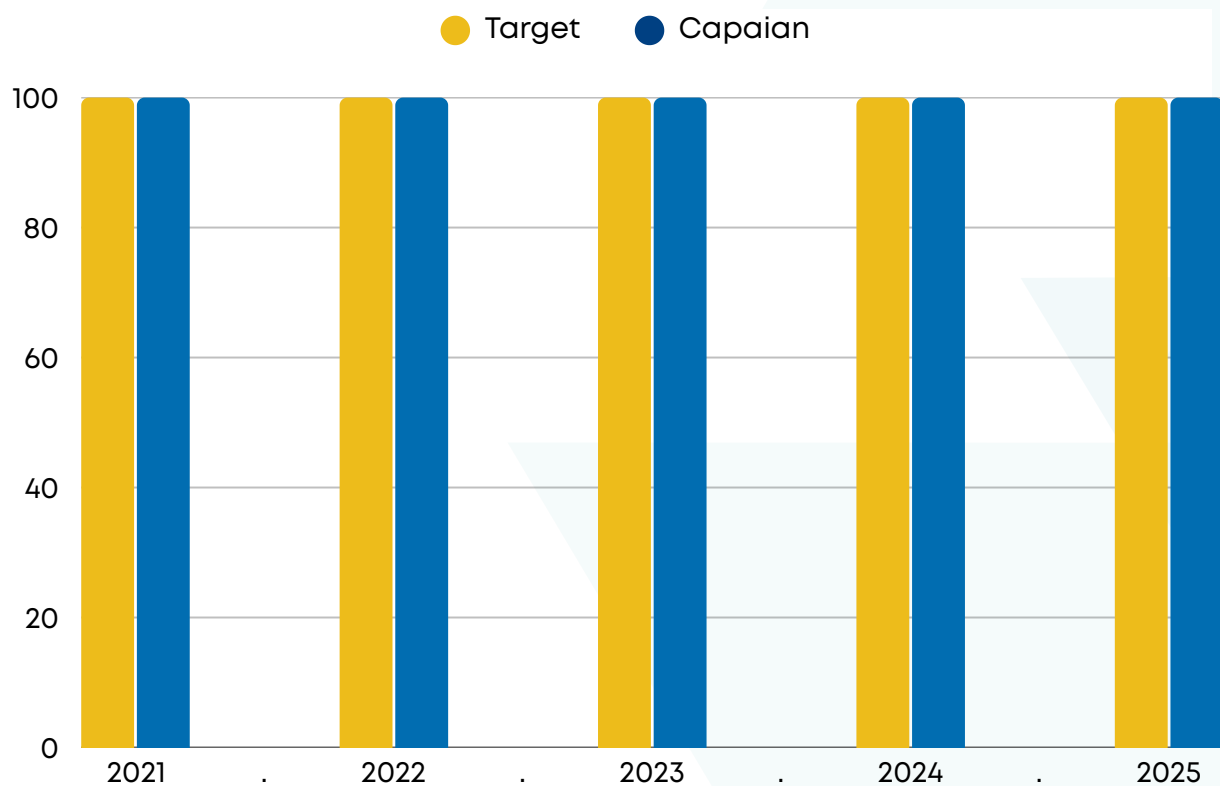
II. Capaian

Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio pada Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2025 berhasil mencapai target Perjanjian Kinerja sebesar 100%. Seluruh piutang BHP Frekuensi Radio sebanyak 193 *Invoice* yang berasal dari pengguna Spektrum Frekuensi Radio di wilayah Bangka Belitung telah dilakukan penyampaian dan penghubungan kepada wajib bayar (100%), serta koordinasi pelimpahan piutang kepada KPKNL telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali kegiatan (100%). Capaian ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang dalam pengelolaan piutang negara secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

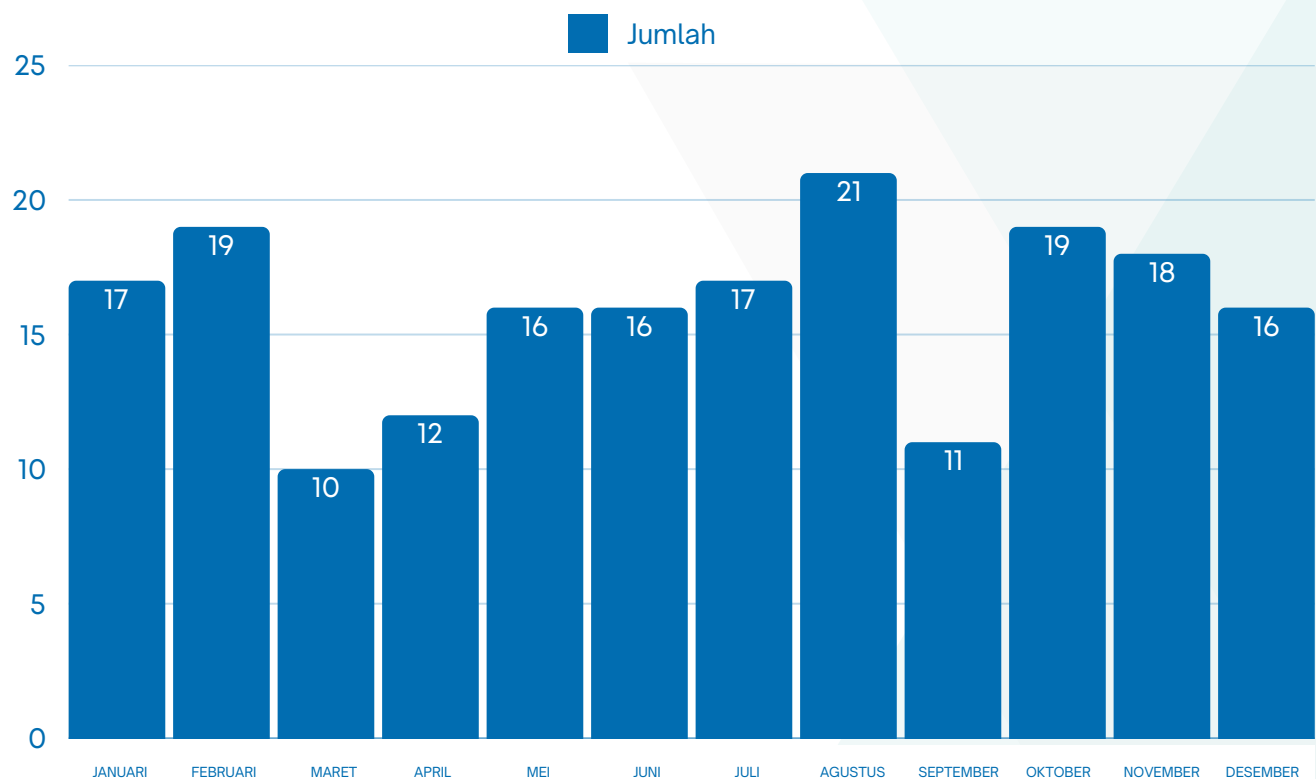
Tabel Pelaksanaan Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan Piutang ke KPKNL Tahun 2025

No.	Tahun	Target	Realisasi
1.	2021	Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio 100% (4 kali koordinasi dan jumlah penyampaian tagihan) (Target 100%)	• Capaian pelimpahan ke KPKNL dan 4 kali koordinasi (100%). • Capaian penyampaian tagihan dan piutang sebanyak 237 <i>Invoice</i> (100%). (Realisasi 100%)
2.	2022	Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio 100% (4 kali koordinasi dan jumlah penyampaian tagihan) (Target 100%)	• Capaian pelimpahan ke KPKNL dan 4 kali koordinasi (100%). • Capaian penyampaian tagihan dan piutang sebanyak 228 <i>Invoice</i> (100%). (Realisasi 100%)
3.	2023	Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio 100% (4 kali koordinasi dan jumlah penyampaian tagihan) (Target 100%)	• Capaian pelimpahan ke KPKNL dan 4 kali koordinasi (100%). • Capaian penyampaian tagihan dan piutang sebanyak 236 <i>Invoice</i> (100%). (Realisasi 100%)
4.	2024	Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio 100% (4 kali koordinasi dan jumlah penyampaian tagihan) (Target 100%)	• Capaian pelimpahan ke KPKNL dan 4 kali koordinasi (100%). • Capaian penyampaian tagihan dan piutang sebanyak 227 <i>Invoice</i> (100%). (Realisasi 100%)
5.	2025	Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio 100% (4 kali koordinasi dan jumlah penyampaian tagihan) (Target 100%)	• Capaian pelimpahan ke KPKNL dan 4 kali koordinasi (100%). • Capaian penyampaian tagihan dan piutang sebanyak 193 <i>Invoice</i> (100%). (Realisasi 100%)

Grafik Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan Piutang KPKNL



Grafik Jumlah SPP BHP Frekuensi Per Bulan Tahun 2025



III. Analisa

Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang menunjukkan capaian kinerja yang optimal dalam penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio dengan realisasi 100% pada Tahun 2025. Seluruh piutang sebanyak 193 *Invoice* telah ditangani dan dihubungi, serta koordinasi pelimpahan piutang ke KPKNL dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali kegiatan. Capaian ini didukung oleh pemutakhiran data piutang, komunikasi aktif kepada wajib bayar, serta koordinasi yang efektif dengan KPKNL, sehingga penanganan piutang dapat dilaksanakan secara tertib dan sesuai ketentuan.

IV. Faktor Kendala, Upaya Percepatan dan Dampak

Seluruh proses penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio pada Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang telah dilaksanakan secara daring (online) sehingga tidak terdapat kendala teknis yang signifikan. Namun demikian, kendala utama masih ditemui pada lambatnya respons sebagian wajib bayar dalam menindaklanjuti penyampaian informasi dan kewajiban pembayaran, yang berdampak pada perlunya waktu dan upaya tambahan dalam proses penanganan piutang.

Untuk mengatasi kendala tersebut, dilakukan peningkatan intensitas komunikasi kepada wajib bayar melalui pengingat secara berkala menggunakan media elektronik, pemantauan tindak lanjut pembayaran secara rutin, serta penguatan koordinasi internal dan dengan pihak terkait guna memastikan proses penanganan dan pelimpahan piutang tetap berjalan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Upaya percepatan yang dilaksanakan berdampak pada terselesaikannya seluruh proses penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio secara menyeluruh dengan capaian 100%, terjaganya ketertiban administrasi, serta meningkatnya efektivitas pengelolaan piutang negara dan kontribusi terhadap optimalisasi PNBPN.

V. Tindak lanjut/Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan piutang di Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang. Hasil capaian kinerja digunakan untuk memperkuat pelaksanaan penanganan piutang secara daring, meningkatkan strategi komunikasi kepada wajib bayar yang memiliki tingkat respons rendah, serta sebagai dasar perencanaan dan penyempurnaan langkah penanganan dan koordinasi pelimpahan piutang ke KPKNL pada periode berikutnya agar pelaksanaan kinerja tetap optimal dan berkelanjutan.

VI. Rekomendasi Perbaikan

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio, direkomendasikan peningkatan efektivitas komunikasi kepada wajib bayar melalui penguatan mekanisme pengingat otomatis pada sistem layanan daring serta pemutakhiran data kontak secara berkala. Selain itu, perlu dilakukan penguatan koordinasi dan penjadwalan pelimpahan piutang ke KPKNL secara lebih terstruktur, serta pemanfaatan hasil laporan kinerja sebagai dasar penyempurnaan prosedur operasional agar penanganan piutang dapat dilaksanakan lebih responsif, efisien, dan berkelanjutan.

VII. Efisiensi

Efisiensi pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio di Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang tetap tercapai melalui optimalisasi proses administrasi dan penanganan piutang secara daring (online), sementara koordinasi pelimpahan piutang ke KPKNL dilaksanakan secara tatap muka sesuai kebutuhan. Kombinasi kedua mekanisme tersebut memungkinkan pengelolaan piutang dilaksanakan secara efektif dengan tetap menjaga ketepatan proses dan kualitas koordinasi, sekaligus mengendalikan penggunaan waktu dan sumber daya agar target kinerja dapat dicapai secara optimal.

Upaya percepatan yang dilaksanakan berdampak pada terselesaikannya seluruh proses penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio secara menyeluruh dengan capaian 100%, terjaganya ketertiban administrasi, serta meningkatnya efektivitas pengelolaan piutang negara dan kontribusi terhadap optimalisasi PNBP.

VIII. Implementasi Budaya BerAKHLAK

- **Berorientasi Pelayanan**

Pelaksanaan penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio dilakukan dengan mengedepankan kualitas layanan kepada wajib bayar melalui penyampaian informasi yang jelas, responsif, dan dapat diakses secara daring. Upaya ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, kepastian, serta meningkatkan kepatuhan wajib bayar dalam memenuhi kewajibannya.

- **Akuntabel**

Setiap tahapan penanganan piutang dilaksanakan sesuai ketentuan dan terdokumentasi secara tertib, mulai dari pengelolaan data piutang hingga koordinasi pelimpahan ke KPKNL. Capaian kinerja dilaporkan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan piutang negara.

- **Kompeten**

Petugas pelaksana secara berkelanjutan meningkatkan pemahaman terhadap regulasi dan prosedur penanganan piutang BHP Frekuensi Radio, baik melalui pembelajaran mandiri maupun koordinasi dengan unit terkait. Kompetensi ini mendukung kelancaran proses penanganan piutang secara tepat dan sesuai ketentuan.

- **Harmonis**

Dalam pelaksanaan kegiatan, terjalin kerja sama yang baik antarpegawai serta hubungan kerja yang profesional dengan pihak eksternal, termasuk KPKNL. Komunikasi yang saling menghargai dan kolaboratif mendukung kelancaran koordinasi dan pencapaian target kinerja.

- **Loyal**

Pelaksanaan tugas penanganan piutang dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta komitmen dalam mendukung kebijakan organisasi. Seluruh kegiatan diarahkan untuk menjaga kepentingan negara dan mendukung optimalisasi PNBP.

- **Adaptif**

Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang menerapkan penyesuaian metode kerja dengan memanfaatkan layanan daring dalam penanganan piutang, serta tetap melakukan koordinasi tatap muka dengan KPKNL sesuai kebutuhan. Fleksibilitas ini memungkinkan kegiatan tetap berjalan efektif di tengah dinamika kondisi dan karakteristik wilayah.

- **Kolaboratif**

Keberhasilan penanganan piutang didukung oleh sinergi antara internal Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang dengan unit kerja terkait dan KPKNL. Kolaborasi yang berkesinambungan memperkuat efektivitas proses pelimpahan piutang dan pencapaian target kinerja secara optimal.

IX. Dokumentasi



Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi dengan KPKNL

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pelayanan Publik oleh Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang pada tahun 2025 menunjukkan capaian kinerja yang optimal dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan sebanyak satu kali dengan sasaran peserta dari unsur pemerintah dan pelaku usaha. Kegiatan ini diikuti oleh total 68 peserta, terdiri dari 65 peserta yang hadir secara *offline* dan 3 peserta yang hadir secara *online*. Jumlah peserta yang hadir telah melampaui ketentuan minimal yang ditetapkan, yaitu 30 peserta dalam satu kali pelaksanaan sosialisasi, sehingga target kegiatan dapat tercapai sepenuhnya dengan tingkat realisasi sebesar 100%. Dengan tercapainya target pelaksanaan sosialisasi tersebut, kegiatan Sosialisasi Pelayanan Publik dinilai berjalan dengan baik dan efektif dalam mendukung peningkatan pemahaman pemangku kepentingan terhadap ketentuan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

III. Analisa

Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Publik dengan tema “Pencegahan Pengenaan Sanksi Denda Administratif terhadap Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio” menegaskan pentingnya pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan Spektrum Frekuensi Radio serta perangkat telekomunikasi guna memastikan seluruh aktivitas pemanfaatannya berjalan sesuai dengan izin, ketentuan teknis, dan peruntukan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Melalui kegiatan ini, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang berupaya meningkatkan pemahaman dan kepatuhan para pemangku kepentingan terhadap regulasi yang berlaku, khususnya terkait perizinan berusaha berbasis risiko, tata kelola pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio, serta mekanisme pengawasan dan pengendalian (wasdal) penggunaan frekuensi radio. Selain itu, sosialisasi ini juga memberikan penjelasan mengenai prosedur dan dasar hukum pengenaan sanksi berupa denda administratif di bidang telekomunikasi, sehingga para *stakeholder*, termasuk operator seluler, penyelenggara televisi, dan radio FM, dapat memahami kewajiban serta tanggung jawabnya secara komprehensif. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan mampu mendorong terciptanya pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio yang tertib, legal, dan berkelanjutan, serta meminimalkan potensi pelanggaran yang dapat merugikan negara maupun masyarakat.

Sepanjang Tahun 2025, telah dilaksanakan 1 kegiatan sosialisasi dengan total 68 peserta, yang terdiri dari 65 peserta yang hadir secara *offline* dan 3 peserta yang hadir secara *online*, sehingga seluruh komponen indikator terpenuhi dan capaian kinerja mencapai 100% sesuai target. Indikator ini merealisasikan anggaran sebesar **Rp83.276.000 (98.60%)** dari pagu anggaran non-blokir sebesar **Rp84.459.000**, ini menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang tepat serta dukungan anggaran yang optimal. Realisasi tersebut sejalan dengan tercapainya target kinerja secara maksimal dan mencerminkan efektivitas pemanfaatan anggaran dalam mendukung peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Pencegahan Pengenaan Sanksi Denda Administratif terhadap Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

IV. Faktor Kendala, Upaya Percepatan dan Dampak

Dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pelayanan Publik dengan tema “Pencegahan Pengenaan Sanksi Denda Administratif terhadap Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio” di Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang, terdapat beberapa faktor kendala yang dihadapi, antara lain keterbatasan waktu pelaksanaan, perbedaan tingkat pemahaman peserta terhadap regulasi penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, serta keterbatasan kehadiran peserta secara *offline* akibat kendala jarak dan aktivitas operasional masing-masing *stakeholder*. Untuk mengatasi kendala tersebut, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang melakukan berbagai upaya percepatan, seperti memanfaatkan metode sosialisasi secara online dan offline (hybrid), penyampaian materi yang terstruktur dan mudah dipahami, serta peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan terkait. Upaya tersebut berdampak positif terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan, yang tercermin dari meningkatnya pemahaman dan kesadaran stakeholder, khususnya operator seluler, penyelenggara televisi, dan radio FM, terhadap kewajiban perizinan, pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio sesuai ketentuan, serta potensi sanksi denda administratif apabila terjadi pelanggaran. Secara keseluruhan, kegiatan sosialisasi ini berkontribusi dalam mendorong terciptanya pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio yang tertib, taat regulasi, dan berkelanjutan di wilayah kerja Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang.

V. Tindak lanjut/Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja kegiatan Sosialisasi Pelayanan Publik dengan tema “Pencegahan Pengenaan Sanksi Denda Administratif terhadap Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio” dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Spektrum Frekuensi Radio di wilayah kerja Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang. Hasil capaian dan temuan dalam laporan tersebut digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pada periode berikutnya, termasuk penyempurnaan materi, metode penyampaian, serta penentuan sasaran peserta agar lebih tepat dan efektif. Selain itu, laporan kinerja ini menjadi rujukan dalam memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait, khususnya dalam upaya pencegahan pelanggaran penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. Pemanfaatan laporan kinerja tersebut juga mendukung peningkatan kepatuhan *stakeholder* terhadap ketentuan perizinan dan regulasi yang berlaku, serta menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program kerja dan kebijakan pengawasan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

VI. Rekomendasi Perbaikan

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pelayanan Publik, disarankan agar kegiatan serupa pada periode berikutnya dilaksanakan secara lebih terencana dan berkelanjutan. Perlu dilakukan pemetaan dan pengelompokan peserta berdasarkan jenis layanan dan tingkat risiko penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sehingga materi sosialisasi dapat disampaikan secara lebih tepat sasaran.

Selain itu, metode penyampaian materi perlu diperkaya dengan studi kasus dan contoh pelanggaran yang sering terjadi di lapangan agar peserta lebih mudah memahami ketentuan perizinan dan konsekuensi hukum yang berlaku. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait perlu diperkuat untuk memperluas jangkauan sosialisasi dan meningkatkan partisipasi peserta.

Di samping itu, pemanfaatan media digital dan *platform* daring sebagai sarana sosialisasi lanjutan dapat dioptimalkan guna memberikan akses informasi yang lebih luas dan berkesinambungan. Dengan penerapan rekomendasi tersebut, diharapkan kegiatan sosialisasi ke depan dapat berjalan lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan dan mencegah terjadinya pelanggaran penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

VII. Efisiensi

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pelayanan Publik di Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang telah menerapkan prinsip efisiensi dalam penggunaan sumber daya, baik dari sisi anggaran, waktu, maupun tenaga. Efisiensi anggaran diwujudkan melalui pemanfaatan metode pelaksanaan secara daring dan luring (*hybrid*) sehingga dapat menekan biaya perjalanan dinas dan operasional tanpa mengurangi kualitas penyampaian materi. Dari sisi waktu, kegiatan dirancang secara terstruktur dengan agenda yang jelas dan terfokus pada substansi utama, sehingga pelaksanaan berjalan efektif dan tepat sasaran. Sementara itu, efisiensi sumber daya manusia dilakukan dengan mengoptimalkan peran narasumber internal yang kompeten sesuai bidang tugasnya. Penerapan langkah-langkah efisiensi tersebut memungkinkan kegiatan sosialisasi tetap berjalan optimal, menjangkau peserta yang lebih luas, serta memberikan manfaat maksimal bagi para pemangku kepentingan.

VIII. Implementasi Budaya BerAKHLAK

• Berorientasi Pelayanan

Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan mengutamakan kebutuhan dan kepentingan peserta, khususnya operator seluler, penyelenggara televisi, dan radio FM. Materi disampaikan secara jelas, komunikatif, dan mudah dipahami, serta dilengkapi dengan sesi diskusi dan tanya jawab guna memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi peserta terkait perizinan dan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio.

• Akuntabel

Seluruh pelaksanaan kegiatan diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Materi sosialisasi disusun secara sistematis dengan mengacu pada regulasi di bidang telekomunikasi, termasuk ketentuan pengenaan sanksi denda administratif, serta didukung dengan dokumentasi kegiatan dan pelaporan kinerja secara transparan.

- **Kompeten**

Narasumber yang terlibat merupakan pegawai yang memiliki kompetensi dan pengalaman teknis di bidang pengelolaan serta pengawasan Spektrum Frekuensi Radio. Penyampaian materi dilakukan secara profesional dan berbasis keahlian, sehingga informasi yang diberikan akurat dan relevan dengan kebutuhan peserta.

- **Harmonis**

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan dengan menjunjung tinggi sikap saling menghormati dan komunikasi yang santun antara penyelenggara dan peserta. Perbedaan latar belakang dan kepentingan stakeholder disikapi secara terbuka dan konstruktif untuk menciptakan suasana diskusi yang kondusif dan inklusif.

- **Loyal**

Kegiatan ini mencerminkan komitmen pegawai Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang dalam mendukung kebijakan pemerintah dan menjaga kepentingan negara, khususnya dalam pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio sebagai sumber daya alam yang strategis dan terbatas.

- **Adaptif**

Dalam pelaksanaannya, kegiatan sosialisasi menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kondisi peserta melalui penerapan metode daring dan luring (hybrid). Pemanfaatan teknologi informasi dilakukan untuk memperluas jangkauan peserta serta meningkatkan efektivitas penyampaian materi.

- **Kolaboratif**

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah serta berbagai pemangku kepentingan terkait. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan pelanggaran penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan peningkatan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.





Gambar: Kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi Pelayanan Publik

IK 11 Persentase (%) Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)

I. Latar Belakang

Survei Kepuasan Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat/Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IKM/IPKP) yang dilaksanakan oleh Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang merupakan salah satu upaya strategis untuk menilai dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik secara berkelanjutan. Survei ini dilaksanakan secara terencana dan sistematis dengan melibatkan pengguna layanan Spektrum Frekuensi Radio sebagai responden, baik dari unsur instansi pemerintah, badan usaha, maupun masyarakat umum yang menerima layanan.

Melalui instrumen survei yang telah disusun sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku, responden diminta memberikan penilaian terhadap berbagai unsur pelayanan, antara lain persyaratan dan prosedur pelayanan, waktu penyelesaian layanan, biaya atau tarif, kompetensi serta sikap petugas pelayanan, hingga ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Data dan masukan yang diperoleh dari hasil survei IKM/IPKP selanjutnya diolah dan dianalisis secara objektif untuk menggambarkan tingkat kepuasan dan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Hasil analisis tersebut digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja pelayanan serta sebagai bahan perumusan langkah-langkah perbaikan dan inovasi pelayanan ke depan, sehingga Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang dapat terus meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik, serta memberikan layanan yang semakin efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

II. Capaian

Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang telah melaksanakan survei persepsi kualitas pelayanan publik sebanyak 4 kali kegiatan dari Triwulan I, II, III dan Triwulan IV dengan total 85 responden yang terdiri dari berbagai usia, jenis layanan yang didapatkan, jenis kelamin, serta pendidikan terakhir.

Berdasarkan hasil survei pelayanan publik dengan 9 kategori penilaian, didapatkan nilai IKM/IPKP Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang Tahun 2025 sebesar 3,82 dari skala 4. Survei ini telah melampaui target yang ditetapkan yakni minimal 1 kali pelaksanaan, jumlah minimal 30 responden dan target 3.2 dari skala 4. Indikator dengan nilai tertinggi adalah indikator Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan sebesar 3,88.

IKM/IPKP

3,82

Tabel Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)

No	Tahun	Nilai	Target	Capaian
1	2021	-	-	-
2	2022	3.82	90%	100%
3	2023	3.93	100%	100%
4	2024	3.92	100%	100%
5	2025	3.82	100%	100%

Tabel Indeks Kepuasan Masyarakat/Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan – IKM/IPKP

Kode	Kategori	Indeks 2024	Indeks 2025
P1	Persyaratan	3,91	3,86
P2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,96	3,79
P3	Waktu Penyelesaian	3,93	3,78
P4	Biaya/Tarif	3,94	3,78
P5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,92	3,78

Tabel Indeks Kepuasan Masyarakat/Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan – IKM/IPKP

P6	Kompetensi Pelaksana	3,93	3,86
P7	Perilaku Pelaksana	3,91	3,86
P8	Sarana dan Prasarana	3,90	3,85
P9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masyarakat	3,92	3,88

III. Analisa

Berdasarkan hasil analisis Survei IKM/IPKP Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang Tahun 2025, diperoleh nilai sebesar 3,82. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan berada pada kategori sangat baik, mencerminkan tingginya tingkat kepuasan dan persepsi positif masyarakat terhadap layanan yang diselenggarakan. Nilai IKM/IPKP ini menggambarkan bahwa sebagian besar unsur pelayanan, seperti kejelasan persyaratan dan prosedur, ketepatan waktu penyelesaian layanan, kompetensi serta sikap petugas, dan dukungan sarana prasarana, telah berjalan secara optimal dan sesuai dengan harapan pengguna layanan.

Indikator ini merealisasikan anggaran sebesar **Rp6.436.901 (96,27%)** dari pagu anggaran non-blokir sebesar **Rp6.686.000**, ini menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang tepat serta dukungan anggaran yang optimal. Realisasi tersebut sejalan dengan tercapainya target kinerja secara maksimal dan mencerminkan efektivitas pemanfaatan anggaran.

IV. Faktor Kendala, Upaya Percepatan dan Dampak

Dalam pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat/Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IKM/IPKP) Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang Tahun 2025 yang menghasilkan nilai 3,82, terdapat beberapa faktor kendala yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kendala tersebut antara lain keterbatasan sumber daya manusia pada waktu-waktu tertentu yang berdampak pada beban kerja petugas pelayanan, variasi tingkat pemahaman pengguna layanan terhadap prosedur dan regulasi Spektrum Frekuensi Radio, serta keterbatasan sarana pendukung layanan pada kondisi tertentu. Untuk mengatasi kendala tersebut sekaligus mempercepat peningkatan kualitas pelayanan, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang telah dan terus melakukan berbagai upaya percepatan, seperti penguatan kompetensi dan profesionalisme petugas melalui pembinaan dan peningkatan kapasitas, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelayanan, penyederhanaan alur dan prosedur layanan, serta peningkatan kualitas komunikasi dan sosialisasi kepada pengguna layanan.

Upaya-upaya tersebut berdampak positif terhadap efektivitas dan efisiensi pelayanan, meningkatkan kecepatan dan ketepatan penyelesaian layanan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja instansi. Dampak nyata dari pelaksanaan perbaikan berkelanjutan ini tercermin pada capaian nilai IKM/IPKP sebesar 3,82 yang berada pada kategori sangat baik, menunjukkan bahwa meskipun masih terdapat kendala, langkah-langkah percepatan yang dilakukan telah mampu meningkatkan kepuasan dan persepsi positif masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang.

V. Tindak lanjut/Pemanfaatan Laporan Kinerja

Tindak lanjut dan pemanfaatan Laporan Kinerja terkait hasil Survei IKM/IPKP dilakukan sebagai bagian dari komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Hasil survei tersebut dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi unsur-unsur pelayanan yang telah menunjukkan kinerja sangat baik maupun aspek yang masih memerlukan penyempurnaan. Selanjutnya, temuan dalam laporan kinerja IKM/IPKP dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi internal, dasar penyusunan rencana aksi perbaikan pelayanan, serta acuan dalam penetapan kebijakan dan program kerja pada periode berikutnya. Laporan ini juga digunakan sebagai referensi dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penyempurnaan standar operasional prosedur, serta optimalisasi pemanfaatan sarana, prasarana, dan teknologi pendukung layanan. Selain itu, hasil IKM/IPKP disampaikan kepada seluruh jajaran sebagai bahan penguatan komitmen bersama dalam memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dengan pemanfaatan laporan kinerja secara optimal, diharapkan capaian nilai IKM/IPKP yang berada pada kategori sangat baik dapat dipertahankan dan ditingkatkan, sekaligus mendorong terwujudnya pelayanan publik yang semakin efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang.

VI. Rekomendasi Perbaikan

Rekomendasi perbaikan difokuskan pada upaya menjaga konsistensi kinerja pelayanan sekaligus meningkatkan kualitas pada aspek-aspek yang masih berpotensi disempurnakan. Rekomendasi tersebut antara lain peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia secara berkelanjutan melalui pelatihan teknis maupun pelayanan prima, penguatan standar operasional prosedur agar semakin sederhana, jelas, dan mudah dipahami oleh pengguna layanan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat proses pelayanan dan meningkatkan transparansi. Selain itu, perlu dilakukan penguatan komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait prosedur dan regulasi Spektrum Frekuensi Radio guna meminimalkan kesalahan administrasi dan mempercepat penyelesaian layanan.

Rekomendasi perbaikan mencakup peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan serta penguatan mekanisme pengaduan dan umpan balik agar masukan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat. Dengan pelaksanaan rekomendasi perbaikan tersebut secara konsisten dan terintegrasi, diharapkan Loka Monitor Spektrum Frekuensi

Radio Pangkalpinang dapat mempertahankan capaian IKM/IPKP pada kategori sangat baik serta mendorong peningkatan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di tahun-tahun berikutnya.

VII. Efisiensi

Efisiensi yang dilakukan dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik di Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang Tahun 2025 diwujudkan melalui pemanfaatan metode dan sarana yang tepat guna tanpa mengurangi kualitas dan akurasi hasil survei. Pelaksanaan survei dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan media digital, sehingga proses pengisian kuesioner oleh responden dapat dilakukan secara cepat, mudah, dan fleksibel tanpa memerlukan banyak dokumen fisik.

Selain itu, perencanaan jadwal dan penentuan responden dilakukan secara terstruktur agar pengumpulan data dapat berlangsung efektif dalam waktu yang relatif singkat. Pengolahan dan analisis data survei dilaksanakan secara terintegrasi dengan sistem pengolahan data elektronik, sehingga meminimalkan kesalahan input, menghemat waktu kerja, serta mengurangi penggunaan sumber daya manusia dan biaya operasional. Koordinasi antartugas survei dilakukan secara intensif untuk menghindari duplikasi tugas dan memastikan setiap tahapan survei berjalan sesuai rencana.

Dengan penerapan langkah-langkah efisiensi tersebut, pelaksanaan Survei Kepuasan Pelayanan Publik Tahun 2025 dapat berjalan secara optimal, efektif, dan akuntabel serta menghasilkan data yang valid sebagai dasar evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang.

VIII. Implementasi Budaya BerAKHLAK

• Berorientasi Pelayanan

Pelaksanaan survei dirancang untuk memudahkan masyarakat sebagai pengguna layanan, mulai dari penyusunan kuesioner yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami hingga pemberian penjelasan yang komunikatif kepada responden. Petugas memastikan responden dapat menyampaikan penilaian secara objektif dan nyaman tanpa adanya tekanan, sehingga aspirasi dan persepsi masyarakat dapat terakomodasi dengan baik.

• Akuntabel

Seluruh tahapan survei dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku. Data survei dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta hasilnya digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

• Kompeten

Petugas pelaksana survei dibekali pemahaman dan kemampuan teknis terkait metode survei, pengelolaan data, dan analisis hasil survei. Hal ini memastikan bahwa proses pengumpulan dan pengolahan data dilakukan secara tepat, akurat, dan menghasilkan informasi yang valid untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Harmonis**

Pelaksanaan survei dilakukan dengan menjunjung tinggi sikap saling menghargai, sopan, dan santun dalam berinteraksi dengan responden. Selain itu, terjalin kerja sama yang baik antartugas survei sehingga kegiatan dapat berjalan lancar dalam suasana kerja yang kondusif dan saling mendukung.

- **Loyal**

Seluruh pegawai menunjukkan komitmen dan dedikasi dalam mendukung pelaksanaan survei sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan citra institusi. Loyalitas diwujudkan melalui kepatuhan terhadap kebijakan pimpinan serta kesungguhan dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing.

- **Adaptif**

Metode pelaksanaan survei disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kondisi responden, antara lain melalui pemanfaatan media digital untuk pengisian kuesioner. Penyesuaian ini memungkinkan survei dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, dan menjangkau responden secara lebih luas.

- **Kolaboratif**

Pelaksanaan survei melibatkan koordinasi dan sinergi antarunit kerja di lingkungan Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang, serta dukungan dari para pemangku kepentingan terkait. Kolaborasi yang baik memastikan setiap tahapan survei berjalan terintegrasi dan menghasilkan data yang komprehensif.



Gambar: Kegiatan Pelaksanaan Survei IKP /IPKP

IK 12 Persentase (%) Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)

I. Latar Belakang

Pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik (IIPP) / Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang dilakukan oleh Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang merupakan instrumen strategis dalam menilai dan memperkuat integritas penyelenggaraan pelayanan publik secara menyeluruh. Survei ini dilaksanakan secara terencana, objektif, dan berkesinambungan dengan melibatkan pengguna layanan Spektrum Frekuensi Radio sebagai responden, baik dari unsur pemerintah, badan usaha, maupun masyarakat umum. Fokus utama survei ini adalah untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap integritas aparatur dan sistem pelayanan, khususnya terkait transparansi prosedur, kejelasan persyaratan, kepastian biaya dan waktu pelayanan, serta potensi terjadinya praktik gratifikasi, pungutan liar, atau penyalahgunaan wewenang. Instrumen survei disusun sesuai dengan pedoman dan standar yang berlaku, sehingga mampu menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil Survei IIPP/IPAK selanjutnya dianalisis secara komprehensif untuk mengidentifikasi area pelayanan yang telah berjalan dengan baik maupun aspek-aspek yang masih memerlukan penguatan pengendalian internal dan perbaikan sistem. Temuan survei tersebut dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kinerja, dasar penyusunan rencana aksi pencegahan korupsi, serta penguatan budaya integritas di lingkungan Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang. Dengan pelaksanaan Survei IIPP/IPAK ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan semakin meningkat, serta terwujud pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi.

II. Capaian

Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang telah melaksanakan survei Integritas Pelayanan Publik sebanyak 4 kali kegiatan dari Triwulan I, II, III dan Triwulan IV dengan total 85 responden. Berdasarkan hasil survei Integritas Pelayanan Publik didapatkan IIPP/IPAK Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang Tahun 2025 adalah 3,81 dari skala 4. Survei ini telah melampaui target yang ditetapkan yakni minimal 1 kali pelaksanaan, jumlah minimal 30 responden dan target 3.6 dari skala 4.

IIPP/IPAK

3,81

Tabel Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)

No	Tahun	Nilai	Target	Capaian
1	2021	-	-	-
2	2022	3.87	90%	100%
3	2023	3.96	100%	100%
4	2024	3.92	100%	100%
5	2025	3.81	100%	100%

Tabel Indeks Integritas Pelayanan Publik/Indeks Persepsi Anti Korupsi – IIPP/IPAK

Kode	Kategori	Indeks 2024	Indeks 2025
K1	Diskriminasi Pelayanan	3,89	3,79
K2	Pelayanan diluar prosedur	3,92	3,76
K3	Penerimaan imbalan	3,94	3,85
K4	Pungutan liar (pungli)	3,94	3,84
K5	Percaloan/perantara tidak resmi	3,95	3,84

III. Analisa

Berdasarkan hasil analisis Survei IIPP/IPAK Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang Tahun 2025, diperoleh nilai sebesar 3,81, yang menunjukkan bahwa tingkat integritas penyelenggaraan pelayanan publik berada pada kategori sangat baik. Capaian nilai tersebut mencerminkan persepsi positif masyarakat terhadap komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan yang jujur, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar responden menilai prosedur pelayanan telah dilaksanakan secara terbuka dan jelas, dengan persyaratan, alur proses, biaya, serta waktu pelayanan yang disampaikan secara transparan dan konsisten sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, sikap dan perilaku petugas pelayanan dinilai profesional, berintegritas, serta tidak mengindikasikan adanya permintaan imbalan, gratifikasi, atau pungutan di luar ketentuan. Nilai IIPP/IPAK ini juga mencerminkan efektivitas penerapan sistem pengendalian internal dan upaya pencegahan korupsi yang telah dilaksanakan, termasuk sosialisasi nilai integritas, penguatan pengawasan, serta penyediaan mekanisme pengaduan masyarakat yang dapat diakses dengan mudah.

Indikator ini mencatat realisasi anggaran sebesar **Rp6.436.901** atau **96,27%** dari pagu anggaran non-blokir sebesar **Rp6.686.000**. Capaian tersebut mencerminkan perencanaan yang matang serta pelaksanaan kegiatan yang berjalan dengan baik, didukung oleh alokasi anggaran yang dimanfaatkan secara optimal. Tingkat realisasi ini juga selaras dengan pencapaian target kinerja yang maksimal dan menunjukkan efektivitas dalam pengelolaan serta penggunaan anggaran.

IV. Faktor Kendala, Upaya Percepatan dan Dampak

Dalam pelaksanaan Survei IIPP/IPAK Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang Tahun 2025 yang menghasilkan nilai 3,81, masih terdapat beberapa faktor kendala yang dihadapi dalam upaya penguatan integritas pelayanan publik. Kendala tersebut antara lain masih beragamnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan standar pelayanan yang berpotensi menimbulkan persepsi berbeda, keterbatasan intensitas sosialisasi terkait kebijakan anti korupsi dan gratifikasi, serta tantangan dalam memastikan konsistensi penerapan prinsip integritas pada seluruh tahapan pelayanan.

Untuk mengatasi kendala tersebut sekaligus mempercepat peningkatan nilai integritas pelayanan, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang telah dan terus melakukan berbagai upaya percepatan, antara lain penguatan komitmen integritas aparatur melalui sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai anti korupsi, peningkatan transparansi prosedur, biaya, dan waktu pelayanan melalui media informasi yang mudah diakses, serta penguatan sistem pengendalian internal dan mekanisme pengaduan masyarakat.

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi juga dioptimalkan untuk meminimalkan interaksi yang berpotensi menimbulkan risiko penyimpangan. Upaya-upaya percepatan tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat, terciptanya budaya kerja yang berintegritas, serta menurunnya potensi praktik korupsi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dampak tersebut tercermin pada capaian nilai IIPP/IPAK sebesar 3,81 yang berada pada kategori sangat baik, menunjukkan bahwa meskipun masih terdapat kendala, langkah-langkah perbaikan dan percepatan yang dilakukan telah efektif dalam memperkuat integritas pelayanan publik di Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang.

V. Tindak lanjut/Pemanfaatan Laporan Kinerja

Tindak lanjut dan pemanfaatan Laporan Kinerja hasil Survei IIPP/IPAK Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang Tahun 2025 dengan nilai 3,81 dilakukan melalui evaluasi internal terhadap seluruh unsur pelayanan untuk menjaga dan meningkatkan integritas

penyelenggaraan layanan. Hasil survei dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan rencana perbaikan, penguatan standar operasional prosedur, peningkatan transparansi informasi layanan, serta penguatan sistem pengendalian internal dan mekanisme pengaduan masyarakat. Selain itu, laporan kinerja tersebut menjadi acuan dalam pembinaan aparatur dan penguatan budaya anti korupsi, sehingga kualitas dan integritas pelayanan publik dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

VI. Rekomendasi Perbaikan

Rekomendasi perbaikan diarahkan pada upaya penguatan dan konsistensi penerapan prinsip integritas dalam seluruh tahapan proses pelayanan publik. Meskipun capaian tersebut telah menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap integritas aparatur dan sistem pelayanan, langkah-langkah perbaikan tetap diperlukan guna menjaga keberlanjutan kinerja serta mengantisipasi potensi risiko integritas di masa mendatang. Rekomendasi perbaikan tersebut meliputi peningkatan intensitas dan kualitas sosialisasi kebijakan anti korupsi, pencegahan gratifikasi, serta pengelolaan konflik kepentingan kepada seluruh aparatur dan pengguna layanan, agar pemahaman terhadap nilai-nilai integritas semakin merata dan konsisten.

Selain itu, penyempurnaan standar operasional prosedur terus dilakukan agar semakin transparan, sederhana, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga dapat meminimalkan celah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pelayanan. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi juga direkomendasikan untuk mendukung keterbukaan informasi, memperkuat jejak audit, serta mengurangi interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan praktik tidak sesuai ketentuan.

Di samping itu, penguatan pengawasan internal dan penyempurnaan mekanisme pengaduan masyarakat perlu terus ditingkatkan agar lebih responsif, mudah diakses, dan terpercaya sebagai sarana kontrol publik. Upaya peningkatan kapasitas aparatur melalui pembinaan dan internalisasi nilai etika serta integritas secara berkelanjutan juga menjadi bagian penting dari rekomendasi perbaikan. Dengan pelaksanaan seluruh rekomendasi tersebut secara konsisten dan terintegrasi, diharapkan nilai IIPP/IPAK dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada periode berikutnya, sekaligus semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan kualitas pelayanan publik di Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang.

VII. Efisiensi

Efisiensi yang dilakukan dalam pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik di Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang Tahun 2025 diwujudkan melalui penerapan metode kerja yang efektif dan pemanfaatan sumber daya secara optimal tanpa mengurangi kualitas dan validitas hasil survei. Pelaksanaan survei dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan instrumen berbasis digital sehingga proses pengumpulan data dapat berlangsung lebih cepat, praktis, dan mengurangi penggunaan dokumen fisik. Perencanaan pelaksanaan survei disusun secara terarah, mulai dari penentuan responden, penjadwalan kegiatan, hingga pembagian tugas petugas survei, sehingga meminimalkan tumpang tindih pekerjaan dan penggunaan waktu yang tidak efisien.

VIII. Implementasi Budaya BerAKHLAK

- **Berorientasi Pelayanan**

Pelaksanaan survei diarahkan untuk memberikan ruang yang aman dan nyaman bagi responden dalam menyampaikan penilaian terkait integritas pelayanan. Petugas memberikan penjelasan yang jelas mengenai tujuan survei serta menjamin kerahasiaan jawaban, sehingga masyarakat dapat menyampaikan persepsi secara jujur dan objektif.

- **Akuntabel**

Seluruh tahapan survei, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengolahan data, hingga penyusunan laporan hasil survei, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Data hasil survei dikelola secara transparan dan digunakan sebagai dasar evaluasi serta pengambilan keputusan.

- **Kompeten**

Petugas pelaksana survei memiliki pemahaman yang memadai terkait indikator integritas dan metode pengumpulan data, sehingga mampu memastikan proses survei berjalan dengan tepat dan menghasilkan data yang valid dan akurat.

- **Harmonis**

Interaksi antara petugas dan responden dilakukan dengan menjunjung tinggi sikap sopan, santun, dan saling menghargai. Selain itu, kerja sama yang baik antarpegawai terjalin untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif selama pelaksanaan survei.

- **Loyal**

Seluruh pegawai menunjukkan komitmen dan dedikasi dalam mendukung pelaksanaan survei sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan citra institusi. Loyalitas diwujudkan melalui kepatuhan terhadap kebijakan pimpinan serta kesungguhan dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing.

- **Adaptif**

Pelaksanaan survei menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kondisi lapangan melalui pemanfaatan media digital, sehingga survei dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan menjangkau responden secara lebih luas.

- **Kolaboratif**

Pelaksanaan survei dilakukan melalui koordinasi dan sinergi antarunit kerja di lingkungan Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang, serta melibatkan dukungan dari pemangku kepentingan terkait guna memastikan seluruh tahapan survei berjalan terintegrasi dan optimal.



Gambar: Kegiatan Pelaksanaan Survei IIPP / IPAK

IK 13 Persentase (%) Tindak lanjut verifikasi *site* ISR *Microwave Link* yang tidak sesuai (PrimaAksi)

I. Latar Belakang

Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio yang efektif membutuhkan keakuratan data teknis dan administratif, salah satunya adalah kesesuaian koordinat geografis stasiun radio dengan data yang tercantum dalam ISR. Ketidaksesuaian koordinat lokasi dapat berdampak pada pengawasan yang tidak optimal, potensi gangguan frekuensi, serta ketidaktepatan dalam proses perizinan. Menindaklanjuti hasil rapat penyusunan PK UPT Tahun Anggaran 2025, serta sesuai dengan amanat Pasal 4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, Direktorat Operasi Sumber Daya telah menetapkan kegiatan verifikasi data koordinat *site* ISR sebagai indikator kinerja bagi UPT.

Verifikasi ini bertujuan untuk memastikan akurasi lokasi stasiun radio, memperbarui data koordinat pada sistem informasi perizinan (SIMS), serta menghasilkan referensi koordinat *site* (Master Data Referensi *Site*/MDRS) yang akan dijadikan acuan dalam permohonan ISR. Kegiatan ini merupakan bagian dari program PrimaAksi (Pelayanan Frekuensi untuk Indonesia Maju Terkoneksi), yang dirancang sebagai solusi pembenahan data dan proses bisnis ISR berbasis kondisi riil di lapangan. Data hasil verifikasi oleh UPT akan menjadi salah satu input penting dalam sistem perizinan berbasis referensi koordinat, guna mendukung perbaikan tata kelola data ISR dan peningkatan efektivitas pengendalian Spektrum Frekuensi Radio.

II. Capaian

Seluruh target verifikasi data koordinat *site* ISR untuk tahun 2025 telah tercapai 100%, sesuai dengan yang direncanakan dalam perjanjian kinerja. Capaian tersebut meliputi:

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
2021	-	-	-
2022	-	-	-
2023	Persentase (%) Verifikasi data koordinat <i>site</i> ISR <i>Microwave Link</i> dan penyiaran (<i>QR Code site</i>)	100%	100%
2024	Persentase (%) Verifikasi data koordinat <i>site</i> ISR <i>Microwave Link</i> dan penyiaran (<i>QR Code site</i>)	100%	100%
2025	Persentase (%) Tindak lanjut verifikasi <i>site</i> ISR <i>Microwave Link</i> yang tidak sesuai (PrimaAksi)	100%	100%

Kabupaten Bangka

- Pelaksanaan: Triwulan II (April-Juni 2025)
- Jumlah *site* yang diverifikasi: 55 *site*
- Status: Selesai diverifikasi 100%
- Metode: Pengukuran lapangan menggunakan perangkat GPS serta pencocokan dengan database SIMS dan *QR Code site*.

Kabupaten Belitung Timur

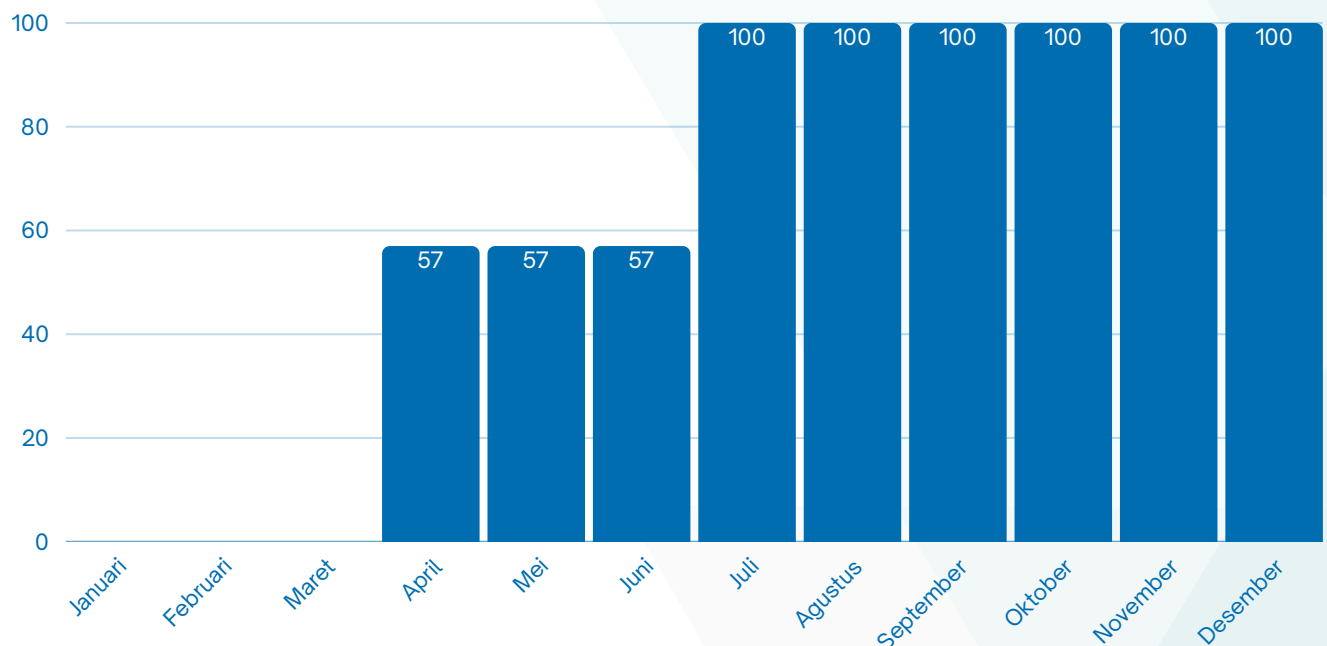
- Pelaksanaan: Triwulan III (Juli-September 2025)
- Jumlah *site* yang diverifikasi: 40 *site*
- Status: Selesai diverifikasi 100%
- Metode: Verifikasi dilakukan melalui inspeksi langsung, pengambilan koordinat aktual, dan perbandingan terhadap koordinat dalam ISR.

Verifikasi dilaksanakan sesuai pedoman Keputusan Dirjen SDPPI No. 108 Tahun 2023 dan mendukung pencapaian target nasional pembenahan data ISR untuk menunjang program PrimaAksi 2025. Pelaksanaan Verifikasi Data Koordinat *Site* ISR *Microwavelink* dan Penyiaran (*QR Code Site*) Tahun 2025 memiliki target sebanyak 95 (Sembilan puluh lima) ISR dan dengan wilayah 2 Kabupaten (Belitung Timur dan Bangka) capaian telah tercapai 100%:

Tabel Persentase Capaian Verifikasi Data QR Code Site

No	Nama Kab/Kota	ISR Terverifikasi	% ISR Terverifikasi
1.	Belitung Timur	40	100%
2.	Bangka	55	
Total		95	100%

Grafik Persentase PK Primaaksi



Laporan kinerja PK PRIMAAKSI dimanfaatkan secara strategis sebagai bahan evaluasi dan rujukan dalam pengelolaan data perizinan Spektrum Frekuensi Radio. Data hasil verifikasi dan tindak lanjut koordinat site digunakan sebagai dasar pemutakhiran data pada sistem informasi perizinan, sehingga informasi teknis yang tersaji lebih akurat dan mencerminkan kondisi faktual di lapangan.

Selain itu, laporan kinerja ini menjadi referensi penting dalam kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap pemegang ISR, khususnya dalam meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan teknis perizinan. Hasil evaluasi juga dimanfaatkan dalam penyusunan perencanaan kegiatan verifikasi lanjutan, termasuk penentuan prioritas site yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Dengan demikian, laporan kinerja tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai instrumen perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola Spektrum Frekuensi Radio.

III. Analisa

Pelaksanaan Program Kerja PrimaAksi yang berfokus pada tindak lanjut verifikasi data koordinat *site* ISR menunjukkan capaian kinerja yang sangat optimal. Seluruh target verifikasi dan tindak lanjut terhadap 95 *site* berhasil diselesaikan secara menyeluruh, sehingga indikator kinerja tercapai 100%. Capaian ini mencerminkan meningkatnya kualitas tata kelola data perizinan Spektrum Frekuensi Radio di wilayah kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya dalam aspek akurasi dan validitas data teknis koordinat *site*. Secara umum, akurasi data koordinat *site* merupakan elemen krusial dalam pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio, baik di tingkat nasional maupun internasional. Praktik terbaik yang diterapkan oleh regulator telekomunikasi di berbagai negara menunjukkan bahwa penguatan basis data koordinat *site* yang terverifikasi menjadi fondasi utama dalam pengendalian interferensi, perencanaan jaringan, serta pengawasan kepatuhan perizinan. Pelaksanaan PK PrimaAksi selaras dengan pendekatan tersebut, karena tidak hanya berorientasi pada pemenuhan target administratif, tetapi juga pada peningkatan kualitas data referensi sebagai dasar pengambilan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan spektrum.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh perencanaan kegiatan yang sistematis, pemanfaatan data ISR sebagai dasar analisis awal, serta pendekatan verifikasi berbasis kondisi faktual di lapangan. Dengan demikian PrimaAksi berkontribusi langsung terhadap terwujudnya tata kelola Spektrum Frekuensi Radio yang tertib, efisien, dan berkelanjutan.

IV. Faktor Kendala, Upaya Percepatan dan Dampak

Dalam pelaksanaan tindak lanjut verifikasi data koordinat *site* ISR, terdapat sejumlah kendala yang dihadapi, baik dari sisi teknis maupun operasional. Kendala utama meliputi perbedaan data koordinat antara yang tercantum dalam dokumen ISR dengan kondisi riil di lapangan, keterbatasan akses menuju beberapa lokasi *site*, serta kebutuhan koordinasi intensif dengan pemegang ISR untuk proses klarifikasi dan pembaruan data. Kondisi geografis wilayah kepulauan yang mencakup Pulau Bangka dan Pulau Belitung juga menuntut perencanaan waktu dan logistik yang lebih cermat.

Untuk mengatasi kendala tersebut, dilakukan berbagai upaya percepatan, antara lain dengan penyusunan jadwal verifikasi secara bertahap dan terprioritasi, pemanfaatan data teknis pendukung seperti peta dan dokumentasi sebelumnya, serta penguatan koordinasi dan komunikasi dengan pemegang ISR. Pendekatan persuasif dan koordinatif menjadi strategi utama agar proses klarifikasi dan tindak lanjut dapat berjalan efektif tanpa menghambat pencapaian target. Upaya-upaya tersebut memberikan dampak positif terhadap pencapaian indikator kinerja, di mana seluruh *site* yang teridentifikasi memiliki ketidaksesuaian data koordinat dapat ditindaklanjuti hingga mencapai kesesuaian. Dampak lanjutannya adalah meningkatnya akurasi basis data ISR, berkurangnya potensi sengketa teknis maupun gangguan frekuensi, serta meningkatnya efektivitas pengawasan Spektrum Frekuensi Radio di wilayah kerja.

V. Tindak lanjut/Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja PrimaAksi dimanfaatkan secara strategis sebagai bahan evaluasi dan rujukan dalam pengelolaan data perizinan Spektrum Frekuensi Radio. Data hasil verifikasi dan tindak lanjut koordinat *site* digunakan sebagai dasar pemutakhiran data pada sistem informasi

perizinan, sehingga informasi teknis yang tersaji lebih akurat dan mencerminkan kondisi faktual di lapangan.

Laporan kinerja PrimaAksi dimanfaatkan secara strategis sebagai bahan evaluasi dan rujukan dalam pengelolaan data perizinan Spektrum Frekuensi Radio. Data hasil verifikasi dan tindak lanjut koordinat *site* digunakan sebagai dasar pemutakhiran data pada sistem informasi perizinan, sehingga informasi teknis yang tersaji lebih akurat dan mencerminkan kondisi faktual di lapangan.

Selain itu, laporan kinerja ini menjadi referensi penting dalam kegiatan pengawasan dan pembinaan terhadap pemegang ISR, khususnya dalam meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan teknis perizinan. Hasil evaluasi juga dimanfaatkan dalam penyusunan perencanaan kegiatan verifikasi lanjutan, termasuk penentuan prioritas *site* yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Dengan demikian, laporan kinerja tidak hanya berfungsi sebagai dokumen pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai instrumen perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola Spektrum Frekuensi Radio.

VI. Rekomendasi Perbaikan

Untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pelaksanaan PrimaAksi, diperlukan penguatan mekanisme verifikasi data koordinat *site* secara periodik dan terintegrasi dengan sistem informasi perizinan Spektrum Frekuensi Radio. Integrasi tersebut diharapkan mampu meminimalkan potensi ketidaksesuaian data sejak tahap awal permohonan ISR, sehingga beban tindak lanjut di lapangan dapat dikurangi.

VII. Efisiensi

Pelaksanaan PrimaAksi menunjukkan tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya yang baik, tercermin dari tercapainya seluruh target verifikasi tanpa penambahan sumber daya secara signifikan. Efisiensi ini dicapai melalui perencanaan kegiatan yang terstruktur, pemanfaatan data ISR sebagai dasar analisis awal, serta penerapan prioritas *site* yang memerlukan tindak lanjut.

Pengaturan jadwal kerja yang efektif dan sinergi antaranggota tim turut mendukung optimalisasi penggunaan waktu dan tenaga. Selain itu, metode Desk Work dapat membantu mengurangi kebutuhan kunjungan ulang ke lapangan. Dengan demikian, efisiensi sumber daya yang diterapkan tidak hanya mendukung pencapaian target kinerja, tetapi juga memperkuat prinsip akuntabilitas dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya organisasi.

VIII. Implementasi Budaya BerAKHLAK

• Berorientasi Pelayanan

Pelaksanaan verifikasi data koordinat *site* ISR dilakukan untuk memastikan keakuratan data perizinan sehingga pelayanan perizinan spektrum frekuensi menjadi lebih tepat, cepat, dan memberikan kepastian bagi pemegang ISR.

• Akuntabel

Kegiatan verifikasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku, didukung data hasil verifikasi lapangan yang terdokumentasi dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pemutakhiran data ISR.

- **Kompeten**

Petugas melaksanakan verifikasi dengan penguasaan teknis pemetaan dan validasi koordinat site, serta kemampuan analisis data untuk memastikan kesesuaian antara data ISR dan kondisi riil di lapangan.

- **Harmonis**

Pelaksanaan kegiatan didukung kerja sama yang baik antaranggota tim, dengan komunikasi yang efektif dalam proses verifikasi dan tindak lanjut data koordinat site ISR.

- **Loyal**

Petugas melaksanakan kegiatan PrimaAksi secara konsisten sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam membenahan tata kelola data perizinan dan pengendalian Spektrum Frekuensi Radio.

- **Adaptif**

Pelaksanaan verifikasi menyesuaikan dengan kondisi lapangan dan dinamika data ISR, termasuk penyesuaian metode kerja untuk memastikan target tindak lanjut dapat diselesaikan tepat waktu.

- **Kolaboratif**

Kegiatan verifikasi dan tindak lanjut data koordinat site ISR dilaksanakan melalui koordinasi yang baik antara UPT dan pemegang ISR guna memastikan pembaruan data teknis dan administrasi berjalan efektif.



Gambar: Kegiatan Pelaksanaan Verifikasi Site ISR (Primaaksi)

IK 2.1 Nilai Kinerja Anggaran Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang Tahun 2025

I. Latar Belakang

Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang selaku UPT Direktorat Jenderal Infradigi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pangkalpinang, Kab. Bangka, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka Selatan, Kab. Bangka Barat, Kab. Belitung dan Kab. Belitung Timur).

Dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan pelayanan tersebut, diperlukan peran strategis Tim Kerja Umum dan Rumah Tangga (RT), khususnya dalam penyelenggaraan fungsi keuangan, kepegawaian, serta pengelolaan kerumahtanggaan. Dukungan administrasi dan tata kelola internal yang baik menjadi faktor penting dalam menjamin terselenggaranya kegiatan teknis operasional secara optimal. Sejalan dengan hal tersebut, sasaran kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah meningkatnya kualitas tata kelola Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital yang efektif dan efisien. Sasaran tersebut diukur melalui indikator Nilai Kinerja Anggaran Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang Tahun 2025 dengan target sebesar 86,95.

Nilai Kinerja Anggaran tersebut mencerminkan kualitas pengelolaan anggaran yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi anggaran secara akuntabel dan tepat waktu. Selain itu, capaian indikator tersebut didukung oleh pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan sebagai instrumen pengendalian internal, sehingga setiap tahapan pengelolaan anggaran dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tertib, serta evaluasi yang efektif, diharapkan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang semakin meningkat dan mampu mendukung terwujudnya tata kelola organisasi yang transparan, efisien, dan berorientasi pada hasil.

II. Capaian

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Target	86	87	87	87	86,95
Realisasi	84,03	94,50	87,40	94,04	81,75

Pengukuran kinerja tahun 2025 pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu perencanaan dan pelaksanaan yang dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut.

1. Perencanaan

Kegiatan perencanaan diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kegiatan utama, yaitu:

a. Penganggaran RKA K/L, DIPA, Revisi

Pada tahun 2025, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang menyusun rencana program kerja tahunan dengan **total pagu dalam DIPA Rp10.421.437.000,-** (sepuluh milyar empat ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian pagu dalam DIPA satker lama **Rp3.287.010.000** dan pagu dalam DIPA satker baru **Rp7.134.427.000**. Anggaran tersebut dapat diklasifikasikan menjadi:

- **Belanja Pegawai : Rp1.170.096.000,- (satker lama) dan Rp1.659.970.000,- (satker baru)**
- **Belanja Barang: Rp2.116.914.000,- (satker lama) Rp5.315.707.000,- (satker baru)**
- **Belanja Modal: Rp158.750.000,- (satker baru)**

Adapun rincian anggaran TA 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Pagu Per KRO (Klasifikasi Rincian Output) TA 2025

No	Nama Kegiatan	Pagu Dipa Lama (Rp)	Pagu Dipa Baru (Rp)	Target
1.	Layanan Dukungan Pengawasan Spektrum Frekuensi Radio UPT	684.185.000	2.270.956.000	1 Layanan
2.	Pemantauan, Pengukuran dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Dalam Kota Wilayah Kepulauan	17.180.000	27.255.000	4 Layanan
3.	Pemantauan, Pengukuran dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Kepulauan	163.371.000	248.021.000	14 Layanan
4.	Pemantauan, Pengukuran dan Penanganan Gangguan Frekuensi Radio Luar Kota Transportasi Udara Wilayah Kepulauan	68.963.000	130.610.000	6 Layanan
5.	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota Wilayah Kepulauan	0	11.744.000	1 Layanan
6.	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Darat Wilayah Kepulauan	14.350.000	50.012.000	2 Layanan

7.	Penertiban Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota Transportasi Udara Wilayah Kepulauan	0	22.285.000	1 Layanan
8.	Perangkat Monitoring UPT	0	98.750.000	1 Unit
9.	Pemeliharaan Alat Monitoring UPT	80.545.000	189.455.000	1 Unit
10.	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	0	2.000.000	1 Layanan
11.	Layanan Perkantoran	2.258.416.000	4.033.339.000	2 Layanan
12.	Layanan Sarana Internal	0	50.000.000	1 Unit
TOTAL PAGU		3.287.010.000	7.134.427.000	

b. Pelaksanaan/Penyerapan melalui kegiatan yang telah direncanakan kegiatan ini meliputi:

- Pelaporan realisasi anggaran setiap bulannya pada aplikasi SMART DJA dan e-monev Bappenas
- Membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berupa LPJ bendahara (dari aplikasi SAKTI).

Pagu Anggaran Tahun 2025 Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang sebesar **Rp10.421.437.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp9.223.992.531,-** dengan rincian anggaran dan realisasi belanja sebagai berikut:

Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2025

Uraian	Januari-Juni			Juli-Desember		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	1.170.096.000	1.169.699.716	99,97	1.659.970.000	1.624.634.401	97,87
Belanja Barang	2.116.914.000	2.116.889.941	100	5.315.707.000	4.155.570.823	78,18
Belanja Modal	0	0	0	158.750.000	157.197.650	99,02
Total Belanja	3.287.010.000	3.286.589.657	99,99	7.134.427.000	5.937.402.874	83,22

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA Score)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan instrumen penilaian yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan dan pelaksanaan anggaran, yang terdiri atas delapan indikator utama. IKPA menggambarkan tingkat keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tingkat efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan. Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang dengan capaian IKPA 89,25 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Capaian IKPA Tahun 2025

Nilai IKPA Tahun 2025			
Bulan	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir
Januari	55.00	80%	68,75
Februari	55.00	80%	68,75
Maret	55.00	80%	68,75
April	68.57	80%	85,71
Mei	75.98	80%	94,97
Juni	53.35	80%	66,68
Juli	65.41	80%	81,76
Agustus	76.20	90%	84,66
September	84.61	100%	84,61
Oktober	86.02	100%	86,02
November	87.55	100%	87,55
Desember	89.25	100%	89,25

Capaian target Nilai Kinerja Anggaran Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang Tahun 2025 yaitu sebesar 81,75 kurang dari target yang telah ditentukan sebesar 86,95 dengan perhitungan capaian sebagai berikut:

- Nilai kinerja Perencanaan Anggaran = $50\% \times 75,00 = 37,50$
- Nilai Kinerja Anggaran = $50\% \times ((89,25 + 87,75 / 2)) = 44,25$

III. Analisa

Capaian Nilai Kinerja Anggaran pada tahun 2025 tercatat sebesar 81,75 dengan tingkat realisasi mencapai 94,02% dari target yang ditetapkan. Tidak tercapainya target secara optimal terutama disebabkan oleh adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), yakni transformasi dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) menjadi Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID), sebagai bagian dari perubahan Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital.

Perubahan organisasi tersebut terjadi pada tahun berjalan, sehingga berdampak pada mekanisme penilaian kinerja anggaran. Variabel efisiensi penggunaan anggaran yang diukur melalui indikator penggunaan SBK dan efisiensi SBK tidak dapat dinilai dan tidak terpenuhinya ketentuan dispensasi penilaian kinerja sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 27/MK/AG/2025, dapat diterapkan. Penilaian akhirnya hanya didasarkan pada capaian rincian output (RO) dengan bobot sebesar 75%, sehingga diperoleh nilai kinerja perencanaan anggaran hanya mencapai angka 75.

Dengan demikian, capaian Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2025 belum maksimal disebabkan oleh belum optimalnya kinerja perencanaan anggaran akibat adanya blokir efisiensi pagu serta ketidaksesuaian kodefikasi rincian output SBK, sehingga tidak memenuhi persyaratan dispensasi penilaian kinerja perencanaan anggaran.

IV. Faktor Kendala, Upaya Percepatan dan Dampak

Nilai Kinerja Anggaran Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang Tahun 2025 yang mencapai 81,75 dan belum memenuhi target sebesar 86,95 dipengaruhi oleh beberapa faktor kendala, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan anggaran. Kendala tersebut antara lain masih adanya ketidaktepatan dalam penjadwalan kegiatan, keterlambatan pelaksanaan beberapa aktivitas akibat penyesuaian kebijakan dan administrasi, serta belum optimalnya keselarasan antara rencana anggaran dengan kebutuhan riil di lapangan. Selain itu, faktor keterbatasan sumber daya pendukung, baik dari sisi SDM maupun proses administrasi keuangan, turut memengaruhi kecepatan dan kualitas realisasi anggaran sehingga berdampak pada rendahnya capaian sebagian indikator kinerja anggaran.

Sebagai upaya percepatan dan perbaikan kinerja, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang melakukan langkah-langkah strategis antara lain dengan memperkuat koordinasi internal antar tim kerja, melakukan reviu dan penyesuaian perencanaan anggaran secara berkala, serta mengoptimalkan fungsi monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Upaya lain yang dilakukan meliputi percepatan proses administrasi keuangan, peningkatan pemahaman pegawai terhadap regulasi pengelolaan anggaran, serta pemanfaatan sistem informasi keuangan secara lebih optimal guna memastikan setiap kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dampak dari capaian Nilai Kinerja Anggaran yang belum mencapai target tersebut menjadi bahan evaluasi penting bagi organisasi dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola anggaran di periode berikutnya. Meskipun demikian, capaian sebesar 81,75 masih menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah berjalan cukup baik dan menjadi dasar untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Dengan implementasi upaya percepatan yang konsisten dan terarah, diharapkan kinerja anggaran pada tahun selanjutnya dapat meningkat, mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang, serta berkontribusi terhadap terwujudnya tata kelola organisasi yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

V. Tindak lanjut/Pemanfaatan Laporan Kinerja

Tindak lanjut/pemanfaatan laporan kinerja sebelumnya yang telah digunakan untuk perbaikan indikator tersebut yakni:

- Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.
- Melakukan reviu atas DIPA secara periodik (minimal sekali di akhir triwulan) dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan pada satker.
- Memastikan pengadaan barang/jasa yang sifatnya sekaligus dan nilainya s.d Rp. 200 Juta diselesaikan (s.d pembayaran kepada pihak ketiga) pada Triwulan I.
- Segera menyelesaikan pembayaran dan tidak menunda proses penyelesaian tagihan yang pekerjaannya telah selesai (termasuk pekerjaan termin).
- Melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal yang proses pengadaan barang dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun anggaran.
- Menggunakan UP Tunai secara efektif dan efisien dengan mempercepat revolving UP Tunai paling sedikit 100% dalam satu bulan.
- Mereviu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran (minimal sekali di akhir triwulan), serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja.
- Menghitung rencana penarikan dana agar dapat dieksekusi tepat waktu.
- Secara periodik menghitung tingkat kemajuan aktivitas (progres) dan capaian (Realisasi Volume), memperhatikan gap progres capaian output dengan penyerapan anggaran

VI. Rekomendasi Perbaikan

Berdasarkan capaian Nilai Kinerja Anggaran Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang Tahun 2025 sebesar 81,75 yang masih berada di bawah target, diperlukan sejumlah rekomendasi perbaikan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran pada periode selanjutnya. Rekomendasi perbaikan tersebut meliputi peningkatan kualitas perencanaan anggaran melalui penyusunan rencana kegiatan yang lebih realistis, terukur, dan selaras dengan kebutuhan riil serta jadwal pelaksanaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan pengendalian pelaksanaan anggaran dengan mengoptimalkan fungsi monitoring dan evaluasi secara berkala, sehingga potensi deviasi dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti lebih dini. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan juga menjadi hal penting, antara lain melalui pembinaan dan pemutakhiran pemahaman terhadap regulasi perbendaharaan dan pengelolaan anggaran. Di samping itu, percepatan proses administrasi keuangan serta pemanfaatan sistem informasi keuangan secara optimal diharapkan dapat meningkatkan ketepatan waktu dan akurasi realisasi anggaran. Dengan implementasi rekomendasi perbaikan tersebut secara konsisten, diharapkan Nilai Kinerja Anggaran Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang pada tahun berikutnya dapat meningkat dan mendukung terwujudnya tata kelola organisasi yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

VII. Efisiensi

Nilai Kinerja Anggaran Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang Tahun 2025 sebesar 81,75 mencerminkan bahwa upaya efisiensi dalam pengelolaan anggaran telah dilaksanakan, meskipun hasilnya belum sepenuhnya optimal. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan anggaran telah diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama secara selektif dan terukur, dengan mengutamakan kegiatan yang memiliki dampak langsung terhadap pencapaian kinerja organisasi. Efisiensi diwujudkan melalui pengendalian belanja, penyesuaian pelaksanaan kegiatan dengan prioritas, serta optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia agar tetap menghasilkan output yang diharapkan.

Namun demikian, masih terdapat potensi peningkatan efisiensi, khususnya dalam penyelarasan antara perencanaan dan realisasi anggaran serta ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, penguatan perencanaan yang lebih matang, monitoring yang berkelanjutan, serta pemanfaatan sistem informasi keuangan secara optimal diharapkan dapat meningkatkan tingkat efisiensi pengelolaan anggaran pada periode selanjutnya dan mendorong pencapaian Nilai Kinerja Anggaran yang lebih tinggi.

VIII. Implementasi Budaya BerAKHLAK

- **Berorientasi Pelayanan**

Dengan mengedepankan orientasi pada pelayanan, pelaksanaan anggaran telah dimanfaatkan untuk mendukung pemberian layanan kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk melalui fasilitasi pelayanan dan konsultasi publik.

- **Akuntabel**

Dalam aspek akuntabilitas, pelaksanaan pelaporan kegiatan dan anggaran dilaksanakan melalui penyusunan laporan keuangan serta laporan Barang Milik Negara (BMN) yang disusun secara akuntabel dan tepat waktu pada setiap periode semesteran dan tahunan.

- **Kompeten**

Untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang secara berkelanjutan melaksanakan peningkatan kapasitas SDM dengan mengikutsertakan pegawai dalam pendidikan dan pelatihan teknis maupun kegiatan pengembangan kompetensi lainnya yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

- **Harmonis**

Melalui penerapan konsep open working space, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang berupaya menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, kolaboratif, dan harmonis guna mendukung peningkatan kinerja dan produktivitas pegawai.

- **Loyal**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, seluruh kegiatan dijalankan dengan penuh dedikasi serta menjunjung tinggi loyalitas kepada pimpinan dengan mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi.

- **Adaptif**

Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang senantiasa bersikap adaptif dengan terus melakukan inovasi serta menunjukkan antusiasme dalam menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan.

- **Kolaboratif**

Dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi, nilai kolaboratif juga telah diterapkan oleh seluruh sumber daya manusia, di mana setiap kegiatan dilaksanakan melalui kerja sama yang terintegrasi, baik secara internal antarunit kerja maupun secara eksternal dengan para pemangku kepentingan terkait.

IK 2.2 Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)

I. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan negara merupakan bagian penting dalam administrasi pemerintahan yang menuntut penerapan tata kelola yang baik, sehingga setiap unit kerja wajib melaksanakan anggaran secara tertib dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang disusun untuk menyajikan informasi yang relevan dan andal mengenai posisi keuangan serta seluruh transaksi yang dilakukan oleh Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan tersebut digunakan sebagai sarana untuk membandingkan antara realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan. Sebagai entitas pelaporan, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang memiliki kewajiban untuk menyampaikan secara sistematis berbagai upaya dan kinerja yang telah dilaksanakan dalam suatu periode pelaporan tertentu.

Penyusunan laporan keuangan bertujuan memberikan gambaran capaian realisasi keuangan berdasarkan rencana dan target yang telah ditetapkan, serta menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan alokasi sumber daya.

II. Capaian

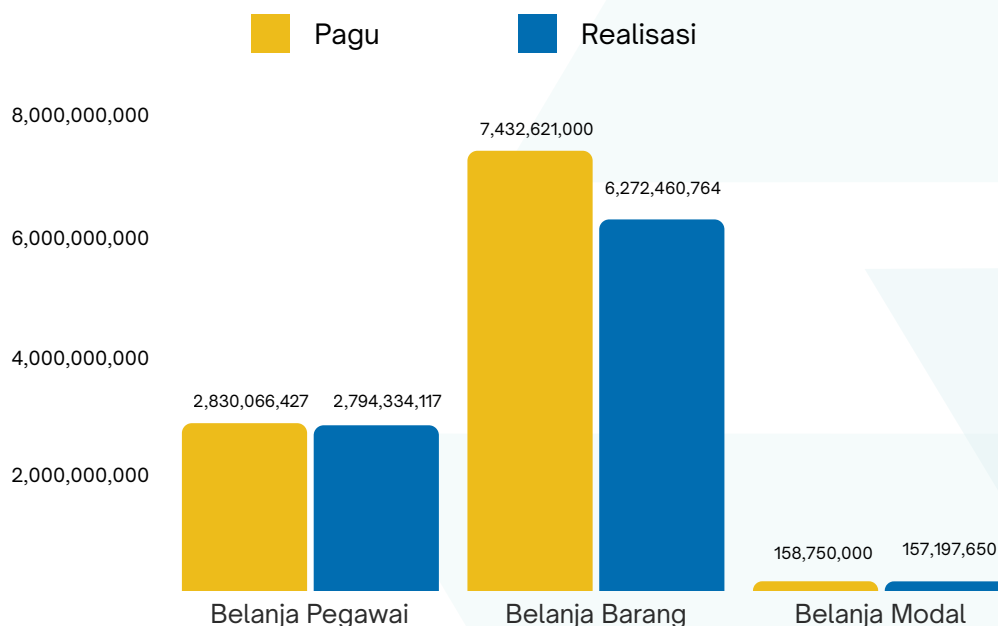
Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Target	-	-	100	100	97
Realisasi	-	-	95	100	100

Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) pada Tahun 2025 Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang untuk nilai capaian indikator pelaksanaan adalah 100 dari target yang ditetapkan sebesar 97.

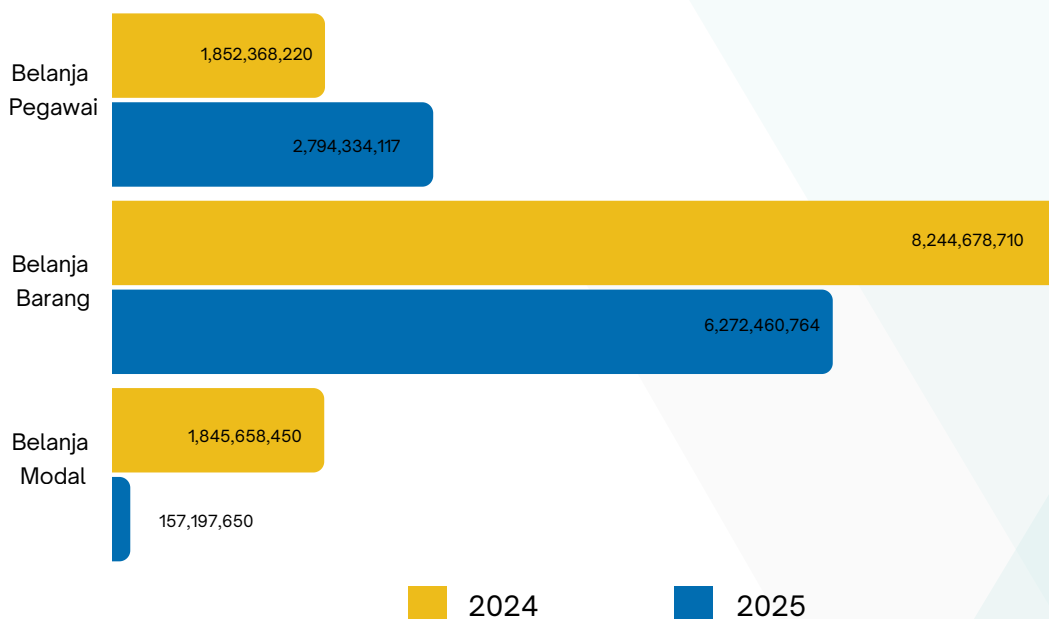
Pelaksanaan anggaran Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang sampai dengan akhir Desember 2025 dapat direalisasikan sebesar Rp.9,223,992,531,- dari pagu anggaran Rp.10,421,437,000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Realisasi anggaran satker lama (Januari-Juni) Rp.3,286,589,657,- (99.99%) dari pagu anggaran sebesar Rp.3,287,010,000,-.
- Realisasi anggaran satker baru (Juli-Desember) Rp.5,937,402,874,- (83.22%) dari pagu anggaran sebesar Rp.7,134,427,000,-.

Grafik Realisasi Tahun Anggaran 2025



Grafik Realisasi Tahun 2024 dan 2025



Grafik Realisasi Tahun 2024 dan 2025 memperlihatkan bahwa seluruh jenis belanja mengalami penurunan realisasi pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Belanja Barang merupakan komponen terbesar, meskipun turun dari Rp8,244,678,710 pada tahun 2024 menjadi Rp4,155,570,823 pada tahun 2025. Belanja Pegawai juga menurun dari Rp1,852,368,220 menjadi Rp1,624,634,401, sedangkan Belanja Modal mengalami penurunan paling signifikan dari Rp1,845,658,450 pada tahun 2024 menjadi Rp157,197,650 pada tahun 2025. Penurunan realisasi pada tahun 2025 ini mencerminkan adanya penyesuaian kebijakan atau prioritas anggaran dibandingkan tahun sebelumnya.

Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2025

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%	Sisa	Blokir
Belanja Pegawai	2.830.066.0000	2.794.954.735	98,945%	35.111.265	0
Belanja Barang	7.432.621.000	6.272.780.764	89,09%	60.014.236	1,099,826,000
Belanja Modal	158.750.000	157.197.650	99,02%	1.552.350	0

Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana Tahun 2025

Sumber Dana	Pagu	Realisasi	%	Sisa	Blokir
RM	4.955.774.000	4.697.578.678	95,58%	50.695.322	207.500.000
PNBP	5.465.663.000	4.527.354.471	88,865%	45.982.529	892.326.000

Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan Tahun 2025

Kegiatan	Pagu	Realisasi	%	Sisa	Blokir
Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	6.343.755.000	5.537.796.522	90,135%	59.571.478	746.387.000
Monitoring dan Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio, Perangkat Digital dan Kualitas Layanan Telekomunikasi	4.077.682.000	3.687.136.627	93,595%	37.106.373	353.439.000

Notes:

Secara volume kegiatan tidak berpengaruh terhadap efisiensi anggaran yang dilakukan, namun efisiensi anggaran berpengaruh terhadap kegiatan operasional satker.

Adanya efisiensi anggaran yang dilakukan dengan pemblokiran pada beberapa kegiatan dan anggaran sehingga capaian realisasi anggaran Loka Monitor SFR Pangkalpinang pada tahun 2025 hanya mencapai 83,22% dengan pagu blokir sebesar **Rp1.099.826.000**. Angka ini tidak sepenuhnya mencerminkan rendahnya kinerja pelaksanaan anggaran, melainkan lebih disebabkan oleh adanya pagu blokir yang memang tidak dapat dicairkan atau dibelanjakan. Dengan kata lain, terdapat selisih antara pagu awal dan pagu efektif (setelah blokir), sehingga persentase realisasi terhadap pagu awal menjadi lebih rendah.

Secara umum, seluruh indikator kinerja Loka Monitor SFR Pangkalpinang mencapai semua target yang telah ditentukan kecuali indikator Nilai Kinerja Anggaran yang tidak mencapai target disebabkan oleh adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), yakni transformasi dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) menjadi Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID), sebagai bagian dari perubahan Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital.

Perubahan organisasi tersebut terjadi pada tahun berjalan, sehingga berdampak pada mekanisme penilaian kinerja anggaran. Variabel efisiensi penggunaan anggaran yang diukur melalui indikator penggunaan SBK dan efisiensi SBK tidak dapat dinilai dan tidak terpenuhinya ketentuan dispensasi penilaian kinerja sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 27/MK/AG/2025, dapat diterapkan. Penilaian akhirnya hanya didasarkan pada capaian rincian output (RO) dengan bobot sebesar 75%, sehingga diperoleh nilai kinerja perencanaan anggaran hanya mencapai angka 75.

Tingkat efisiensi anggaran secara kuantitatif tidak mempengaruhi banyak atau sedikitnya jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam suatu periode. Artinya, peningkatan volume kegiatan tidak otomatis menyebabkan pemborosan, begitu pula penurunan jumlah kegiatan tidak serta-merta menjamin terjadinya efisiensi. Efisiensi anggaran lebih ditentukan oleh kualitas perencanaan, ketepatan pengalokasian sumber daya, serta kemampuan pengendalian biaya dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

Namun demikian, kebijakan efisiensi anggaran justru memiliki dampak nyata terhadap kegiatan operasional. Ketika dilakukan penghematan, pemangkasan, atau pembatasan anggaran pada pos-pos tertentu, maka pelaksanaan kegiatan sehari-hari dapat terdampak, baik dalam bentuk penyesuaian jadwal, pengurangan cakupan kegiatan, maupun perubahan skala prioritas. Dengan kata lain, meskipun efisiensi anggaran tidak secara langsung memengaruhi volume kegiatan, namun keputusan efisiensi anggaran akan berimplikasi pada bagaimana operasional satker dijalankan serta bagaimana target kinerja dapat dicapai secara optimal.

III. Analisa

Keberhasilan pencapaian nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) diawali dari perencanaan anggaran yang disusun secara matang, terukur, dan selaras dengan kebutuhan serta target kinerja, kemudian didukung oleh penyusunan rencana penarikan dana yang realistis dan sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan pada setiap bulan anggaran, sehingga arus kas dapat terkelola dengan tertib dan terkendali, selanjutnya ditunjang oleh kecepatan dan ketepatan dalam pengajuan serta pertanggungjawaban Ganti Uang (GU) agar tidak terjadi penumpukan transaksi dan keterlambatan pencatatan, serta diperkuat dengan pengelolaan Uang Persediaan (UP) yang dilakukan secara akuntabel, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga seluruh proses pengelolaan keuangan dapat tercermin secara andal, transparan, dan berkualitas dalam laporan keuangan UAKPA.

IV. Faktor Kendala, Upaya Percepatan dan Dampak

Dalam pencapaian Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang Tahun 2025 yang berhasil mencapai nilai indikator pelaksanaan 100 dari target 100, terdapat beberapa faktor kendala yang dihadapi, antara lain keterbatasan waktu dalam penyusunan laporan pada periode tertentu, dinamika perubahan regulasi pengelolaan keuangan, serta kebutuhan penyesuaian kompetensi sumber daya manusia terhadap sistem aplikasi keuangan yang terus berkembang. Untuk mengatasi kendala tersebut, dilakukan berbagai upaya percepatan, seperti penguatan perencanaan dan penjadwalan pelaporan, peningkatan koordinasi dan komunikasi internal, optimalisasi pemanfaatan aplikasi keuangan, serta peningkatan kapasitas aparatur melalui pembinaan dan pendampingan teknis secara berkelanjutan. Upaya-upaya tersebut memberikan dampak positif berupa kelancaran proses pengelolaan dan pelaporan keuangan, peningkatan ketepatan waktu dan keandalan data, serta terjaganya akuntabilitas dan transparansi, sehingga capaian nilai kualitas pelaporan keuangan UAKPA dapat diraih secara maksimal dan berkelanjutan.

V. Tindak lanjut/Pemanfaatan Laporan Kinerja

Tindak lanjut dan pemanfaatan Laporan Kinerja atas Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Tahun 2025 yang memperoleh nilai 100 dilakukan dengan menjadikan hasil capaian tersebut sebagai dasar evaluasi dan penguatan tata kelola pengelolaan keuangan secara berkelanjutan. Laporan kinerja dimanfaatkan sebagai bahan pengambilan keputusan manajerial dalam perencanaan anggaran, penetapan kebijakan pelaksanaan kegiatan, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan pada periode berikutnya. Selain itu, capaian ini digunakan sebagai tolok ukur dan best practice dalam menjaga konsistensi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, meningkatkan kualitas pengendalian internal, serta mendorong peningkatan kompetensi aparatur, sehingga kualitas pelaporan keuangan UAKPA dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan pada tahun-tahun selanjutnya.

VI. Rekomendasi Perbaikan

Meskipun Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang Tahun 2025 telah memperoleh capaian optimal dengan nilai 100, rekomendasi perbaikan tetap diperlukan sebagai upaya menjaga keberlanjutan dan peningkatan kualitas secara berkesinambungan. Rekomendasi perbaikan tersebut meliputi penguatan konsistensi penerapan standar akuntansi dan ketepatan waktu pelaporan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan teknis pengelolaan dan pelaporan keuangan, serta optimalisasi pemanfaatan sistem dan aplikasi keuangan untuk meminimalkan potensi kesalahan administrasi. Selain itu, perlu terus ditingkatkan pengendalian internal dan koordinasi lintas fungsi guna memastikan setiap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran berjalan selaras dengan ketentuan yang berlaku, sehingga kualitas pelaporan keuangan UAKPA dapat dipertahankan pada level sangat baik dan semakin adaptif terhadap dinamika kebijakan di masa mendatang.

VII. Efisiensi

Pemanfaatan aplikasi yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, yaitu Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), memberikan kemudahan dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan negara karena mampu mengintegrasikan seluruh fungsi utama yang meliputi perencanaan anggaran, pengelolaan bendahara, pencatatan komitmen, pengelolaan persediaan, pengelolaan aset, hingga penyusunan laporan keuangan dalam satu sistem yang saling terhubung. Melalui integrasi antar modul tersebut, setiap unit kerja dapat mengakses, memperbarui, dan memanfaatkan data keuangan secara real time dan konsisten, sehingga meminimalkan duplikasi data, kesalahan pencatatan, serta perbedaan informasi antar fungsi. Aplikasi SAKTI mendukung seluruh tahapan pengelolaan keuangan secara menyeluruh, mulai dari proses perencanaan yang terstruktur dan berbasis anggaran, pelaksanaan kegiatan dan transaksi yang tertib serta terdokumentasi dengan baik, hingga proses pertanggungjawaban yang akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penerapan Aplikasi SAKTI tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan, tetapi juga memperkuat kualitas pengendalian internal serta keandalan laporan keuangan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

VIII. Implementasi Budaya BerAKHLAK

• Berorientasi Pelayanan

Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang menyusun laporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran, yang sekaligus menjadi wujud pelayanan tidak langsung kepada masyarakat melalui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

- **Akuntabel**

Pelaksanaan anggaran dilakukan secara tertib dan sesuai ketentuan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, sehingga setiap kegiatan dan realisasi anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan terukur.

- **Kompeten**

Pencapaian kinerja anggaran didukung oleh tim kerja yang memiliki kompetensi dan keahlian sesuai tugas dan fungsi, khususnya dalam pengelolaan anggaran dan pemahaman regulasi keuangan.

- **Harmonis**

Lingkungan kerja yang kondusif dan hubungan kerja yang saling mendukung mendorong terciptanya kolaborasi internal yang efektif, sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan selaras dengan target yang ditetapkan.

- **Loyal**

Seluruh tim menunjukkan komitmen dan loyalitas tinggi terhadap organisasi dengan melaksanakan tugas secara konsisten, mematuhi arahan pimpinan, dan menjaga integritas dalam penggunaan anggaran.

- **Adaptif**

Tim kerja mampu menyesuaikan diri secara cepat dan tepat terhadap perubahan kebijakan, kondisi, maupun dinamika pelaksanaan anggaran tanpa mengganggu pencapaian target kinerja.

- **Kolaboratif**

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui kerja sama yang baik antara internal dan pihak eksternal, sehingga proses pelaksanaan anggaran dapat berjalan efektif dan menghasilkan output sesuai target yang telah ditetapkan.

B. KEGIATAN LAINNYA

1. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan salah satu indikator kinerja Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang dengan target pencapaian berupa 1 dokumen. Untuk mewujudkan tertib administrasi BMN, pengelolaan dilakukan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain melalui pencatatan setiap transaksi keluar dan masuk BMN serta pelaksanaan sinkronisasi data dengan KPKNL sebagai pengelola BMN. Pada Tahun 2025, total BMN yang dimiliki Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang mencakup 6 jenis aset dengan jumlah keseluruhan sebanyak 905 unit, yang terdiri dari:

- Tanah
- Peralatan dan Mesin
- Gedung dan Bangunan
- Irigasi
- Jaringan
- Aset Tetap Lainnya

Selama tahun 2025, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang telah melaksanakan lelang bongkaran sebanyak 1 kali, persetujuan penjualan aset BMN berupa Peralatan dan Mesin sebanyak 338 unit yang akan dilakukan pelelangan pada Awal Tahun 2026 dan telah disetujui Penetapan Usulan Penggunaan Aset BMN sebanyak 152 unit.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berhasil mencapai target yang ditetapkan yaitu 1 dokumen laporan pengelolaan BMN. Capaian ini mencerminkan tertib administrasi serta kepatuhan terhadap regulasi dalam pengelolaan aset negara. Penatausahaan BMN tidak hanya mencakup kegiatan pencatatan barang, tetapi juga melibatkan tanggung jawab pengelolaan yang kompleks dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama tim yang baik dalam pelaksanaannya, yang meliputi pemantauan kesesuaian penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan BMN agar pengelolaan aset dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Tabel Realisasi PK Perangkat Pendukung SMFR

Nama Barang	Satuan	Jumlah	Baik	Rusak
Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	M2	258	258	0
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	3.207	3.207	0
<i>Jeep</i>	Unit	1	1	0
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	3	3	0
Mobil Unit Monitoring Frekuensi	Unit	3	3	0
Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Lainnya	<i>Dummy</i>	1	1	0
Sepeda Motor	Unit	2	2	0

<i>Scooter</i>	Unit	3	3	0
<i>Portable Generating Set</i>	Unit	3	3	0
<i>Log Periodic Antenna</i>	Buah	2	2	0
<i>Global Positioning System</i>	Buah	1	1	0
Papan Visual/Papan Nama	Buah	1	1	0
<i>Note Book</i>	Buah	7	7	0
<i>Mobile File</i>	Buah	1	1	0
Mesin Absensi	Buah	1	1	0
Lemari Es	Buah	3	3	0
<i>Server</i>	Buah	2	2	0
<i>R.F. Signal Generator</i>	Buah	1	1	0
<i>Global Positioning System</i>	Buah	1	1	0
Mesin Pemotong Rumput	Buah	3	3	0
Tabung Gas	Buah	2	2	0
Peralatan Antena Pemancar MF+HF <i>Portable</i>	Buah	1	1	0
<i>CCTV - Camera Control Television System</i>	Buah	5	5	0
<i>All Band Receiver</i>	Buah	7	7	0
<i>DC / AC Power Supply</i>	Buah	3	3	0

<i>Scanner (Universal Tester)</i>	Buah	6	6	0
Meja Komputer	Buah	1	1	0
<i>Automatic Dispenser</i>	Buah	2	2	0
<i>Repeater RX/TX</i>	Buah	1	1	0
<i>Jet Pump</i>	Buah	1	1	0
<i>Uninterruptible Power Supply (UPS)</i>	Buah	4	4	0
<i>Analog/Digital Receiver</i>	Buah	4	4	0
<i>Neon Box</i>	Buah	2	2	0
Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	27	27	0
<i>Personal Computer</i>	Buah	7	7	0
<i>Unit Tranceiver Ssb Stationery</i>	Buah	2	2	0
<i>ATS (Automatic Transfer Switch) Genset</i>	Unit	1	1	0
Peralatan Antena UHF Lainnya	<i>Dummy</i>	2	2	0
Bangku Panjang Besi/Metal	Buah	1	1	0
<i>Conecctor</i>	Buah	3	3	0
<i>Camera Digital</i>	Buah	2	2	0
Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	2	2	0
Partisi	Buah	4	4	0

<i>A.C. Window</i>	Buah	2	2	0
Lemari Obat (Kaca)	Buah	1	1	0
<i>Air Conditioning (AC)</i>	Buah	1	1	0
<i>GPS</i>	Buah	2	2	0
<i>Unit Tranceiver VHF Stationary</i>	Buah	2	2	0
<i>Cable</i>	Buah	5	5	0
Tiang Keseimbangan	Buah	2	2	0
<i>Network Attach Storage (NAS)</i>	Unit	1	1	0
Adaptor (Alat Laboratorium Fisika)	Buah	1	1	0
<i>Stabilizer</i>	Buah	3	3	0
Kamera Digital	Buah	1	1	0
<i>Field Strength Meter</i>	Buah	1	1	0
<i>Professional Sound System</i>	Buah	1	1	0
<i>Transceiver</i>	Buah	5	5	0
<i>Netware Interface External</i>	Buah	3	3	0
<i>Translator VHF/VHF Portable</i>	Buah	1	1	0
Teropong/Keker	Buah	2	2	0
<i>Stabilizer/UPS</i>	Buah	8	8	0

<i>Power Supply (Peralatan Studio Video Dan Film)</i>	Buah	2	2	0
<i>Signal / Frequency Generator</i>	Buah	1	1	0
<i>Antene UHF Portable</i>	Buah	1	1	0
<i>Antene SHF Portable</i>	Buah	2	2	0
Sofa	Set	22	22	0
<i>Mast Tower</i>	Buah	4	4	0
Peralatan Mini Komputer Lainnya	<i>Dummy</i>	1	1	0
Rotator	Buah	2	2	0
Karpet	Buah	1	1	0
<i>Frequency Counter (Universal Tester)</i>	Buah	2	2	0
Mesin Ketik Manual <i>Portable</i> (11-13 Inchi)	Buah	1	1	0
<i>Portable Spektrum Analyzer</i>	Buah	1	1	0
<i>White Board</i>	Buah	3	3	0
<i>Serial Scanner/Printer</i>	Buah	3	3	0
Lemari Besi/Metal	Buah	15	15	0
<i>Sice</i>	Buah	4	4	0
Televisi	Buah	8	8	0
<i>Dummy Load Pendingin Udara</i>	Buah	1	1	0

P.C Unit	Buah	17	17	0
<i>Laptop</i>	Buah	29	29	0
Kasur/Spring Bed	Buah	3	3	0
Peralatan Antena SHF/Parabola Lainnya	<i>Dummy</i>	1	1	0
<i>Repeater and Transciever</i>	Buah	3	3	0
<i>Digital LED Running Text</i>	Buah	1	1	0
<i>Buffet</i>	Buah	1	1	0
<i>Rack Modem</i>	Buah	1	1	0
<i>Handy Talky (HT)</i>	Buah	10	10	0
Meja Makan Kayu	Buah	2	2	0
<i>Earth / Ground Tester</i>	Buah	1	1	0
<i>Hard Disk</i>	Buah	3	3	0
<i>Antene UHF Transportable</i>	Buah	1	1	0
Meja Kerja (Alat Laboratorium Lainnya)	Buah	2	2	0
Bingkai Foto	Buah	2	2	0
<i>Uninterrupted Power Supply (UPS)</i>	Buah	17	17	0
Kardex Besi	Buah	1	1	0
<i>Altimeter</i> (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	Buah	1	1	0

Mesin Penghitung Uang	Buah	1	1	0
<i>Morse Keyer</i>	Buah	2	2	0
<i>Thruline Watt Meter</i>	Buah	1	1	0
Meja Resepsionis	Buah	1	1	0
<i>Telephone Mobile</i>	Buah	4	4	0
<i>Unit Transceiver HF Stationary</i>	Buah	2	2	0
<i>Tripod</i>	Buah	1	1	0
Pompa Air	Unit	2	2	0
Peralatan Antena VHF/FM Lainnya	<i>Dummy</i>	2	2	0
<i>Spektrum Analyzer</i>	Buah	4	4	0
Lampu-lampu Kristal	Buah	1	1	0
Meja Rapat	Buah	51	51	0
Alat Penghancur Kertas	Buah	3	3	0
<i>Meubelair Lainnya</i>	<i>Dummy</i>	1	1	0
<i>Charger</i>	Buah	2	2	0
<i>Rackmount</i>	Buah	1	1	0
Lemari Kayu	Buah	11	11	0
<i>Vertikal Blind</i>	Buah	1	1	0

<i>Video Conference</i>	Buah	1	1	0
Rak Kayu	Buah	1	1	0
<i>Stationary Generating Set</i>	Unit	1	1	0
<i>Overhead Projector</i>	Buah	3	3	0
<i>Antena All Band</i>	Buah	2	2	0
<i>A.C. Split</i>	Buah	38	38	0
<i>Local Area Network (LAN)</i>	Buah	1	1	0
<i>TV Analyzer</i>	Unit	1	1	0
Hub	Buah	1	1	0
Tablet PC	Buah	5	5	0
Kursi Besi/Metal	Buah	141	141	0
Alat Ukur Universal Lainnya	<i>Dummy</i>	1	1	0
<i>Filing Cabinet Besi</i>	Buah	24	24	0
<i>Battery Charge</i>	Buah	4	4	0
Peralatan Antena Penerima SSHF	Buah	1	1	0
Lambang Garuda Pancasila	Buah	1	1	0
SWR Meter	Buah	2	2	0
<i>Digital Multimeter (Alat Ukur Universal)</i>	Buah	1	1	0

<i>Rig Dual Band</i>	Unit	2	2	0
Dispenser	Buah	6	6	0
Tangga Aluminium	Buah	2	2	0
<i>Router</i>	Buah	2	2	0
<i>Unit Tranceiver HF Portable</i>	Buah	1	1	0
Mesin Penghisap Debu/ <i>Vacuum Cleaner</i>	Buah	3	3	0
<i>Connectors</i>	Buah	2	2	0
Peralatan Antena HF/SW Lainnya	<i>Dummy</i>	3	3	0
Brandkas	Buah	2	2	0
Tang	Buah	1	1	0
<i>Portable Water Pump</i>	Unit	1	1	0
<i>Communication Receiver Set</i>	Buah	1	1	0
Kursi Kayu	Buah	12	12	0
Rak Server	Buah	3	3	0
<i>Sound System</i>	Buah	6	6	0
<i>Radio Direction Finder</i>	Buah	2	2	0
<i>GPS Receiver</i>	Buah	3	3	0

<i>Video Wall</i>	Unit	1	1	0
Alat Ukur Lainnya	<i>Dummy</i>	1	1	0
<i>Receiver HF/LF</i>	Buah	1	1	0
Meja Kerja Kayu	Buah	55	55	0
Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	Buah	4	4	0
<i>Facsimile</i>	Buah	3	3	0
<i>ICE Board (Interactive Collaborative Electronic Board)</i>	Buah	1	1	0
Kompas Gas (Alat Dapur)	Buah	1	1	0
<i>Amplifier</i>	Buah	3	3	0
Tabung Pemadam Api	Buah	5	5	0
<i>LCD Projector/Infocus</i>	Buah	1	1	0
Antena Penerima VHF	Buah	4	4	0
Lemari Penyimpan	Buah	5	5	0
Modem	Buah	1	1	0
<i>Low Noise Amplifier SHF</i>	Unit	3	3	0
Perkakas Dapur Tempa	Buah	2	2	0
<i>Water Distillation/Purifier (Alat Laboratorium Pertanian)</i>	Buah	3	3	0

<i>Digital Voice Rec S-1330</i>	Buah	2	2	0
Rak Besi	Buah	2	2	0
<i>Antene VHF/FM Portable</i>	Buah	4	4	0
<i>Antene HF/SW Portable</i>	Buah	3	3	0
Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Unit	1	1	0
Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen	Unit	1	1	0
Bangunan Tempat Parkir	Unit	2	2	0
Pagar Permanen	Unit	1	1	0
Bangunan Menara Radio	Unit	1	1	0
Gedung Garasi/Pool Permanen	Unit	2	2	0
Taman Permanen	Unit	1	1	0
Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	1	1	0
Bangunan Gedung Kantor Lainnya	<i>Dummy</i>	1	1	0
Bak Penampung/Kolam/ Menara Penampungan	Unit	1	1	0
Instalasi Penangkal Petir Manual	Unit	1	1	0
Jaringan Listrik Lainnya	<i>Dummy</i>	1	1	0
Buku Lainnya	<i>Dummy</i>	70	70	0
Pita Suara	Buah	1	1	0

2. Kepegawaian

Penatausahaan kepegawaian yang dilaksanakan di Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang pada Tahun Anggaran 2025 antara lain:

Tabel Kegiatan Kepegawaian Tahun 2025

No.	Nama Kegiatan Kepegawaian	Bulan Kegiatan	Jumlah Pegawai	Keterangan
1.	Kenaikan Pangkat	November	1 Orang	Kenaikan Pangkat dari III.a menjadi III.b
2.	Perpindahan Jenjang Jabatan	-	-	-
3.	Kenaikan Gaji Berkala	Januari	2 Orang	-
		April	2 Orang	-
		Mei	1 Orang	-
		Juli	2 Orang	-
4.	Purna Tugas	Januari	1 Orang	-
5.	Pengembangan Kompetensi	Maret	2 Orang	Bimbingan Teknis terkait Pusat Monitoring Telekomunikasi dan Penggunaan Perangkat Pengukuran Kualitas Layanan Telekomunikasi
		April	4 Orang	- Pelatihan Mutual Lokal Sosial Kultural Jenjang 1 - Pelatihan Mutual Lokal Sosial Kultural Jenjang 2 - Bimbingan Teknis Implementasi E-Katalog Versi 6
		Mei	2 Orang	- Sosialisasi Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pelayanan Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital - Pelatihan Teknis Jurnalistik Kehumasan Angkatan I

No.	Nama Kegiatan Kepegawaian	Bulan Kegiatan	Jumlah Pegawai	Keterangan
		Juni	1 Orang	• Pelatihan Teknis Dasar <i>Prompt Engineering AI Assistant</i> Tahun 2025
		Juli	4 Orang	• Bimtek <i>Refreshment</i> Aplikasi SAKTI dan <i>Digipay</i> serta Sosialisasi Anti Korupsi dan Inovasi KPPN Pangkalpinang Tahun 2025 • <i>Workshop</i> Pemeliharaan Perangkat SMFR • Pelatihan Teknis Penyusunan <i>Policy Brief</i> • Pelatihan Teknis Produksi Animasi Kampanye Publik Berbasis <i>AI Batch-2</i> Tahun 2025
		Agustus	3 Orang	• Pelatihan <i>Refreshment</i> PPNS • Pelatihan Teknis TV Digital Tahun 2025
		September	2 Orang	• Tahap Klasikal Pelatihan Dasar CPNS Gelombang I Tahun 2025
		Oktober	10 Orang	• Peningkatan kompetensi bidang manajerial bagi para Kepala Subbagian Umum di lingkungan UPT dan Kepala Subbagian Tata Usaha di lingkungan kantor pusat Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital • Bimbingan Teknis “Waspada Jerat Pidana pada Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah” • Pelatihan <i>Orientation Training</i> CPNS TA. 2024 <i>Batch I</i> • <i>Workshop</i> Kearsipan dan Kehumasan dengan tema :“ Tantangan SDM Kearsipan dan Kehumasan di Era Digitalisasi” • Peningkatan Kompetensi PPNS • Peningkatan Kompetensi PPNS dan Kegiatan Forum Pembangunan zona integritas Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital

No.	Nama Kegiatan Kepegawaian	Bulan Kegiatan	Jumlah Pegawai	Keterangan
		November	27 Orang	- Kegiatan Pembelajaran Klasikal dan Seminar Aktualisasi Latsar CPNS Gelombang II Tahun 2025 - Peningkatan Kapasitas SDM PPPK Lokmon Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang Tahun 2025 - Forum Konsultasi Publik Layanan Kalibrasi - Workshop Fotografi dan Editing Canva untuk media sosial Pemerintah
		Desember	20 Orang	- Pelatihan Tahap Klasikal dan Aktualisasi CPNS Gelombang III Tahun Anggaran 2025 - FGD "Pengawasan Tertib, Sanksi Administrasi Efektif" - Sosialisasi Standar biaya masukan tahun 2026 - Kegiatan Pembekalan PPPK tahap II
6.	Perpindahan Jabatan (Jabatan Fungsional Umum ke Jabatan Fungsional Tertentu)	-	-	-
7.	Penambahan Pegawai	Mei	11 Orang	- Pengangkatan 4 Orang CPNS - Pengangkatan 7 Orang PPPK Tahap 1
		Oktober	16 Orang	Pengangkatan 16 Orang PPPK Tahap 2

Rekomendasi untuk tahun selanjutnya adalah penerapan sistem *reward* dan *punishment* secara objektif dan terukur bagi pegawai, baik yang memiliki etos kerja serta kinerja tinggi maupun yang kinerjanya masih kurang. Pemberian *reward* diharapkan dapat menjadi bentuk apresiasi dan motivasi, sementara *punishment* berfungsi sebagai upaya pembinaan dan penegakan disiplin agar terjadi perbaikan kinerja.

Melalui penerapan kebijakan tersebut secara adil dan konsisten, diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja, tanggung jawab, dan kontribusi pegawai bagi Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang khususnya dan Kementerian Komdigi pada umumnya, sekaligus sebagai bagian dari implementasi Program Zona Integritas.

Kesimpulan :

Dalam upaya membentuk sumber daya manusia yang unggul, diperlukan penyelenggaraan pelatihan yang disesuaikan dengan kompetensi dan kebutuhan masing-masing pegawai, serta didukung dengan pemberian *reward* atas kinerja yang ditunjukkan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan motivasi kerja pegawai sehingga mendorong mereka untuk memberikan kontribusi terbaik bagi Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang secara khusus dan Kementerian Komdigi secara umum.

3. Kegiatan Sertifikasi ISO 9001:2015

Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang secara berkesinambungan berupaya meningkatkan kinerja organisasi, kualitas pelayanan, serta kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki. Upaya tersebut diwujudkan melalui komitmen untuk menerapkan, memelihara, dan terus mengembangkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan.

Sebagai bentuk implementasi komitmen tersebut, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang telah melaksanakan Resertifikasi Sistem Manajemen Mutu pada tahun 2025 yang dilaksanakan secara hybrid. Selanjutnya, Sertifikat ISO 9001:2015 diterbitkan oleh International Certification Service pada tanggal 28 Oktober 2025.



Gambar: Sertificate ISO 9001:2015

4. Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang telah menunjukkan komitmen yang kuat serta melakukan berbagai upaya nyata dalam mewujudkan sasaran reformasi birokrasi, yaitu terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang memiliki kapasitas dan profesionalisme yang memadai, serta pelayanan publik yang berkualitas dan prima. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerapan dan penguatan Program Zona Integritas secara berkelanjutan.

Sejalan dengan Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang menetapkan berbagai strategi dalam pembangunan Zona Integritas melalui pelaksanaan program-program yang tepat sasaran dan inovatif. Strategi tersebut mencakup penguatan kapasitas internal organisasi, penanaman budaya anti korupsi, peningkatan kualitas pelayanan prima, pengelolaan manajemen media, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.

Dalam implementasi Zona Integritas, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang melaksanakan upaya perubahan dan reformasi secara konsisten pada enam area utama, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, serta Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Berbagai perubahan dan pembaruan tersebut telah dilaksanakan secara bertahap, dengan hasil implementasi Zona Integritas pada periode tahun 2025 sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Tabel Pembangunan Zona Integritas (ZI)

No.	Area ZI	Indikator	Output	Outcome
1.	Manajemen Perubahan	- Pembentukan Tim Kerja - Penyusunan Dokumen Kerja - Pemantauan dan Evaluasi ZI - Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	- Tersusunnya SOP dan SK Penyusunan Tim Kerja ZI - Tersusun dan tersosialisasinya dokumen rencana kerja pembangunan ZI pada pegawai - Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM - Berubahnya pola pikir dan budaya kerja	- Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai - Merubah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan kantor - Menurunkan resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan peraturan perundang-undangan

2.	Penataan Tata Laksana	• Prosedur Operasional Tetap (SOP) kegiatan utama • <i>E-Office</i>	• Prosedur operasional tetap mengacu kepada peta proses bisnis instansi • Prosedur operasional tetap telah diterapkan • Prosedur operasional tetap telah dievaluasi • Sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi • Sistem kepegawaian berbasis sistem informasi • Sistem pelayanan berbasis sistem informasi • Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM dan pemberian layanan kepada publik • Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan • Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	• Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan • Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan • Meningkatnya kinerja
----	-----------------------	--	---	---

3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	• Perencanaan kebutuhan pegawai • Pola mutasi internal • Pengembangan pegawai berbasis kompetensi • Penetapan kinerja individu • Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai • Sistem informasi pegawai	• Tersusunnya kebutuhan pegawai di unit kerja dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan • Penempatan rencana kebutuhan pegawai • Tersusunnya hasil monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai • Ditetapkannya kebijakan pola mutasi internal • Penerapan kebijakan mutasi internal • Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola rotasi internal • Mengaplikasikan Training Need Analysis dalam pengembangan kompetensi • Tersusunnya penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi • Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu secara periodik • Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan	• Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur • Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur • Meningkatnya disiplin SDM aparatur • Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur • Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur
----	-------------------------------	--	--	---

4.	Penguatan Akuntabilitas	- Keterlibatan pimpinan - Pengelolaan akuntabilitas kinerja	- Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan - Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja - Adanya dokumen perencanaan - Adanya Indeks Kinerja Utama (IKU) - Pelaksanaan IKU dengan prinsip SMART - Pelaporan kinerja memberikan informasi tentang kinerja - Adanya upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten	- Meningkatnya kinerja Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang - Meningkatnya akuntabilitas Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang
5.	Penguatan Pengawasan	- Pengendalian gratifikasi - Penetapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintahan (SPIP) - Pengaduan Masyarakat - Whistle Blowing System (WBS) - Penanganan benturan kepentingan	- Melaksanakan <i>public campaign</i> dilokasi pelayanan dengan <i>banner</i> dan spanduk - Membentuk Tim Pengendalian Gratifikasi - Menyusun Tim SPIP - Menyusun matriks resiko dan laporan pengendalian resiko - Menyediakan sarana penyampaian pengaduan	Meningkatnya kepercayaan Masyarakat terhadap Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang

			- Berkoordinasi dengan Itjen terkait penerapan WBS - Menyusun tindak lanjut hasil evaluasi	
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	- Standar pelayanan - Budaya pelayanan prima - Penilaian kepuasan terhadap pelayanan	- Adanya kebijakan standar pelayanan - Tersusnya maklumat standar pelayanan - SOP standar pelayanan - Tersosialisasinya budaya pelayanan prima - Informasi tentang pelayanan lebih mudah diakses - Adanya saranan layanan terpadu - Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	- Meningkatnya kualitas pelayanan publik - Meningkatnya jumlah penggunaan frekuensi radio yang memperoleh izin stasiun radio - Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat

Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang saat ini sudah mengajukan asistensi dan penilaian ke Eselon I dengan penilaian mandiri sebesar 91,61. Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang sudah menjawab semua pertanyaan yang ada di **E-Ziko yaitu sebanyak 113 pertanyaan dengan presentase 100%, sedangkan untuk data dukung sudah diupload sebanyak 113 dengan presentase 100%.**



Gambar: Penilaian Zona Integritas

Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang senantiasa menunjukkan komitmen dan upaya berkelanjutan dalam membangun Zona Integritas melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan berintegritas. Upaya tersebut dilaksanakan secara konsisten sebagai bagian dari langkah strategis untuk mencapai sasaran Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

5. Penerapan Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan budaya, proses dan struktur yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi dengan mengelola risiko pada tingkat yang dapat diterima. Penanganan risiko mencakup proses berulang dari:

- Formulasi dan seleksi opsi perlakuan risiko
- Perencanaan dan implementasi perlakuan risiko
- Penilaian efektivitas perlakuan yang akan dan telah dilakukan
- Pengambilan Keputusan apakah risiko Tersisa bisa diterima
- Pelaksanaan perlakuan lanjutan jika opsi tidak diterima

Pelaksanaan Manajemen Risiko di Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang dilaksanakan dalam konteks manajemen risiko, profil dan peta risiko serta rencana penanganan risiko. Pelaksanaan manajemen risiko telah dilakukan dengan melibatkan seluruh koordinator risiko dan sesuai dengan ketentuan terkait penerapan manajemen risiko yang berlaku di lingkungan Kementerian Komdigi.

Tabel Penerapan Manajemen Risiko

No.	Sasaran Organisasi	Potensi Kejadian/Kendala	Dampak	Mitigasi Risiko
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital yang efektif dan efisien	• Pelaksanaan Revisi DIPA lebih dari 1 (satu) kali dalam satu triwulan • Terjadinya deviasi antara pelaksanaan kinerja anggaran dengan rencana pelaksanaan anggaran	• Penurunan Kinerja	• Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital terkait langkah-langkah kebijakan pemotongan anggaran dan/atau blokir anggaran agar tidak menjadi beban penyerapan anggaran di akhir tahun anggaran • Melakukan pemantauan secara berkala terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan arahan pusat terkait blokir anggaran

2.	Meningkatnya kepatuhan dan kualitas pengendalian spektrum frekuensi radio, perangkat telekomunikasi dan layanan telekomunikasi	• Jumlah peserta yang mendaftar tidak sesuai dengan target yang ditetapkan • Perangkat SMFR tidak berfungsi dengan baik • Nelayan tidak memiliki Dokumen NIB • Perangkat yang digunakan belum tersertifikasi marine • Masih terdapat pengguna Spektrum Frekuensi Radio yang belum memahami alur pengaduan melalui Aplikasi Trouble Tiket • Parameter teknis tidak sesuai dengan ISR • Pelaksanaan pengukuran kualitas layanan memerlukan peralatan yang memadai	• Penurunan Kinerja	• Melakukan koordinasi secara intens dengan ORARI Daerah/Lokal dan Sosialisasi melalui berbagai media sosial • Pemeriksaan dan pemeliharaan secara rutin terhadap fungsi perangkat SMFR • Melakukan pendampingan dan/atau asistensi kepada Nelayan untuk pengurusan dokumen persyaratan dalam pengajuan ISR Maritim • Melakukan sosialisasi tentang penggunaan perangkat yang tersertifikasi untuk Nelayan • Melaksanakan sosialisasi terhadap pengguna Spektrum Frekuensi Radio baik secara langsung maupun melalui media sosial • Melakukan sosialisasi kepada pengguna mengenai penggunaan Spektrum Frekuensi Radio • Melakukan koordinasi secara intens dengan Direktorat Pengendalian Infrastruktur Digital mengenai aturan dan perangkat monitor yang akan digunakan pada saat pelaksanaan kegiatan
----	--	---	---	---

Benchmark Kinerja

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Lokmon SFR Pangkalpinang		Balmon SFR Kelas II Mataram	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
I. Meningkatnya Kepatuhan dan Kualitas Pengendalian Spektrum Frekuensi Radio					
1	Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	80%	100%	80%	100%
2	Pemeriksaan Stasiun Radio	100%	100%	100%	100%
3	Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	95%	100%	95%	100%
4	Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi	75%	100%	75%	100%
5	Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	85%	100%	85%	98.96%
6	Penanganan Sanksi Denda Administratif	80%	100%	80%	100%
7	Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	100%	100%	100%	125%
8	Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)	100%	100%	100%	208.33%
9	Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	100%	100%	100%	100%
10	Sosialisasi Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%
11	Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	100%	100%	100%	123.44%

No	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Lokmon SFR Pangkalpinang		Balmon SFR Kelas II Mataram	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
12	Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	100%	100%	100%	110.56%
13	Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)	100%	100%	100%	100%

II. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital yang Efektif dan Efisien

14	Nilai Kinerja Anggaran Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang Tahun 2025	86,95	81,75	86,95	86
15	Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	97	100	97	100

BAB IV

PENUTUP

FREQUENCY (MHz)
EXPLORING

KA MONITOR
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOMINFO
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PENUTUPAN

Pada tahun 2025, sasaran program beserta indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital menjadi acuan utama dalam pelaksanaan tugas serta landasan dasar dalam pemberian pelayanan prima oleh seluruh unit dan satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital di daerah, Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan serta pengendalian Spektrum Frekuensi Radio di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Kinerja Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang memiliki peran yang signifikan dalam menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna spektrum frekuensi nirkabel yang pertumbuhannya semakin pesat. Kondisi tersebut menuntut kesiapan dan peningkatan kapasitas aparatur, mengingat tantangan pengelolaan spektrum frekuensi semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya jumlah pengguna.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Tahun 2025, telah ditetapkan sebanyak 15 (lima belas) indikator kinerja yang mendukung 2 (dua) sasaran program Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang. Hasil analisis dan pengukuran capaian kinerja pada tahun 2025 menunjukkan bahwa Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang berhasil memenuhi sasaran yang ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, yang tercermin dari capaian kinerja yang selaras dengan target yang telah ditentukan.

Tabel Capaian Target Tahun 2025

No.	Sasaran Organisasi	Potensi Kejadian/Kendala
1.	Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	Target 80% Realisasi 100%
2.	Pemeriksaan Stasiun Radio	Target 100% Realisasi 100%
3.	Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	Target 95% Realisasi 100%
4.	Tingkat Kepatuhan Standar Teknis Alat dan/atau Perangkat Telekomdigi	Target 75% Realisasi 100%

5.	Terjaganya Operasional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitor Frekuensi Radio di UPT	Target 85% Realisasi 100%
6.	Penanganan Sanksi Denda Administratif	Target 80% Realisasi 100%
7.	Tersedianya Data Hasil Pengukuran Kualitas Layanan	Target 100% Realisasi 100%
8.	Penyelenggaraan Layanan Sertifikasi Operator Radio (UNAR, MOTS-IKRAN)	Target 100% Realisasi 100%
9.	Pelaksanaan Penanganan Piutang BHP Frekuensi Radio	Target 100% Realisasi 100%
10.	Sosialisasi Pelayanan Publik	Target 100% Realisasi 100%
11.	Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelayanan Publik (IKM/IPKP)	Target 100% Realisasi 100%
12.	Pelaksanaan Survey Integritas Pelayanan Publik (IIPP/IPAK)	Target 100% Realisasi 100%
13.	Tindak lanjut verifikasi site ISR Microwave Link yang tidak sesuai (PrimaAksi)	Target 100% Realisasi 100%
14.	Nilai Kinerja Anggaran Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio Pangkalpinang Tahun 2025	Target 86,95 Realisasi 81,75
15.	Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)	Target 97 Realisasi 100

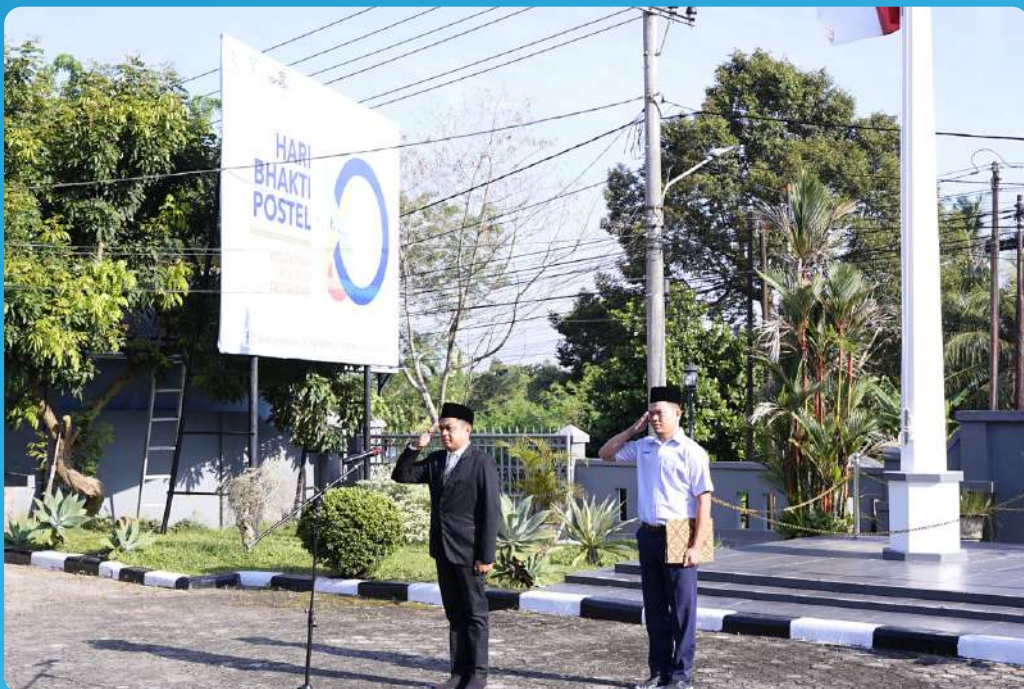
KEGIATAN SOSIALISASI PELAYANAN PUBLIK



KEGIATAN UNAR CAT NON REGULER TAHUN 2025



KEGIATAN HARI BAKTI POSTEL KE 80



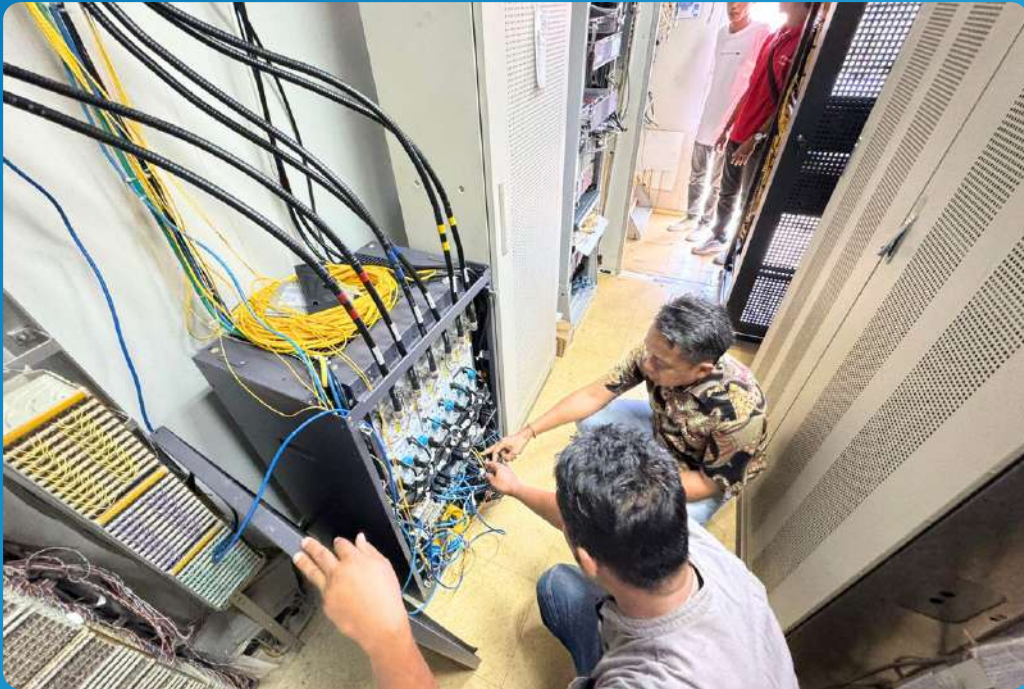
KEGIATAN MONITORING NATAL 2025 DAN TAHUN BARU 2026



KEGIATAN UPACARA HUT RI KE 80



KEGIATAN PENERTIBAN NASIONAL



SOSIALISASI & BIMBINGAN TEKNIS IKRAN





LOKMON Pangkalpinang



Jl. Jebung No.30, Selindung, Kec. Gabek, Kota Pangkal
Pinang, Kepulauan Bangka Belitung 3317

